



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI VI DPR RI**

- Tahun Sidang : 2020-2021
- Masa Persidangan : I
- Rapat Ke- : 17 (*tujuh belas*)
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan:
1. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI);
 2. Ketua Umum Asosiasi Permeabelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO);
 3. Ketua Umum Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI);
 4. Ketua Umum Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI);
 5. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan (AP5)
 6. Ketua Umum Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (APIKI); dan
 7. Ketua Umum Persatuan Pabrik Monosodium Glutamate dan Glutamic Acid Indonesia (P2MI).
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, Tanggal : Selasa, 8 September 2020
- Waktu : 10.00 WIB – 14.25 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Gedung Nusantara I Lt.1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
- Acara : Pembahasan Mengenai Kondisi Aktual terkait Dampak Covid 19
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI
- Hadir : PIMPINAN:
1. Faisol Riza, S.S (F-PKB)
 2. Aria Bima (F-PDIP)
 3. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.AP. (F-PG)
 4. Mohamad Hekal, MBA (F-Gerindra)
 5. Martin Manurung, S.E., M.A. (F-Nasdem)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)

6. Adisatrya Surya Sulistio
7. Gilang Dhielafararez, S.H., LL.M.
8. Rieke Diah Pitaloka
9. ST. Ananta Wahana, SH.
10. I Nyoman Parta, S.H.
11. Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus M.A.
12. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
13. Sondang Tiar Debora Tampubolon
14. dr. H. Mufti A. N. Anam

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

15. Drs. Mukhtarudin
16. Lamhot Sinaga
17. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
18. Doni Akbar, S.E.
19. Trifena M. Tinal, B.SC.
20. Nusron Wahid

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

21. Khilmi
22. Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
23. IR. H. La Tinro La Tunrung
24. M. Husein Fadlulloh, B. Bus., M.M., M.B.A.
25. Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M.

FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)

26. Drs. H. Nyat Kadir
27. H. Subardi, S.H., M.H
28. Zuristy Firmadata, S.E., M.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

29. Ir. H. M. Nasim Khan
30. Tommy Kurniawan
31. Marwan Ja'far
32. Drs. H. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
33. Siti Mukaromah, S.Ag.,M.A.P

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

34. H. Anton Sukartono Suratto, M.Si
35. Hj. Melani Leimena Suharli
36. Putu Supadma Rudana, M.B.A.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

37. Amin AK, M.M.
38. Hj. Nevi Zuarina
39. Rafli
40. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

41. Abdul Hakim Bafagih
42. Primus Yustisio, S.E.
43. Daeng Muhammad, SE., M.Si.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

44. Elly Rachmat Yasin

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

(rekaman tidak lengkap)

KETUA UMUM PHRI (HARYADI SUKAMDANI):

(rekaman tidak lengkap) harus menyelesaikan tagihannya sampai dengan Juli 2020. Jadi kalau kondisi seperti ini di sektor otel dan restoran tentunya banyak sekali yang menunggak karena kesulitan *cashflow*.

Mungkin pengantar dari kami demikian Bapak Pimpinan. Mohon izin untuk Pak Maulana Yusran untuk dapat memberikan presentasinya secara singkat. Kami persilakan Pak.

WAKIL KETUA PHRI (MAULANA YUSRAN):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan Komisi VI DPR RI beserta seluruh jajarannya yang hadir *offline* dan *online*,

Saya akan melanjutkan dari paparan dari masukan apa tadi pointers dari Pak Haryadi. Sekarang kami akan bicara tentang terkait pariwisata bahwa sebenarnya pariwisata ini adalah yang merupakan pergerakan yang sangat membutuhkan interaksi, nah sekarang dampaknya itu karena interaksinya ditahan ini yang menjadi masalah terhadap sektor pariwisata. dan kita juga masih melihat disini bahwa pariwisata itu bukan hanya sekedar *leisure* tapi *vacational* itu juga menjadi penting iya *vacational* bukan hanya *leisure* tapi *business tourism* itu menjadi penting juga karena itu yang terbesar kalau kita bicara domestik.

Lanjut.

Kemudian berikutnya adalah penyebab turunnya dari pasar atau *demand* itu ya tentu pertama tadi adalah regulasi jadi pembatasan aktivitas sudah dijelaskan Bapak Pimpinan sidang PSBB. Kekhawatiran masyarakat Covid itu juga menjadi dampak dan kekhawatiran masyarakat terhadap apa namanya transportasi udara untuk *travelling* itu juga menjadi hal utama pada umumnya *Rapid Test* dan informasi terhadap sirkulasi udara di dalam pesawat yang belum terinfo dengan baik. Kemudian berikutnya adalah menurunnya daya beli masyarakat. Dan terakhir adalah perilaku masyarakat itu sendiri. Kalau kita lihat di *slide* berikutnya ada masa perilaku masyarakat ini kalau kita kalau kita baca dari survei yang dilakukan sumber Nielsen,

Inventure Knowledge ini bahwa banyak yang lebih nyaman dengan kondisi di rumah. Nah ini kalau dari sektor akomodasi dan restoran ini dampaknya cukup besar, contohnya rapat melalui *virtual* banyakan hotel-hotel itu yang akomodasi itu untuk *business tourism* itu ingin *volume* terisi dan restoran juga tumbuh karena adanya interaktif atau kegiatan masyarakat di luar bukan dari di rumah.

Kemudian selanjutnya adalah strategi kami dalam meningkatkan pasar atau *demand*. Pertama adalah bagaimana penanganan Covid itu sudah pasti karena kalau Covid masih berlangsung tentu hambatan terhadap pergerakan menjadi utama itu dilakukan dengan *testing, tracing, dan treatment*. Kemudian bagaimana Pemerintah menghentikan PSBB mencakup regulasi yang menghambat pergerakan masyarakat. Kemudian juga ada antisipasi pemberitaan yang *hoax* atau terkait Virus Covid terhadap bisnis pariwisata atau destinasi ini juga paling penting karena begitu sudah terinfo ada yang terjangkit di salah satu sektor destinasi atau apapun itu dampaknya sangat luas. Kemudian stimulus yang tadi juga disampaikan oleh Ketua Umum bahwa memberikan stimulus yang efektif dan sesuai kebutuhan kepada pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat. Yang terakhir adalah bagaimana Pemerintah menjadi *trigger* untuk apa namanya untuk melakukan kegiatan, karena apa? kalau kita lihat dari kemarin itu libur dua kali libur panjang itu kenaikan *occupancy* itu cukup ada. Namun di *weekdays*-nya dia turun drastis kenapa? karena *weekdays* itu umumnya adalah *business tourism* yang pada umumnya dilakukan oleh kegiatan-kegiatan oleh Pemerintah lintas sektor baik yang di APBN atau APBD.

Selanjutnya kita melakukan protokol. Nah ini sampai tiga kali kita melakukan perubahan menyesuaikan dari keputusan Menteri Kesehatan. Kemudian protokol itu kita publikasi, publikasi baik melalui sosial media atau media advertising dan seterusnya. Selanjutnya kita juga melakukan kerjasama dengan pihak *airlines* karena tadi saya sampaikan juga bahwa ada hambatan masalah informasi terhadap pemanfaatan transportasi udara yaitu *safe travel campaign* yang tujuannya disini untuk memberi informasi bahwa *travel campaign* ini melakukan perjalanan melalui udara itu relatif aman karena dia menggunakan sistem (*suara tidak jelas*). Kemudian selanjutnya kenapa kita memilih ada *Campaign* ini kalau dilihat dari grafiknya disitu bahwa yang sebelah kiri pada *occupancy*, kemudian yang sebelah kanan itu transportasi udara yang saya kasih pointers. Turun naiknya hampir sama transportasi udara, transportasi darat itu tinggi Kereta Api itu hanya di Pulau Jawa karena di Pulau Jawa ada infrastruktur tol dan Kereta Api ya terbesar, tapi ya di daerah lain karena negara kepulauan transportasi udara itu menjadi penting jadi turun naiknya hampir sama. Kemudian selanjutnya dari *Travel Campaign* ini kita juga kemarin di Bali 29 Agustus itu kita melakukan kerja sama dengan Ina dengan INACA. Kerja sama ini adalah bagian dari strateginya PHRI dan INACA untuk menggerak *demand* kembali yaitu tentu melalui *tracing* bagaimana *tracing* ini kerja sama *B to B* ini antara hotel dan *airlines* ini bisa menciptakan suatu *demand* yang cukup baik.

Kemudian selanjutnya adalah masalah stimulus, stimulus dari kebijakan Pemerintah yang sudah dikeluarkan. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum dari Pak Haryadi Sukamdani mengenai tagihan listrik soal PLN, di sini yang sudah dilakukan yang sudah disetujui adalah penghapusan biaya nyala minimum yang 40 jam. Yang belum terealisasi ini adalah masalah pada saat kemarin dari bulan Maret sampai bulan Juni banyak Hotel karena ada PSBB itu tutup mereka melakukan penurunan daya pada saat mereka ingin menaikkan kembali daya itu biayanya cukup mahal. Jadi ini kita berharap bahwa apa namanya biaya kenaikan daya ini dapat diberikan relaksasi jadi tidak usah di pungut kembali. Kemudian juga yang berikutnya adalah bagaimana kebijakan PLN itu juga tidak merata seluruh Indonesia karena

kalau bisnis hotel dan restoran yang ada di Batam itu mereka tidak menggunakan PT PLN Persero tapi Bright PLN. Nah ini juga perlu diperhatikan oleh Pemerintah bahwa harusnya semua wilayah itu ada dampak dari kebijakan tersebut.

Selanjutnya adalah kita melihat bahwa dampak PLN ini sebenarnya yang diributkan oleh kami di bisnis Akomodasi saya rasa di sektor lain itu juga sama yaitu masalah pelanggan premium. Jadi pelanggan premium ini adalah fasilitas *additional* yang *extended services* ditawarkan oleh PLN yang diambil oleh para pelaku, di sini ada beberapa kelebihan dan tapi biayanya jauh lebih mahal, kemudian biaya hidup minimumnya pun mahal itu yang menggerus daya tahan perusahaan. Nah di sini ada beberapa macam tipe berikutnya ada di apa namanya ada *Platinum, Gold, Silver, dan Bronze*, nah ini yang menjadi mahal sebenarnya kalau 40 jam kalau sekarang saya rasa sudah pada ketemu. Nah ini kita berharap jika ada yang pelanggan premium ini yang sudah yang mau tidak mengikuti lagi seharusnya di diberikan gitu loh jadi jangan dipaksa dia harus tetap melakukan pelanggan premium karena biayanya cukup mahal per KWH-nya disana. Kemudian juga minimum nyalanya juga mahal juga tinggi tadi 40 jam mereka jadi 110 bahkan ada yang 200 jam per bulan, itu yang jadi *problem* utama sebenarnya.

Lanjut kemudian ada di situ ada simulasi mengetahui *pricing* saya nggak usah sampaikan masalah kenaikan daya. Lanjut mengenai struktur restrukturisasi produk baru dan modal kerja Pemerintah mengeluarkan POJK 11.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak sebentar ke PLN, apa apa yang menjadi masukan ke kita terkait dengan PLN tadi yang saat ini *urgent*?

WAKIL KETUA PHRI (MAULANA YUSRAN):

Jadi yang paling *urgent* itu sebenarnya masukan untuk PLN itu pertama adalah kalau misalnya ada yang sudah menurunkan dayanya untuk melakukan efisiensi sementara untuk menaikkan kembali dayanya itu tidak dipungut biaya Pak.

KETUA RAPAT:

Gitu ya.

WAKIL KETUA PHRI (MAULANA YUSRAN):

Iya itu nomor 1. Kemudian yang kedua, juga bagi pelanggan-pelanggan premium yang mungkin kembali ke pelanggan normal itu juga jika mereka ingin melakukan itu ya diberikan saja gitu loh karena kan sifatnya premium ini kan adalah *Edition Extended Service* dari PLN bukan masalah utama gitu loh karena situasi *pandemic* ini berhasil situasi yang belum menentu karena kalau nanti stimulus ini habis di 6 bulan mereka akan hadapi ini lagi apalagi situasi Covid kan naik. Akhirnya mereka menggerus yang harusnya mereka biayanya mungkin ya kalau 150 kamar itu perbulan dengan 40 jam mereka bayar Rp35 juta biaya minimum nyalanya 40 jam itu dengan menggunakan *premium service* mereka harus mengeluarkan biaya itu sebulan itu kalau nggak dipaketin 100 jutaan ada bahkan lebih bisa 500 juta tergantung besar daya mereka masing-masing, nah itu Pak.

Lanjut kemudian yang masalah restrukturisasi kredit baru. Pemerintah telah mengeluarkan POJK 11 tentang perbankan, kemudian 14 dengan untuk non perbankan. Untuk perbankan kita melihat di sini sudah ada 2 tadi UMKM dan korporasi, nah yang kalau non perbankan ini yang jadi masalah ini tidak berjalan dengan baik, yang perbankan mungkin untuk relaksasi berjalan dengan baik ya. Nah untuk pembiayaan UMKM pun di sini yang UMKM itu adalah yang mikro tapi yang UMKM di atas mikro sampai ke korporasi itu mereka nggak akan bisa memanfaatkan ini. Kemudian yang korporasi pun kalau kita lihat selanjutnya itu syaratnya untuk mendapatkan apa namanya fasilitas penjaminan kredit itu harus berorientasi ekspor dan padat karya minimal 300 karyawan. Sektor pariwisata hotel dan restoran ini bukan model yang apa namanya karyawannya 300 orang nggak seperti itu, tapi efeknya di sini bahwa dampak dari hotel dan restoran itu *multiplier effect*-nya adalah penerimaan devisa, pengembangan wilayah, penyerapan tenaga kerja, juga dengan sektoral dengan UMKM dan ekosistemnya di daerah, dan membuka lapangan kerja baru. Jadi bukan hanya di satu hotel saja atau restorannya saja, nah jadi syarat ini mestinya di apa namanya di lebih disempurnakan dengan mengakomodir untuk korporasi yang merupakan sektor hotel dan restoran.

Nah kemudian berikutnya adalah kebutuhan saat ini dari perusahaan itu adalah bagaimana mereka mendapatkan modal kerja tadi yang saya sampaikan masalah PLN misalnya, mereka ingin menaikkan daya inilah salah satunya. Kemudian bagaimana mereka kemarin kan THR itu dijatuhkan Pak Pimpinan untuk Desember Pak, sementara *revenue* kita belum dapat disini hotel dan restoran itu hidup sekarang buka bukan dalam keadaan mencari untung atau *break even* tapi memper dana yang lebih kecil subsidinya apakah buka atau dia tutup, pertimbangan adalah di situ karena masalahnya kan di *demand* tadi. Nah kemudian belum lagi *benefit* dan *fixed cost*-nya yang harus mereka bayarkan otomatis di sini pada saat kami diundang diajak untuk melakukan *coaching clinic* begitu ini keluar. Jadi keluhan dari kami dari pengusaha itu adalah bahwa mereka sudah kehabisan modal kerja bahwa mereka sudah kehabisan kolateralnya atau jaminan, nah ini tidak bakal mungkin mereka mengeksekusi untuk apa namanya mendapatkan modal kerja. Kemudian perbankan juga mengatakan bahwa kalau sudah dapat *restart* mereka nggak dapat lagi modal kerja padahal kita tahu di situ untuk untuk bantuan penguatan ekonomi nasionalnya ada penjaminan oleh negara namun itu tidak baik tidak berjalan dengan baik. Jadi kondisi *demand* yang rendah ini menjadikan apa pola penyaluran melalui perbankan itu tidak fleksibel karena perbankan mengikuti pola normal, *demand* ada, terus bagaimana dengan *equity* kita dan seterusnya. Kalau pandemic *nggak* mungkin di hotel restoran itu kondisi *demand*-nya justru yang masalah, nah jadi kita anggap ini tidak efektif

Selanjutnya berikutnya adalah kami mengusulkan karena tidak mengefektif itu berikutnya adalah kami usulkan bagaimana dengan mensubsidi 20% *occupancy* selama 6 bulan, pada saat ini kami berharap dari Juli itu dapat di ini. Ini kami lakukan, kenapa? untuk membantu modal kerja bagi para pelaku hotel dan restoran. Contohnya sekarang hotel ya, hotel itu kita ambil data BPS saja di sini dengan jumlah kamar sekian kemudian kalau dilihat *slide* yang berikutnya *average occupancy* kalau kita mundur 10 tahun itu di rata-rata kalau kita ambil rata-rata bisa dikatakan 50% lah. 2018 kalau dilihat di sana itu terjadi penurunan 2019 juga karena adanya pembatasan pergerakan itu melalui *pricing* yang cukup mahal *Airlines* kita perhatikan pada saat itu tuh cuma melihat kenapa turun trennya sudah bagus naik terus 5 tahun tapi turun di 2019, nah jadi kan 50% ini kemudian *slide* selanjutnya kita mengerjakan 20%. Kalau Bapak Ibu mendengar selama ini kenaikan *occupancy*

average kalau kita ambil data BPS *average occupancy* itu baru di sampai di angka 20%-an, 20%-an dengan subsidi 20% lagi 40% hotel belum bisa hidup paling *nggak* karyawannya sudah terserap dia bisa bayar listrik minimumnya. 20% di subsidi Pemerintah, 20% dari *market* yang ada *demand* yang ada karena masih kecil. Nah di sini kalau kita lihat di slide selanjutnya ya itu mundur mundur yang tabel. Nah 20% yang dibeli oleh Pemerintah itu Hotel menerima karyawan pun menerima uang *service* kan karyawan hotel dan restoran itu wajib uang *service* ada di atur di Permenaker di sana ya ada PP-nya. Kemudian Pemda pun mendapatkan pajak hotel 10% nilai subsidiya cuman Rp8,9 Triliun sekitar Rp9 Triliun lah untuk 6 bulan, ini lebih efektif daripada mengeluarkan ke bank ini menurut kami ya Pak.

Nah selanjutnya kita melihat di situ manfaat 10% ini hotel mendapatkan biaya-biaya operasional ini tanpa syarat dan bunga karena melalui perbankan kita akan bunga berbunga dengan kita belum tahu *demand*-nya kapan *recovery* kan kita belum jelas nih di sini dua ini belum tahu kapan walaupun sudah ada vaksin yang rencananya tapi belum tahu kapan *recovery*-nya ini yang paling berbahaya. Kemudian Hotel mengambil subsidi jika terjadi kenaikan *occupancy*. Hotel *nggak* akan ngambil lagi lain subsidi ini karena kalau kita lihat di tabel tadi bintang bintang lima saja tuh cuma Rp600.000 per kamar sebenarnya harga dulu kan bisa Rp2 juta bisa Rp3 juta. Mereka hendak mengambil dari (***suara tidak jelas***) saja kalau mereka masih lebih kecil mereka akan ambil itu, tapi kalau sudah ada *demand*-nya mereka akan *stop nggak* sendiri, tidak akan peduli itu sampai lama sampai 6 bulan gitu. Nah kemudian hotel dapat mempekerjakan kembali karyawannya kalau saat ini kan penyerapan karyawan ini yang jadi masalah. Kita tidak mungkin menyerap apalagi kalau misalnya Pemerintah tidak melakukan kegiatan di hotel otomatis karyawan-karyawan yang untuk (***suara tidak jelas***) ini belum bisa dipekerjakan karena listriknya sudah kita turunkan dayanya *ballroom*-nya *nggak* kita manfaatkan jadi yang cuma aktif kamar saja itupun juga mungkin 50%-nya. Nah kemudian yang dibeli 20% ini mau diapakan oleh Pemerintah itu bisa dikasih sebagai *giveaway*, *giveaway* ini maksudnya supaya menjadi Trigger nanti mungkin dikasih untuk sarana edukasi, promosi, dan seterusnya, jadi menggerakkan atau *fun trip* mereka bisa menggerakkan pasar ini dikasih gratis mereka bergerak ke semua destinasi otomatis yang lain akan mengikuti karena *pricing* saja tidak akan cukup untuk mengembalikan pasar *demand*. Kemudian apa namanya nilai subsidi itu lebih kecil daripada tadi yang saya sampaikan daripada bantuan melalui bank.

Kemudian BLT tenaga kerja tadi sudah sampaikan juga oleh Pak Haryadi bahwa Rp600.000 selama 4 bulan. Masalahnya untuk hotel dan restoran ini kita mungkin sudah tunggakan kita dari bulan April mungkin sudah *nggak* bayar ini, karena apa? kita kehilangan *cashflow* pada saat itu. Kita terbebani harus bayar listrik yang *nggak* boleh kalau mati nanti risiko untuk menaikkan dayanya cukup mahal bisa ratusan juta, nah syaratnya tidak cocok dengan kita gitu loh, ini yang jadi masalah. Kita berharap BLT ini diberikan semuanya yang terdaftar di BPJS gitu loh, jadi *nggak* usah disyaratkan dia masih bisa *on* iurannya itu sampai bulan Juni gitu kan, kalau *nggak* yang masih *on* sampai bulan Maret gitu mungkin masih oke gitu loh, tapi kalau dari bulan Juni ya kita *nggak* kan kita *nggak* masuk kita jadi penonton di situ.

Nah kemudian selanjutnya kita kalau dilihat *slide* berikut Bapak, Ibu sekalian bahwa kalau kita lihat nih data yang diambil dari apa namanya dari BPSDM Kementerian KUKM bahwa kalau kita perhatikan perdagangan hotel dan restoran itu kontribusinya cukup besar loh, tapi masalahnya apa namanya relaksasi yang kami terima itu belum menyentuh kepada masalah hotel dan restoran ini. Jadi begini bahwa Hotel itu jangan dilihat bahwa dia merupakan investasi besar saja, tapi yang

lain UMKM yang menengahnya ini juga cukup besar. Ini yang mereka sekarang yang gak bisa bergerak gitu loh baik begitu bantuan dari UMKM-nya cuma hanya ke mikro gitu loh dan koperasinya pun mereka karena sudah dapat *restruct* ya sekarang kita mengambil lagi agak mengerikan juga karena bank itu regulasinya cukup cukup ini ya.

Kemudian selanjutnya masalah gas, gas ini juga *problem*-nya sama dengan listrik jadi ada minimumnya biaya minimumnya juga, kemudian kategori pelanggannya juga cukup besar. Kemudian yang kita harapkan di sini juga proses perubahan penurunan kategori pelanggannya juga dipermudah karena sekarang kan kita yang *service* yang kita dapatkan ini baru ada cukup ini ya berlebihan gitu loh, jadi untuk efisiensi kita akan melakukan itu cuma untuk menurunkan kategori ini menjadi kendala utama di kami sekarang ini. Kemudian PBB, kami berharap Pemerintah pusat kalau kemarin ada relaksasi yang diberikan relaksasi untuk pariwisata yang pertama yang di *suspend* itu sebaiknya bagaimana kalau relaksasi itu lebih mengenai mereka mensubsidi Pemerintah mensubsidi 50% dari PBB ini tunggakan PBB cukup besar ini sangat berguna untuk *cashflow* dari pada perusahaan itu sendiri. Datanya kan bisa ambil di daerah nanti untuk verifikasi kami tidak sebutkan detail di dalam presentasi kami, jadi subsidi PDB ini ya masih kami harapkan sebagai bagian dari *cashflow*. Kemudian membebaskan iuran BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja selama 6 bulan, nah di sini tadi Pak Haryadi sendiri sudah menyampaikan yang kita dapat itu hanya menunda harinya saja yang tadi tanggal 15 menjadi tanggal 30. Mungkin ini memanfaatkan agak kurang ya bagi kami karena kesalahan keadaan kondisi saat ini adalah perusahaan tidak mendapatkan pasar, *revenue*-nya nggak ada, kewajiban *benefit* untuk karyawan dan *utilities* yang menjadi masalah untuk dibayarkan. Nah kemudian Pasal PPH 25, PPH 25 ini yang jadi masalahnya itu kan di diskon ya Pak ya perusahaan itu sebenarnya sudah rugi, jadi kita tetap mencicil setiap bulannya bagi kami jadi kenapa mesti harus dicicil jadi kita lihat nanti setiap tahunnya apakah dia untung atau rugi gitu. Kalau sekarang ini menjadi kendala dan saya yakinkan bahwa sampai tahun 2021 untuk sektor hotel dan restoran ini masih mencatat masih mencatat kerugian jadi diskon ini bukan penerapan yang pas sebenarnya bagi kami.

Nah kemudian di sini kami juga memohonkan ada subsidi 30% sewa usaha restoran selama 6 bulan. Jadi Bapak, Ibu sekalian kenapa ini restoran kita ada khusus sedikit, jadi khusus restoran-restoran yang ada di Mall Pak pusat perkantoran, pusat perbelanjaan mereka nggak bayar PBB, mereka nggak dapat PBB tapi mereka ekosistemnya yang kena sekarang. Jadi mall-nya butuh bayar listrik dan seterusnya sehingga restoran atau retail yang di dalamnya wajib membayar *service charge*-nya sehingga sekarang kondisinya kalau kita perhatikan di beberapa mall itu kan sepi mereka masih banyak yang tutup sebenarnya itu di dalamnya hidup lagi itu Pak dan ini harus bayar ini ini harus bayar ke Pemerintah. Nah ini yang kita maksud jadi restoran-restoran itu kami mengharap yang untuk yang ada di pusat perbelanjaan atau perkantoran ini diberikan subsidi dari rentalnya lah dengan modalnya yang kita usulkan seperti 30% yang kita sampaikan disini.

Kemudian berikutnya adalah tantangan baru untuk bisnis hotel dan restoran ini adalah pola *travelling* kalau zaman dulu zaman normal kita bisa *travelling* dalam kondisi kurang sehat, namun sekarang kayaknya tidak mungkin lagi sehingga *demand* itu akan terkoneksi nanti. Kemudian juga masih banyak masyarakat yang mungkin enggan menggunakan masker gitu loh karena risih dan seterusnya nah ini masih PR berat bagi kita semua sehingga *campaign* ini menjadi yang masuk ini menjadi hal utama sebenarnya bukan PSBB lagi tapi *campaign* yang harus

diterapkan. Sebagai contoh dulu di *airport* itu kita mau masuk *airport* itu semua orang kesal suruh buka tali pinggang, jam tangan, segala macam sekarang kita sudah terbiasa, nah ini juga hal baru menurut kami yang harus dilakukan secara masif. Kemudian untuk bisnis hotel ini yang paling penting tantangan yang paling berat itu adalah bahwa kecepatan *recovery* bisnis hotel itu tergantung pada *demand* dan efisiensi operasional *cost*, namun daya tahan perusahaan tetap merupakan penentu utama. Nah ini masalah kan kita sudah gagal di Juni-Juli tumbuhnya kecil sekali kalau lihat data BPS itu dibawah 5% dan *nggak* stabil tetap kuartal 3 ini kita masih masih ragu-ragu lah karena saya lihat Pemerintah juga belum melakukan kegiatannya di hotel belum masif bahkan sekarang melakukan **(suara tidak jelas)** lagi jadi ini akan menjadi panjang nantinya. Kemudian juga harus diingat Bapak Ibu sekalian bahwa kalau bicara Hotel tidak mau bicara *occupancy* dari kemarin pemberitaan media tuh *occupancy* naik itu sudah *happy* padahal *average room rate*-nya rendah sekali terjun bebas, jadi hotel bintang 5 makan harganya hotel bintang di bawahnya jadi yang sengsara itu bintang 2 kebawah hotel *budget*. Hotel bintang 5-nya ada tapi mereka ya dia kan hitungannya bukan itungan untung daripada subsidiya lebih besar mereka lebih bagus mereka memperkecil subsidi dengan menekan *average room rate*, *nggak* ada yang salah sih tapi inilah kondisinya yang ada sekarang ini. Jadi *occupancy* tidak bisa dijadikan tolok ukur yang paling utama.

Kemudian tantangan paling berat lagi adalah hotel-hotel yang sangat bergantung dengan MICE, ini paling berat. Kalau kita perhatikan di DKI itu sudah sekarat semua tuh, apalagi di Bali, Bali ini hotel masih gede kalau Bapak pergi ke Nusa Dua tuh berapa yang tutup di situ Pak gelap Pak hanya beberapa yang buka di sana, ini yang paling berat. Kemudian restoran, restoran pun juga begitu restoran ini Pak tumbuh hanya bergantung kepada orang yang *commute* mungkin dari Bogor, Bekasi, dan seterusnya hidup mereka jalan naik kereta atau kendaraan umum dan seterusnya atau naik kendaraan pribadi berapa pagi-pagi beli *breakfast* dan kopi sekarang *nggak* ada lagi Pak turun. Tantangan restoran paling besar akhirnya mereka pindah ke *online* yang dulu *cost online* ini tidak terlalu besar sekarang ini yang jadi, jadi lama-lama nanti otomatis yang naik itu adalah *takeout* dan *drive thru*. Nah ini nasibnya nanti efeknya pasti ke karyawan nanti kalau pada perubahan ini. Jadi sangat bergantung dengan kegiatan apa namanya pergerakan orang.

Nah usulan kepada Pemerintah yang saya ingin sampaikan ini terakhir adalah, pertama adalah memberi modal kerja dalam bentuk subsidi *occupancy* ini kita sangat harapkan untuk daya tahan perusahaan karena Bapak, Ibu sekalian kami di sektor hotel ini nanti Bulan Januari sampai Maret kami kondisinya domestik ini adalah sangat bergantung dengan kegiatan *government* itu akan menjadi *low season yang terpanjang* juga, jadi jangan **(suara tidak jelas)** *nggak* hanya sampai bulan Desember ini. Kemudian juga mencari jalan keluar agar biaya *PCR* atau *Rapid Test* tidak membebani *traveller*. Ini juga akan jadi *problem* bagi kami untuk mempertimbangkan kembali *travel bubble* untuk Bali dan daerah-daerah yang memang Wismannya cukup tinggi nanti akan saya jelaskan sedikit di *slide* saya yang terakhir. Pemerintah pusat juga diharap daerah diharapkan melakukan kegiatan kembali di Hotel. Jadi *weekdays occupancy* ini menjadi tantangan Pemerintah untuk diisi, *weekend*-nya sudah lumayan baik walaupun belum tinggi. Kita lihat kemarin 2 *weekend* ya semoga nanti Desember-nya juga akan terjadi gitu loh, tapi yang *weekdays* itu perannya Pemerintah dari kegiatannya. Kemudian program yang dibuat oleh Pemerintah jangan hanya terfokus pada super prioritas saja Pak karena destinasi super prioritas ini kan *creating destination* untuk meng-grab Wisman sementara saat ini **(suara terputus-putus)** gitu loh 34 destinasi. Kemudian

mempercepat mulainya aktivitas kegiatan pemerintah tahun 2021 Pak. Jadi negara 2021 ini kegiatan Pemerintah dipercepat biasanya kan membuat tetap anggaran bulan Maret baru boleh jalan gitu loh, jadi itu yang *low season* biasanya, kalau ini bisa dipercepat kegiatannya akan sangat membantu. Kemudian program stimulus kalau bisa diperpanjang sampai 2021.

Terakhir ini saya jelaskan sedikit mengenai Bali Pak. Kenapa saya katakan *travel bubble*? kalau mau lihat data tersebut dari 2014-2018 saja *occupancy* hotel di Bali itu kalau kita perhatikan untuk Wisman itu sangat dibutuhkan, jadi kalau misalnya kita mau ngejar tadi saya katakan *occupancy* 50% saja itu berarti 20%-nya 25%-nya adalah Wisman, 25%-nya domestik. Jadi sekarang ini *nggak* mungkin Bali itu digeser semua domestik ke sana dia akan jadi 40% itu *nggak* mungkin suplai keamanannya cukup besar dan bintang 5-nya banyak. Jadi tolong dipahami di sini kenapa kita menganjurkan *travel bubble*. *Travel bubble* itu kan bisa dilakukan komitmen antara *G to G* ya Pak, jadi bagaimana penerapan protokol di sini jadi bukan dibuka semuanya gitu untuk membantu *occupancy*, kalau *nggak* bisnisnya akan hancur apalagi Bali itu sangat bergantung dengan pariwisata, ekosistemnya Pak. Ini yang harus dipertimbangkan karena *nggak* akan mungkin domestik kuat untuk membantu Bali gitu Pak. Jadi berdasarkan ini rata-rata paling tinggi saja tuh domestik itu cuma 20% itu paling tinggi, sekarang 7%, 2% dan banyak yang tutup, 7, 2% itu masih butuh banyak sangat banyak. Hotel itu berapa persennya subsidi, hotel itu tanpa subsidi tadi saya sampaikan mungkin *occupancy*-nya di *range* 40-45% itu mereka sudah oke lah kita *nggak* usah mikir untungnya dulu deh gitu Pak jadi sangat dibutuhkan.

Mungkin itu Pak yang ingin kami sampaikan di pada kesempatan ini dari PHRI Pak Haryadi silakan Pak saya kembalikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA UMUM PHRI (HARYADI SUKAMDANI):

Terimakasih Bapak Pimpinan.

Demikian pemaparan dari kami dari PHRI, terima kasih.

Billahi Taufiq Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Om Shanti Shanti Shanti Om.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selanjutnya kami persilakan Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan, baik Pak ya? Ketua Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia, *monggo* Pak.

KETUA ASOSIASI PENGALENGAN IKAN INDONESIA (APIKI):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah wasyukurillah kita bisa ketemu untuk bersama-sama dengan Komisi VI membahas terkait dengan dunia industri secara umum dan saya akan menyampaikan dari sisi industri pengalengan ikan terkait dengan apakah dampaknya positif atau negatif dalam suasana pandemic Covid-19 ini.

Ibu, Bapak sekalian,

Sebelum saya menerangkan yang seperti dimintakan oleh Sekretariat pas pra Covid, dalam keadaan Covid-19 dan seterusnya setelah *pasca* Covid, saya ingin jelaskan dulu situasi kami saat ini. Adalah suatu karunia besar kepada bangsa ini semua tahu kita dari Aceh saya pernah jalan sampai ke Merauke ya sama dengan kita dari sini ke Jeddah lewat dikit bahkan bisa sampai Turki jarak bangsa ini, kemudian dari Indonesia Jakarta ke Narita. Kalau kita terbang atau melewati laut itu banyak yang kita bisa temui kita lihat Pak rasanya bangsa ini kok besar hebatnya luar biasa gitu saya merinding kalau cerita itu sudah 30 tahun kami di dunia perikanan ini, tetapi kalau cerita tentang nasib nelayan ya begitu lagi Pak Bima Aria tahulah eh kok Aria Bima bisa dengan Walikota Bogor Walikota kami gitu ya. Jadi tetapi ya bicara dengan industri Thailand jauh di atas kita padahal lautnya Teluk Bangkok itu seberapa besar namun armadanya ada di seluruh permukaan kulit bumi ini, Vietnam anak kemarin anak bawang lah kita bilang dibandingkan kita merdeka mereka lebih belakangan tetapi dengan inovasi yang tinggi dengan *tuff*-nya Pemerintah menggerakkan industri dia bisa menjadi *icon-icon* produk dunia yang kita tahu di sini Dori padahal di Iwak kita ini Iwak Patin Pak, Dori yang kita bangga-banggakan dalam negeri itu Patin, Baung ya relatif sama gitu. Bagaimana kita di dunia tuh nggak utuh dia Tuna banyak yang lebih hebat Bluefin itu Australia bagus, tapi kita belum ada *Brand of Indonesia* itu yang mendunia benar-benar kita kuasai pasarnya.

Nah didalam perjalanan kami bermitra strategis dengan Kementerian Kelautan yang kita dulu ikut memperjuangkan berdirinya Kementerian ini alhamdulillah di era Pak Edhy Prabowo selaku Menteri ke-7 di kabinet kedua Pak Jokowi ini luar biasa bisa di set di sana ya di sini bersatu membangun kelautan perikanan teknis yang maju, ada yang menarik di kotak-kotak kaleng itu menerima masukan dari seluruh *stakeholder* jadi ini dijalankan Pak ini dijalankan kami berulang diskusi dengan pihak Kementerian Kelautan. Kemudian menguatkan komunikasi, kolaborasi, dan kerjasama dengan *stakeholder* ini berjalan sudah, sudah berjalan. Kemudian melibatkan ahli sehingga memiliki basis akademis dan ilmiah yang kuat, saya kebetulan Ketua Umum MPHPI juga Pak itu isinya ada sekitar 600 anggota, ada puluhan Profesor, ratusan Doktor pengolahan hasil perikanan jadi kami diajak bermitra untuk bikin *roadmap* industri Perikanan Indonesia jadi kita diajak ahli terlibat secara signifikan begitu. Nah yang menarik adalah mencari terobosan baru untuk menemukan solusi seiring dengan lingkungan strategis dan terus berkembang dan yang berkembang kita hadapi sekarang ini adalah pandemi Covid-19, jadi beradaptasi juga kita begitu. Nah faktor menunjukkan bahwa semester 1-2020 dibandingkan semester 1-2019 ekspor perikanan naik termasuk kami di pengalengan ikan meningkat, tuna kaleng, sarden kaleng, kepiting kaleng juga meningkat

dibanding semester pertama di tahun-tahun 3, 4 tahun sebelumnya itu fakta. Termasuk pasar dalam negeri dari mas Haryadi menyinggung kita berbeda katanya, ya mari kita lihat nanti penjelasan saya bagaimana.

Nah saya menyampaikan satu grafis nilai strategis industri pengalengan ikan Indonesia termasuk industri pengolahan ikan secara umum yang nanti mas Aris akan sampaikan. Yang pasti kami taruhkan diatas *mainstream* industri perikanan di dunia itulah *added value product* dan pengalengan ikan itu menembus batas waktu, tempat, suasana, situasi mau badai, mau banjir, mau gempa bumi, mau normal, mau apa ikan ini di jarik terus dan sudah dimulai sejak perang dunia pertama di Eropa.

Kemudian kami menjadi penjamin pasar nelayan dan pembudidaya ikan. Bapak Ibu sekalian di situasi sekarang pandemic ini kalau lah merinding juga ngomongnya Ibu Nevi ini ya Ibu banyak tahu dengan kami dulu, kalau lah industri nggak jalan Pak di Muncar di Bali yang panennya itu melimpah ikan Sarden siapa yang mau nyerap? Jadi kami menjadi penjamin. *Alhamdulillah* dalam situasi sekarang ini kita tidak ada PHK, produksi meningkat berkali-kali gitu ya nanti ceritanya ada, termasuk juga dengan pembudidaya yang proses pengolahannya lebih banyak di dibawah AP5I gitu ya, tapi industri pengolahan ikan lele menjadi penjamin.

Kemudian kami menjadi penyedia dan penyerapan tenaga kerja. Kalau Ibu Bapak datang ke Muncar mungkin Bapak Ketua sidang pernah ke Muncar datanglah dulu atau ke Banyuwangi melihatlah ke apa namanya toko-toko atau Mall kalau kita Jakarta ya supermarket, kalau sepi pasti pabrik sepi *nggak* produksi atau kurang produksinya itu jadi ukuran gitu ya. Nah kami menyediakan karena industri dibangun dan menyerap tenaga kerja.

Kemudian prestasi dan prestise bangsa, wong kita negara kelautan negara Bahari masa kita nggak punya industri pengalengan ikan atau industri pengolahan yang kuat yang bisa bersaing secara dunia. Kemudian menghasilkan devisa iya, jelas posisi sekarang pun kita masih bisa menyumbang devisa dan naik dibanding kondisi normal gitu ya.

Kemudian menjadi sumber protein untuk masyarakat Indonesia Bapak Presiden, terima kasih Pak Jokowi Bapak kami ikut omongannya beliau menjadi kampanye kami, makan ikan meningkatkan imun kata Presiden. Maka Bansos pun disediakan ikan yang paling tersedia adalah ikan kaleng *stunting* yang sekarang hanya makanan yang bisa dibawa ke ujung-ujung ke gunung yaitu ikan kaleng disitu kalsium tersedia, omega 3 tersedia, ikan sarden itu adalah ikan tropis tertinggi omega 3-nya Pak ya. Jadi nggak usah bangga kita makan Salmon ya makan ikan-ikan impor mahal ya makan Sarden saja untuk anak-anak sudah pasti dijamin cerdas.

Kemudian program untuk Ibu-ibu hamil dan anak balita di Posyandu kita juga terlibat walaupun terbatas karena *deal*-nya itu terkait dengan *company* tapi belum secara nasional ini menjadi program kita terlibat untuk menjaga *stunting* yang paling efektif dan praktis adalah menyediakan ikan dan kami mengusulkan sebenarnya untuk ini dengan menu atau resep khusus jadi nggak umum saus tomat semacam gitu karena untuk anak-anak itu susah Ibu Nevi ya mungkin kita buat yang dengan minyak bunga matahari atau dengan minyak kelapa sawit misalnya seperti itu tapi belum *deal* kita dengan pihak Kementerian Kesehatan.

Kemudian punya uang pajak dan PAD sudah jelas. Banyuwangi, Bitung ya, Jembrana Bali itu kalau tidak bergerak ekonomi pengalengan ikan industri perikanannya lumpuh, pendapatan juga berkurang. Kemudian penggerak ekonomi dan *multiplier effect* yang luar biasa luar biasa Pak kita bergerak dari hulu ke hilir dan

industri kami adalah *blue* ekonomi atau *Zero waste*, di hulu kita menjamin tangkapan nelayan untuk jenis ikan tertentu karena tidak semua ikan di kaleng kan gitu ya.

Kemudian diproses perdagangannya kita terlibat luar biasa industri yang menyerap Tenaga Kerja, apa namanya *supporting industry* seperti kaleng, karton, *printing*, dan lain-lain transportasi sampai di warung-warung kecil kita bisa menggerakkan ekonomi. Jadi kami pernah membuat rincian efek ekonominya itu ternyata benarlah apa yang diambil sikap oleh Thailand, diambil sikap oleh beberapa negara Afrika mereka menjadikan industri pengalengan ini pilihan kebijakan industri sumber daya ikannya. Thailand yang sedikit dia bisa jadi raja dunia, tapi di kita belum dijadikan *mainstream* industri nasional. Kalau sudah *mainstream* namanya semua di suntik atau didukung oleh pemerintah contohnya kita sekarang mengalami masalah kaleng ya Latinusa. Dulu zaman Pak Tungki menjadi apa namanya pemasok yang karena BUMN tapi sekarang kan bukan BUMN lagi sudah ada hasilnya gitu ya jadi tidak bisa di *drive* oleh Pemerintah langsung. Jadi inilah strategisnya sehingga kalau industri pengalengan ikan ini khususnya dari industri pengolahan ikan secara umum tidak dijadikan kebijakan utama oleh negeri ini oleh Kementerian Kelautan, oleh Kementerian Perindustrian, ada yang salah dari kebijakan negara ini ya sedemikian luas *multiplier effect* ekonominya kalau kita tidak ambil berarti kita yang keliru dalam kebijakan.

Kemudian berapa besar peluang industrinya itu? Bapak-bapak sekalian, saya sengaja taruh di atas ada kuning sumber daya ikan artinya penangkapan dan budidaya ikan, kemudian dibawah menjadi *basic* atau penguat seluruhnya adalah kebijakan Pemerintah. Sebelah kanannya itu kita lihat kesadaran konsumen Bapak, Ibu sekalian kalau di bisnis tingkat tinggi termasuk Anggota DPR barangkali kalau rapat entah disuatu tempat selalu disajikan barangkali ikan jadi menu utamanya, *deal* bisnis tingkat tinggi itu mau di Hotel Mulia gitu lah kira-kira atau di apa *seafood* restoran di Senayan itu yang mahal sekali, itu orang-orang bisnis besar dan kesadaran konsumen untuk makan ikan sehat kuat dan cerdas itu makin tinggi. Saya kebetulan mantan ketua (***suara tidak jelas***) Ikan Indonesia Ibu Nevi tahu dari tahun 2006 dulu dan itu berhasil meningkatkan tingkat konsumen dengan *campaign* atau gemar ikan wujud aktivitasnya.

Kemudian status industri kita siap Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kami punya industri pengalengan yang aktif 36, ada berapa non aktif karena persaingan ya karena masalah bahan baku, ada 36 itu berada *under 50%* Pak sebelum pandemik ceritanya. Jadi nggak usah ribut begini cari investor baru untuk pengalengan ikan yang 50 ini dinaikkan jadi 80 aja *instantly* dia bisa menyerap tenaga kerja banyak, bisa meningkatkan ekspor banyak ya, kemudian juga bisa menyuplai secara nasional tanpa kita berpayah-payah kampanye ke luar negeri cari dapat 1, 2 perusahaan, prosesnya setahun, 2 tahun. Kalau zaman dulu saya malah dikasih izin penangkapan harus bangun pabrik, izin tangkapnya duluan pabriknya nggak jadi-jadi *tipeng-tipeng* aja gitu kan. Jadi pemerintah memberikan tekanan itu salah satu usulan sebenarnya sudah masuk Pak kepada siapa yang menjadi kewenangan terhadap dunia kami ini untuk didukung, dikuatkan menjadi industri yang bersaing secara kuat di seluruh dunia dan optimal produktivitasnya. Jadi status kami siap, pasar dunia *unlimited*, pasar domestik demikian berkembang, teknologi SDM tidak ada masalah, kami semua sinergi atau harmonis dengan standar dunia, ikan kaleng itu sudah wajib SNI Pak satu-satunya produk perikanan yang wajib SNI di negeri ini, kemudian kesadaran prosedur produsen kami iya. Misalnya kami ikut standar di Badan POM misalnya ada namanya program PMR ya PMR itu diberikan kewenangan kepada dunia industri mengelola *me-manage* mutunya tapi sudah di

backup oleh KKP, dengan HACCP, dengan SKP, dengan ISO, tapi kita melapor rutin. Kalau ada sesuatu yang tidak benar atau yang dilakukan baru ditinjau, jadi sudah muncul kepercayaan dari pemerintah terhadap industri oleh karena kesadaran.

Jadi peluang industri pengolahan ikan ini sedemikian besar dan ada di negeri ini ada di negeri ini kok ya nggak kita optimalkan itu kan pertanyaan besar, kami sendiri sebagai pelaku ya masih tertatih-tatih saja gitu kan dulu di Hotel Sahid dengan Mbaknya beliau ini tidak kampanye makan ikan masih tahun 80-an akhir sudah mulai gitu setnya dari Hotel Sahid waktu itu memberikan menu yang praktis. Jadi istilah kami sampai sekarang masak kilat 5 menit jadi satu jadi menu yang bisa dimakan sama itulah ikan. Dan kemudian ikan ini kalau lah seluruh negeri ini mohon maaf orang Minang masak rendang berarti 4 jam Pak masak rendangnya berapa gas yang dipakai, tapi kalau semua orang masak ikan lebar aja misalnya seluruh tidak usah masak daging masak ikan aja kita bisa menghemat energi luar biasa. Mohon maaf Bu Nevi tapi itulah kampanye kami sebagai dunia perikanan gitu kan. Oke, tantangannya bagaimana, sumber daya melimpah (***suara tidak jelas***). ya Pak?

KETUA RAPAT:

Usulan-usulan konkretnya?

KETUA ASOSIASI PENGALENGAN IKAN INDONESIA (APIKI):

Oke ini sudah sebagian saya sampaikan tadi ya. Ini sebaran industri kami fakta dan realita masuk Bu ke fakta realita Covid. Ini, sebelum Covid-19 menjadi musibah buat kita semua produksi rata-rata kita di bawah 50% Bitung itu pernah sampai hampir 0% 5 tahun kemarin karena kebijakan pemerintah begitu juga kita di Banyuwangi dan di Bali ya. Kemudian selama tenaga kerja *full capacity* kami rata-rata pabrik itu minimal 50 orang kalau kondisi kita normal Pak 500 orang 1 pabrik bisa menyerap tenaga yang langsung bekerja di pabrik, belum yang terkait lainnya. Nah yang yang ada di pabrik adalah saya sebut *zero waste* tadi tidak ada satu tetes pun kalau bahasa ideal kita itu air yang terbuang air cucian, air bekas rebusan itu dikumpul oleh masyarakat setempat jadilah kebanggaan orang Surabaya apa namanya petis padahal itu air cucian ikan. Nah sekarang kami sudah melakukan kolaborasi dengan UKM-UKM mikro tadi masing-masing misalnya Pak Bima bikin nama Ady Surya ada nama nitip di pabrik jerigen Pak, jadi airnya kami kontrol jadi satu ditampung jadi lebih higienis lagi petis yang sekarang kemudian dia bawa. Kalau dulu di pinggir-pinggir pabrik itu dia bikin api dia aduk di situ kayak bikin dodol tuh jadilah petis di apa bungkus-bungkus plastik kayak Aqua gelas gitu ya semacam itu, nah sekarang jadi tidak ada yang terbuang tidak ada yang terbuang. Kemudian bahan baku bahan baku lokal kurang iya, kita dalam satu tahun itu musim di Muncar itu maksimum 4 bulan jadi harus disuplai dari mana-mana.

KETUA RAPAT:

Impor berapa persen?

KETUA ASOSIASI PENGALENGAN IKAN INDONESIA (APIKI):

Kalau impor kita belum karena ada komitmen kami dengan KKP tidak pernah atau tidak boleh lebih dari 20% nilai ekspor.

KETUA RAPAT:

Itu (***suara tidak jelas***) ditutup mana Pak?

KETUA ASOSIASI PENGALENGAN IKAN INDONESIA (APIKI):

Ya?

KETUA RAPAT:

Bahan baku lokal kurang didukung impor?

KETUA ASOSIASI PENGALENGAN IKAN INDONESIA (APIKI):

Iya. Jadi kalau kurang substitusi saja.

KETUA RAPAT:

Tidak permanen ya?

KETUA ASOSIASI PENGALENGAN IKAN INDONESIA (APIKI):

Iya tidak permanen. Jadi *planning* izin yang dikeluarkan itu sudah diketahui pasti digunakan pada saat lokal kosong, jadi kalau digunakan pada saat lokal penuh bisa diinvestigasi juga gitu loh kira-kira begitu karena di kami praktis, gampang, impor berapa apakah bocor atau tidak itu Pemerintah atau aparat bisa ngitung karena 1 ton bisa jadi sekian karton ikan dan dia pasti pakai kaleng sekian kaleng.

KETUA RAPAT:

Itu karena faktor musim ya?

KETUA ASOSIASI PENGALENGAN IKAN INDONESIA (APIKI):

Iya faktor musim dan faktor logistik. Di Papua itu banyak Pak, tapi dari sana sampai Surabaya itu hampir 4000 1 kilo, kalau dari China ke mari (***suara tidak jelas***).

KETUA RAPAT:

Kenapa nggak dibikin di Papua sana pabriknya?

KETUA ASOSIASI PENGALENGAN IKAN INDONESIA (APIKI):

Nah ketemunya sama di sana 4 bulan juga, jadi bawa dari luar sama juga. Jadi teori bikin pabrik di tempat *resource* itu belum tentu penuh, benar, kecuali dia

punya *planning* yang cukup baik atau musim *supply*-nya panjang. Tapi kalau musim suplainya di Indonesia tidak ada yang lebih dari 4 bulan malah di Papua itu lebih sempit, jadi kadang-kadang lagi keluar apa namanya Sarden tiba-tiba sudah keluar lemak atau kembang gitu atau sebaliknya. Nah kemudian ada pertanyaan lagi Pak?

KETUA RAPAT:

Cukup, cukup Pak.

KETUA ASOSIASI PENGALENGAN IKAN INDONESIA (APIKI):

Pemasaran tuna sebelum Covid 20% lokal, tuna kaleng ya 80% ekspor, untuk Sarden 70% lokal 30% ekspor. Nah kemarin kami sebelum Maret eh iya sudah Maret ya sudah Covid kami itu sudah punya stok untuk Ramadan itu 200% jadi angkanya kalau mau tahu ketika Covid sudah mulai berjalan sampai April kita dengan KKP menghitung stok itu ada sekitar 25 sampai 30 juta kaleng, begitu program Bansos jalan itu habis sampai pertengahan Mei sudah selesai jadi kita punya kalangkabut, nah itu itu kondisi kemampuan produksi kami. Kemudian tidak ada kenaikan harga mutu sudah wajib SNI, ini pra Covid.

Sekarang masa Covid produktivitas *full capacity* untuk Sarden khususnya jadi ada yang minta 30 eh 3 juta kaleng, 5 juta kaleng kita juga bingung gitu ya untuk Bansos. Serapan tenaga kerja ini menjadi hambatan karena kami menerapkan *social distancing* Pak Ketua sehingga orang yang terlibat eksis dalam pabrik itu 60%, jadi kami gilir Pak kami gilir itu dia sehingga tidak terjadi apa namanya PHK jadi yang terjadi *Processing* ada yang bersihkan apa halaman atau apa saja pokoknya mereka tetap kerja gitu. Harga bahan baku lokal meningkat. Musim kemarin ini baru saja baru saya lewat terang bulan sekarang sudah masih terang bulan sudah mau selesai itu harga ikan bahan baku lokal biasa Rp5000 sampai Rp7000 sampai menyentuh Rp11000 kami kalang kabut juga kok segini, baik buat nelayan tapi nggak baik buat industri gitu ya tapi idealnya itu di antara 5 sampai Rp7.000 gitu. Kemudian ada pemasukan pengangkutan ikan dari daerah Timur ada yang terhambat *lockdown* daerah. Kemudian mau impor saat tengah-tengah kemarin ini negara-negara tertentu seperti China nggak bisa kirim, Pakistan, Yaman mereka tutup juga tapi sekarang sudah buka ya. Kemudian pemasaran lokal terangkat oleh Bansos tapi permintaan lebih tinggi dari pasokan produksi sehingga kalau lihat data import pun meningkat ikan kaleng. Kemudian harga kaleng naik, *supply* yang terbatas karena ada proses *distancing* dari implementasi produksi. Dalam masa Covid ini tidak ada patokan harga Bansos dari Kemensos Pak, jadi kita itu ditawar oleh pedagang yang mau beli itu murah murah murah saja, dikasih harga normal nggak mau murah pokoknya dari sana sekian katanya semurah itu kami nggak yakin ya. Kemudian dari KKP coba mengundang dari Kemensos tanya ternyata harganya jauh, jadi ada *margin* yang luar biasa di perdagangan itu. Padahal kami menginginkan misalnya dari Kemensos nanti kami butuh sekian, jangka waktu sekian, *volume*, dan harga yang kami minta karena ada harga ada barang kan, walaupun kami ada plafon yang enggak bisa kami langgar yaitu SNI wajib gitu ya ada *volume* yang harus disepakati diikuti gitu. Ini yang menjadi salah satu hambatan juga, soal mutu kami standar.

Kemudian fokus masalah untuk Bansos dan konsumen dalam negeri. Jadi kami itu fokus untuk mensuplai menjadi komitmen kami kebutuhan selama Pemerintah membutuhkan untuk Bansos kami akan fokus ke sana, ekspor tetap karena itu harus memenuhi kontrak-kontrak yang sudah kita lakukan begitu ya. Nah

kemudian diharapkan juga warung Bansos menjual ikan kaleng karena dapat menjangkau daerah-daerah semua mana-mana karena dari KKP nawarin kan ikan beku, ikan beku kan *nggak* bisa karena harus punya *freezer* Pak kalau kita ada warung Bansos di Lampung di gunung di mana masih bisa dikejar, iya Pak.

Kemudian *pasca* Covid kami ralat bisa di atas 60%, serapan tenaga kerja bisa normal, pasokan bahan baku ya ada ekspor kembali normal itu maksudnya *fare trading*. Jadi ada masalah tarif-tarif luar negeri yang menjadi persoalan. Kemudian kami berharap impor bahan baku tidak dikenakan biaya masuk ada ini ada isu hambatan ekspor, tarif baru yang kita belum berhasil sudah puluhan tahun Pak terhadap Eropa 20% lebih *tax* kita di mana negara tetangga kita Philippine dengan berbagai cara dan persyaratan dipenuhi dan Thailand itu sudah *zero*, ini berat sekali kita hadapi. Kemudian selama Covid ini kalau kita mau memproduksi untuk export ataupun dalam negeri yaitu cerdas bahasa kami tidak semua komoditi bisa baik produksinya di masa pandemi ini, kami tetap menerapkan.

Ya terus usulan kami ke Komisi VI DPR. Pertama, menurunkan biaya logistik dalam negeri, oh mohon maaf *update*-nya saya *nggak* kirim ulang Sorry, nanti saya kasih yang *update* ya. Yang pertama menurunkan biaya logistik ini berat sekali berat sekali ada sistem logistik internasional tapi belum optimalkan masalah kapal angkut, nah ini yang perlu. Kemudian kami minta karena ini ada jaminan Undang-undang pasokan bahan baku kami *happy*, kami tidak *happy* untuk apa namanya impor bahan baku karena itu merugikan juga dari daya saing kita gitu ya kami, yang kedua itu.

Kemudian memperjuangkan sesuai dengan Komisi IV untuk 0% tarif *fare trading* eh Komisi VI sorry, *unfare trading* yang ada di Eropa di Jepang dan lain-lain di Amerika termasuk. Kemudian bebaskan pajak impor untuk bahan baku dan tambahan yang tidak diproduksi dalam negeri. Ada PP 48 tahun 2020 Pak itu salah satunya di poin 3 yang tadinya tidak dikenakan untuk ikan-ikan beku sekarang dikenakan ini *problem* yang akan kita hadapi *problem* besar juga, jadi kami minta ini PP 48 untuk ditinjau kembali.

Kemudian kolaborasi Kementerian dan Lembaga harus *harmonize* antara Badan POM dengan KKP dengan Kementerian Perindustrian dengan BPJP Halal gitu ya itu kami berharap *harmonize* karena dalam implementasinya misalnya persyaratan-persyaratan di sini dibuat syaratnya begini di Badan POM berbeda dengan KKP, sementara KKP sudah menerapkan SNI wajib misalnya walaupun ini bukan di Komisi VI misalnya ya.

Kemudian kami minta juga penting ini. Bansos ya dari Kementerian Sosial jelaskanlah kepada kita kapan termin waktu di butuhkan dan sebenarnya berapa plafon harga supaya jangan *margin* di pedagang tuh gede banget Pak. Kami rapat tadi dibilang sebut kami dapat order, bukan kita untung banyak karena harga yang dibeli itu *margin*-nya tipis sekali dan sekarang hampir tidak bisa kita penuhi karena harga ikan meningkat, harga kaleng meningkat, masa beli ikan kaleng minta hanya Rp4.000, Rp5.000 gimana itu iya kan, nah kira-kira itu Pak.

Dan banyak lainnya ada di dalam file kami mudah-mudahan ada manfaatnya dan tentunya dari pertemuan ini kami berharap ada apa aksi berikutnya yang bisa menolong industri di dalam negeri khususnya pengalangan ikan.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selanjutnya hampir mirip-mirip asosiasinya dan beberapa paparan kalau sudah disampaikan tidak perlu diulang. Kami persilahkan kepada Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan, singkat-singkat saja Pak.

ASOSIASI PENGUSAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUK PERIKANAN (AP5I):

Baik.

Terima kasih Bapak Pimpinan dan Ibu Bapak yang kami hormati Anggota Dewan. Terima kasih juga rekan-rekan yang sudah mendahului kami pada paparan sebelumnya sehingga kami bisa fokus pada dampak Covid dan pendalaman terhadap **(suara tidak jelas)** dalam konteksnya. Presentasi sudah disiapkan oleh Ketua Umum kami Bapak Ir. Budhi Wibowo yang sudah *join* kita secara *virtual* mungkin bisa di *unmute* Pak Budhi yang akan menyampaikan presentasinya.

KETUA RAPAT:

Pak Budhi silakan, *monggo* Pak.

KETUA UMUM AP5I (BUDHI WIBOWO):

Terima kasih Pemimpin sidang dan para Anggota Komisi VI yang saya hormati.

Saya Budhi Wibowo saya Ketua Umum AP5I. Saya mungkin karena mempersingkat waktu sebagian sudah dijelaskan oleh Pak Ady Surya mungkin langsung aja ke *slide* nomor 5 yaitu tentang situasi unit pengolahan ikan selama Pandemi Pak.

Jadi pada waktu pandemi memang pada awalnya kami mengalami sedikit masalah terutama di transportasi karena ada PSBB tapi *alhamdulillah* saat ini permasalahan tersebut sudah bisa teratasi ya *relatively* sudah mulai lancar untuk transportasi logistik. Kemudian saat ini bisa dikatakan kalau UPI anggota AP5I kurang lebih sekitar 75 unit pengolahan ikan menengah besar kami semuanya kerja Pak kami semuanya bekerja, tetapi sebagian mengalami penurunan omzet karena ada penurunan permintaan pasar. Kemudian kenapa pasar menurun? jadi ada begini jadi untuk pasar yang ke arah *food service* yaitu ke hotel, restoran, atau cafe atau catering memang di dunia ini baik di pasar lokal maupun pasar ekspor itu mengalami penurunan yang amat tajam yaitu pada waktu awal-awal pandemi sampai 80% penurunannya, jadi kami hanya ada 20% pasarnya aja. Nah kemudian tapi *alhamdulillah* mulai bulan Juli ini sudah mulai sedikit meningkat saat ini penurunannya tapi masih lumayan ya masih 60% kurang lebih penurunannya jadi kami hanya punya pasar untuk itu kurang lebih 40% untuk pasar *food service*, tetapi *Alhamdulillah* untuk pasar-pasar ke arah pasar ritel pasar-pasar eceran baik itu ekspor maupun lokal itu stabil sampai sekarang bahkan ada kecenderungan sedikit meningkat. Bahkan untuk yang pasar lokal khusus yang untuk pasar penjualan *online* itu meningkat dengan sangat pesat, tetapi secara *overall* tetap saja anggota kami mengalami penurunan omzet khususnya anggota kami yang pasarnya

mengandalkan *food service*. Kami berusaha untuk melakukan *switching* yaitu dari pasar *food service* ke pasar ritel tetapi itu perlu waktu dan tidak mudah, mudah-mudahan ya dalam waktu dekat ini pasar ritel kami semakin meningkat, itu *update* kondisi pasar terkini.

Kemudian permasalahan utama kami mungkin seperti yang sudah disinggung Pak Ady Surya, permasalahan utama dari unit pengolahan ikan itu adalah kekurangan bahan baku. Mulai dulu Pak sampai sekarang pun masih terjadi meskipun ya tahun ini sedikit membaik yaitu utilitas kami ini kurang lebih 60%, jadi 40% mesin kami ini menganggur sampai sekarang sehingga akibatnya apa? karena utilitas kami belum terlalu tinggi kami kalah bersaing dengan negara-negara pesaing terutama Vietnam, Ekuador, Thailand, dan India itu kami kalah bersaing karena harga bahan baku di tempat kami atau di Indonesia adalah jauh lebih mahal dibandingkan negara-negara pesaing. Itu adalah permasalahan utama dari kami sehingga tentunya kami sangat berharap dukungan Pemerintah terhadap permasalahan bahan baku ini sehingga apa yang kami harapkan dalam dukungan Pemerintah terhadap permasalahan bahan baku adalah pertama yang paling penting dan ini sudah sering kami sampaikan dalam berbagai kesempatan. Pemerintah sebaiknya dalam anggaran penganggarannya fokus pada pengembangan infrastruktur di sektor hulu yaitu di sektor budidaya maupun tangkap ya. Misalkan untuk sektor perikanan budidaya pengembangan infrastruktur di listrik, jalan-jalan produksi, irigasi, kemudian untuk perikanan tangkap di gudang-gudang pendingin, pelabuhan, dan sebagainya. Infrastruktur ini sangat penting jadi mohon penganggaran dari Kementerian-kementerian terkait yang ke arah sektor perikanan lebih baik diarahkan ke arah pengembangan infrastruktur jadi diperbanyak sedangkan yang sifatnya untuk bantuan-bantuan langsung itu dikurangi, ini saran kami jadi mengutamakan untuk infrastruktur.

Kemudian yang kedua masalah perizinan ini masalah klasik sampai sekarang ini perizinan memang memang sudah mencoba diatasi oleh Pemerintah tapi masih juga masih belum terlaksana. Perizinan yang sangat *ruwet* terutama di sektor hulu yaitu di tambak mungkin sekitar 20 izin, untuk nelayan juga hampir sama jumlahnya ini tolong juga segera dilakukan pembenahan-pembenahan penyederhanaan perizinan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kemudian kami juga berharap dari DPR juga bisa menyampaikan bahwa kami perlu juga adanya bantuan-bantuan modal kerja terutama pada UKM-UKM UKM-UKM budidaya maupun kelompok-kelompok nelayan di sektor hulu sehingga otomatis kalau mereka punya modal kerja, hasil tangkapan atau hasil budidaya meningkat, suplai bahan baku pada kami akan meningkat.

Permasalahan yang tadi saya sampaikan atau usulan yang sudah kami sampaikan pada dasarnya Pemerintah sudah melaksanakan tetapi menurut kami masih kurang cepat Pak, ini butuh kita kecepatan baik itu infrastruktur maupun kemudahan-kemudahan perizinan dan lain-lain itu tolong dipercepat saya berharap dari Komisi VI bisa mempercepat.

Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Direktur AP5I Pak Aris Utama untuk melanjutkan mungkin ada 1, 2 poin yang masih belum tersampaikan, silakan Pak Aris Utama.

DIREKTUR AP5I (ARIS UTAMA):

Terima kasih Pak Budhi.

Saya ingin menambahkan contoh *case* yang sangat spesifik tapi awalnya sudah disebutkan oleh rekan-rekan kita di hotel restoran catering. Pasar ekspor kita juga cukup besar Pak *seafood* di sana khususnya produk-produk kita ini bedanya dengan rekan kami yang pengalengan, kita ini ekspornya dalam bentuk beku atau didinginkan Pak. Jadi harganya relatif lebih tinggi, satu kontainer kami kisaran nominal angkanya antara Rp1,5 Miliar sampai Rp5 Miliar Pak satu kontainer saja. Jadi bisa dibayangkan kalau satu perusahaan ekspor 100 kontainer sebulan dan lain sebagainya.

Kondisi sekarang masih cukup bagus Pak, salah satu yang ingin saya garis bawahi di sini adalah risiko gagal bayar yang mengikat di posisi *customer* kami Pak khususnya untuk ekspor kami ke pasar hotel restoran catering yang paling terdampak dari *Lockdown* dan pembatasan-pembatasan ini tadi. Jadi harusnya kasus ini bisa diatasi dengan perlindungan asuransi Pak asuransi ekspor, nah tapi nyatanya ada satu BUMN asuransi ekspor pun mangkir dari tanggung jawabnya gitu Pak, sudah bayar premi sudah ikut lama tapi mangkir padahal ini kondisi ini lagi pelik gitu Pak. Jadi ada *customer-customer* beberapa ya contohnya Hotel mereka masih membutuhkan tapi mungkin ada *cashflow* dan kita *nggak* tahu apakah mereka bisa bertahan setelah sampai pandemi ini, tapi kalau kita *nggak* suplai ya kesulitan juga gitu. Ini pasar-pasar yang harusnya kita bisa masukin sekarang kita *nggak* berani masuk Pak, kenapa? karena kita beli asuransi yang notabene harusnya kita terlindungi karena sudah bayar preminya itu, ketika terjadi klaim *nggak* bayar Pak. Mungkin itu salah satu kasus.

KETUA RAPAT:

Yang dari Covid ini?

DIREKTUR AP5I (ARIS UTAMA):

Mulai dari lama Pak, jadi beberapa kasus ini sampai sekarang kita terus berusaha mediasi untuk bisa mendapatkan solusi padahal kita punya *claim*. Nah dengan kondisi Covid ini jadi pasar-pasar ini tidak bisa tersentuh Pak.

KETUA RAPAT:

Asuransinya *nggak* bisa diskusi ini nanti kasih tahu ke Sekretariat.

DIREKTUR AP5I (ARIS UTAMA):

Siap.

KETUA RAPAT:

BUMN ya?

DIREKTUR AP5I (ARIS UTAMA):

Iya Pak.

Itu saya rasa itu sangat bisa memfasilitasi terhadap kami eksportir yang memang fokus terhadap produk dan pengadaan.

KETUA RAPAT:

Padahal pasarnya jelas untuk ekspor?

DIREKTUR AP5I (ARIS UTAMA):

Pasarnya terbuka lebar Pak untuk ekspor, 100% ekspor dan ini **(suara tidak jelas)**.

KETUA RAPAT:

Berapa persen kendala asuransi ini menghambat ekspor.

DIREKTUR AP5I (ARIS UTAMA):

Kira-kira kalau saya boleh bilang 30-40% Pak karena pasar-pasar yang ini yang boleh dibilang sebetulnya punya historis yang bagus tapi karena ada kendala seperti ini kan mereka mungkin kesulitan dan mereka semua berusaha juga Pak. Nah, ketika kita ingin masuk ke mereka kita sendiri juga ngeri karena nggak ada perlindungan apa-apa, sedangkan kalau ada asuransi kan kita tanggung bersama dan kita syukur walaupun asuransi.

KETUA RAPAT:

Padahal itu *user buyer*-nya lama?

DIREKTUR AP5I (ARIS UTAMA):

Sudah Pak dan sudah berkali-kali **(suara tidak jelas)** dan tiba-tiba saja kan ada kasus Pak yang tiba-tiba nggak bayar walaupun itu sangat kecil satu kasus diantara mungkin 100 atau 200 pengiriman, jadi sebetulnya *non issue* Pak. Atau mungkin nggak satu kasus dari 1000 pengiriman Pak satu permil aja kan kita sudah bayar preminya tapi nyatanya tidak di *cover* dan sudah kurang lebih mediasi 4 tahun mangkir kanan kiri kanan kiri terus Pak. Jadi kesulitan buat anggota-anggota kami untuk memanfaatkan perlindungan ini yang harusnya disediakan untuk memfasilitasi eksportir walaupun tidak di *cover* 100% tapi 80% sangat membantu Pak walaupun *margin* kita sangat tipis dibawah 10% dibawah 10% semua Pak. Jadi itu kendala yang saya rasa sangat krusial pada masa Covid ini antara *make it or break it* gitu Pak.

Terima kasih atas kesempatannya Bapak Pimpinan saya tidak memperpanjang waktu lagi, silakan teman-teman yang lain. Terima kasih, Selamat siang.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Kami melompat dulu ke Asosiasi Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO).

ASOSIASI INDUSTRI PERMEBELAN DAN KERAJINAN INDONESIA (ASMINDO):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang Pimpinan Komisi VI DPR RI yang saya hormati Pak Ario Bimo mungkin besok bisa ketemu di apa namanya **(suara tidak jelas)** kembali. Kemudian para anggota Komisi VI DPR RI baik yang mengikuti Rapat ini di-*offline* atau *offline* atau *online*. Kemudian rekan-rekan Ketua Asosiasi yang hadir pada siang hari ini.

Terima kasih atas kesempatannya, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk menyingkat waktu saya mungkin langsung saja akan memberikan *update* kepada Komisi VI tentang dampak pandemi terhadap usaha *furniture* dan kerajinan di Indonesia secara nasional. Yang pertama mungkin sedikit saya akan perkenalkan dulu nama saya Endro Wardoyo, saya Ketua bidang Organisasi. Kebetulan Ketua Umum kami berhalangan untuk hadir pada siang hari ini dikarenakan ada kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan, Bapak Anggoro Ratmadiputro. Kemudian saya bersama rekan kami Bapak **(suara tidak jelas)**.

Langsung saja. Jadi Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia ini profilnya secara singkat jumlah perusahaannya anggotanya ini Profil Industri Furniture Indonesia baik skala UKM dan Industri. Industri menengahnya ini ada 1.114, kemudian industri kecilnya ini 537.415 untuk industri kecilnya, total kapasitasnya 4,91 juta ton ini kebutuhan apa namanya kapasitas produksinya. Jumlah tenaga kerjanya untuk industri menengah itu 47.572 orang, kemudian untuk industri kecilnya ini 1.021.317 orang. Nah kemudian nilai ekspornya untuk tahun 2019 kemarin ini tertinggi sejak 20 tahun terakhir ini 1,95 miliar US\$, ini nilai ekspor pada tahun 2019 terakhir kemarin sebelum pandemi. Kemudian kontribusi terhadap PDB nasional 0,6% di sektor *furniture*. Nah kinerja ekspornya ini memang untuk industri *furniture* ini dari 5 tahun yang lalu memang mengalami peningkatan 2015 itu masih di angka USD 1,71 miliar, kemudian 2016 turun menjadi USD 1,61 miliar, tahun 2017 ini naik sedikit USD 1,63 miliar, 2018 naik USD 1,69 miliar, kemudian 2019 ini puncaknya kemarin USD 1,95 miliar. Memang kita kalah jauh dibandingkan tetangga kita Vietnam, kemudian Malaysia dan lain-lain padahal dahulu mereka ini semuanya belajar dari kita. Nah negara tujuan ekspor *furniture* Indonesia tahun 2019 ini urutan pertamanya ini memang masih didominasi oleh Amerika, kemudian Jepang, Belanda, Inggris, Jerman rata-rata ini negara-negara Eropa intinya begitu ini tujuan ekspornya. Kemudian total ekspor Furniture Dunia tahun data tahun 2017 ini sumbernya dari UN Comtrade, jadi untuk total ekspor *furniture* dunia ini nilainya *seratus enam puluh satu miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan puluh tujuh koma sekian sekian* dan yang paling atas ini urutannya adalah China. Kemudian Indonesia Indonesia ini di posisi urutan apa namanya ekspor *furniture* dunia itu di urutan nomor 21 posisi Indonesia tapi sebetulnya ini peluangnya masih cukup besar.

Pangsa pasar *furniture* Indonesia ini memang yang paling besar ke Amerika Serikat, tahun 2018 ekspor ke Amerika Serikat ini yang tertinggi ini adalah China, kemudian Meksiko, Vietnam, Kanada, Italia, Malaysia, negara-negara Asia, Indonesia urutannya Nomor 8. Nah sebetulnya dampak dari perang dagang China dan Amerika ini peluang Indonesia sangat besar sekali untuk masuk ke Amerika untuk mengganti posisi pasar China karena memang barang-barang dari China ini di apa namanya diberikan pajak masuk yang memang cukup tinggi untuk masuk ke Amerika. Kemudian dampak pandemi terhadap usaha *furniture* dan *craft* Indonesia ini memang dampak Covid ini memberikan tekanan terhadap UKM sektor Furniture, Craft baik dari sisi *supply* atau pun *demand* secara nasional di Indonesia. Kemudian berbeda dengan krisis Asia 1998 maupun krisis keuangan 2018 akibat pandemi (***suara tidak jelas***) lebih kompleks yaitu di picu dari aspek kesehatan kemanusiaan lalu berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi khususnya UKM. Bedanya kalau krisis 98 ini UKM ini menyelamatkan negara sekarang saatnya negara harus menyelamatkan UKM ini kebalikannya.

ASMINDO melakukan survei dampak Covid-19 terhadap UKM, *Furniture*, dan Kerajinan di 24 daerah sentra Indonesia dilaksanakan sejak 2 Juli sampai dengan 8 Juli 2020. Kemudian dari data survei yang sudah kami susun anggota ASMINDO yang bergerak di bidang *furniture* dan kerajinan skala industri dan UKM berjumlah anggota kita ini 2500 perusahaan, jumlah responden yang mengikuti survei yang diadakan oleh ASMINDO 1160 perusahaan di 24 daerah yang terdampak Covid-19, hasilnya 60% responden mengalami penundaan order pasar domestik, ini untuk pasar domestik nilainya mencapai Rp173.460.000.000,- ini untuk penundaan order pasar domestik di bulan Juli. Kemudian 86% responden mengalami penundaan order pasar ekspor, nilainya mencapai Rp545.300.000.000,- ini yang penundaan order untuk pasar ekspor. Kemudian yang selanjutnya 30% responden mengalami pembatalan order pasar domestik, nilainya mencapai Rp65.040.000.000,- ini untuk pembatalan order di pasar domestik. Kemudian 40% responden mengalami pembatalan pesanan pasar ekspor, nilainya mencapai Rp225.520.000.000,-. Nah kemudian indikasinya penurunan penjualan, berkurangnya cadangan kas, kemudian para pengusaha melakukan efisiensi seperti merumahkan karyawan, kemudian mengurangi jam kerja, dan melakukan PHK ini pilihan terakhir.

Nah ini gambaran dari prosentase penundaan pesanan pasar domestik yang tadi sudah saya sebutkan nilainya Rp173.460.000.000,-, kemudian untuk *postpone order* ini diakibatkan karena negara tujuan ekspor kita ini juga mengalami *lockdown*. Artinya mereka juga sama seperti yang disebutkan rekan-rekan di dunia perikanan dan lain sebagainya oleh karena itu para *buyer* memang menunda pesanan ke kita. Nah ini memang perkembangannya ini akan lain artinya selalu *update* tidak apa akan berubah karena ini bisa jadi awalnya menunda dan pada akhirnya juga akan membatalkan nah ini tergantung situasi seberapa lama ini situasi ini akan terjadi. Kemudian pembatalan pesanan untuk pasar domestik, nilainya tadi Rp65.040.000.000,- ini untuk pembatalan pasar domestik. Kemudian ini pembatalan ekspor untuk pasar ekspor, nilainya Rp225.520.000.000,-. Nah tindakan efisiensi yang dilakukan oleh para pelaku usaha *furniture* itu yang pertama itu mengurangi jam kerja, kemudian ini juga terkait dengan *physical distancing* kemudian dan lain-lain. Kemudian yang kedua ini PHK karyawan, pengurangan jam kerja tadi itu ada 18% dari anggota yang kita survei yang melakukan pengurangan jam kerja ini ada 18%, kemudian PHK karyawan ini 23%, kemudian merumahkan karyawan ini jumlahnya 20% dari tadi 1160 anggota kita, kemudian 39%-nya tidak merumahkan karyawan artinya ini masih normal.

Kemudian masalah utama yang dihadapi industri furniture dan UKM furniture. Yang pertama adalah penjualan atau permintaan menurun. Kemudian yang kedua pemasaran mencari Pasar baru. Kemudian yang ketiga adalah modal kerja tidak ada atau minim karena memang daya tahan perusahaan teman-teman ini memang daya tahan dalam bertahannya itu tidak sama Pak ini tergantung dengan kekuatan finansial masing-masing perusahaan antara perusahaan A dengan perusahaan B ini tentu tidak sama, ini dipengaruhi oleh kekuatan modal masing-masing perusahaan. Kemudian yang keempat adalah pasokan bahan baku, ini juga mengalami apa gangguan. Yang kelima tenaga kerja yang beralih profesi artinya yang di PHK tadi kemudian nanti kalau suatu ketika ini akan bangkit kembali kita juga nantinya bakal kebayang bahwa ke depannya agak susah juga mencari tenaga kerja yang memang keahliannya ini memang apa namanya sudah terlatih terdidik dan lain sebagainya karena memang di sini ini mereka sudah beralih profesi, ada yang mungkin kerja bangunan, ada yang mungkin di Toko swalayan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-6 ini adalah daya belinya melemah, nah ini yang dihadapi oleh industri UKM furniture.

Kemudian yang selanjutnya program bantuan pemerintah yang sudah dimanfaatkan oleh pelaku usaha furniture. Yang pertama adalah penundaan angsuran pokok, nah ini umum ya mungkin teman-teman yang lain juga. Kemudian yang kedua insentif pajak. Kemudian yang ketiga keringanan bunga kredit. Yang keempat ini belum dapat bantuan artinya mungkin memang belum tahu, belum tersosialisasi, atau memang mereka memang mampu tidak membutuhkan bantuan tersebut itu kondisinya artinya persentasinya juga disitu sudah ada.

Kemudian program Pemerintah yang diharapkan oleh para pelaku usaha di sektor Furniture dan Craft artinya menurut data survei kita. Yang pertama adalah talangan modal kerja nanti kalau memang pekerjaannya sudah ada ini angkanya ada 35%. Kemudian yang kedua mencari pasar baru ini angkanya ada 23%. Yang ketiga adalah fasilitas promosi atau pameran ini cukup banyak juga angkanya 23%. Kemudian yang keempat pasokan bahan baku nilainya ada 12%. Yang kelima adalah tenaga kerja terampil nilainya ada 7%.

Nah ini pokok-pokok masalah yang mungkin akan kami apa namanya sampaikan kepada Anggota Komisi VI. Yang pertama adalah Modal Kerja, modal kerja tidak ada. Hambatan dampaknya tidak mampu mengerjakan order nantinya kalau ini sudah sehat dan teman-teman yang mungkin sekarang sudah mendapatkan order kendalanya begitu. Kemudian usulan atau solusinya ada kredit modal kerja, kemudian sebrakan atau pinjaman temporary, jaminannya bisa pre order atau mungkin aset lain sertifikat dan lain-lain melalui bank kredit ekspor atau mungkin koperasi dan BPR.

Kemudian yang kedua Pemasaran. Pemasaran ini ada lima masalah karena intinya sebenarnya di sini kalau di sektor furniture dan kerajinan.

Yang pertama, kurangnya Pameran atau event internasional di dalam negeri. Jadi pameran furniture ini memang ada pameran internasional yang sudah diselenggarakan di dalam negeri, ini yang harus di support. Yang pertama itu di Jakarta di Kemayoran, kemudian yang kedua di Yogyakarta di JEC (Jogja Expo Center) namanya Jogja Internasional Furniture & Craft Fair Indonesia dan ini sudah agenda rutin dan kita memang butuh support di sini untuk didukung. Pameran tidak harus pameran internasional tidak harus selalu di Jakarta karena sekarang ini dengan adanya konektivitas jalan tol harusnya ada spot-spot ekonomi tumbuh saatnya memang Pemerintah harus membangun venue-venue gedung pameran seperti mungkin di Semarang Jawa Tengah, di Yogyakarta, di Surabaya, di Bali ini

perlu untuk penguatan industri dan promosi kita. Usulan solusinya adalah penganggaran bantuan fasilitas pameran agar ke depan tidak lagi berbasis untuk perusahaan-perusahaan. Namun demikian kalau memang ini dibolehkan secara Undang-undang mungkin sebaiknya ini skemanya pembiayaan ini memang yang dibiayai adalah *spot event*-nya seperti subsidi lah kira-kira *event* ini disubsidi 50% begitu apalagi dalam masa pandemi ini karena dengan disubsidi 50% ini yang ikut UKM-UKM ini akan lebih besar artinya peluangnya untuk kita menaikkan ekspornya juga akan ada semakin besar dibandingkan dengan pola-pola penganggaran yang sudah ada ini biaya promosinya, biaya anggarannya besar karena memang terbebani oleh perjalanan dinas oleh pegawai negeri yang banyak dan lain sebagainya.

Yang kedua, kurangnya Pameran Internasional yang memang diselenggarakan di luar negeri memang harus selektif. Ini memang yang harus digenjot sekarang ini memang sebetulnya pameran harus fokus semua diarahkan ke pasar Amerika ini yang jelas-jelas pasarnya memang di sana ini tumbuh dan di saat pandemi ini ternyata dilihat bukan kita dalam rilisnya Kemendag kemarin bahwa ekspor dari mulai Januari sampai Mei ke pasar Amerika ini naik, naik untuk *furniture*. Ini dampak dari perang dagang dan ini saya cek langsung ke Wamenlu Pak Siregar Mahendra Siregar karena memang sudah lama mereka ini berpartner dengan kita waktu mereka Pak Mahendra Siregar ini menjadi Dubes di Amerika data dia komplit di sana sebenarnya ini cukup bagus harus dikembangkan. Jadi Pemerintah Kementerian harus mengarahkan fokus saja apalagi sekarang dananya terbatas fokusnya ke sana untuk beberapa pameran.

KETUA RAPAT:

Persingkat Pak.

ASOSIASI INDUSTRI PERMEBELAN DAN KERAJINAN INDONESIA (ASMINDO):

Yang ketiga, Peran ITPC. ITPC ini menurut kami perannya sangat kurang ya anggarannya besar jadi saya mohon mungkin ini DPR juga harus memaksimalkan peran ini karena ini cukup pelanggaran dan mungkin peran mereka ini memang harus mempromosikan produk-produk kita yang potensial untuk dipromosikan. Nah mungkin di situasi yang sulit ini sekarang ini kan banyak *warehouse-warehouse* yang nganggur di Amerika ini, nah ini bagus juga kalau ini di sewa kemudian Pemerintah membeli produk-produk kita yang memang ini gagal bayar tadi yang tidak jadi dipesan tadi kemudian dipasarkan di sana daripada kita membagikan stimulus bantuan yang mungkin saya pikir ini juga *nggak* membantu banyak artinya hanya sementara ini masih cukup punya peluang artinya ke depan kalau ini garap segera secara serius, fungsikan ITPC untuk menggarap ini.

Yang keempat, kalah bersaing di pasar domestik. Saya melalui momentum yang baik ini, jadi pengadaan barang dan jasa ini kan nilainya cukup fantastik. Kita belum pernah memang asosiasi kita meminta bahwa kita minta untuk mensuplai yang *meubeller*-nya, tapi paling tidak pada masa-masa pandemi ini mohon UKM diberikan peran dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah bila perlu kita ditemukan dengan LKPP apa? Syaratnya ini terlalu memberatkan untuk UKM, ya terlalu *rigid* *nggak* mungkin UKM bisa masuk, ada SNI ada segala macam bla bla bla banyak sekali. Yang masuk setahu saya ini memang vendor-vendor yang jelas seharusnya dia anggota kami ini tidak kenal kita jadi kayak semacam apa ya ini ya

kayak broker kira-kira begitu yang tidak saya kenal tapi di belakangnya itu ternyata dia beli produknya IKEA, beli produknya Informa, Olympic terus yang muncul sebagai vendor ini siapa ini kita *wallahua'lam*. Nah ini yang mungkin tugas DPR untuk menanyakan kepada LKPP. Nah selain itu juga saya kemarin minta kepada Pak Teten Menteri Koperasi dan UKM untuk mengaudit LKPP saya minta Pak Teten untuk mengaudit LKPP melalui lembaga kita ada yang lembaga Pemerintah maksudnya supaya serapannya tahu sebetulnya yang UKM itu sampai seberapa besar yang tersebar itu. Nah ini mohon ini untuk penguatan pasar domestik mohon UKM diberikan peran di dalam pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh Kementerian Lembaga K/L ataupun mungkin di dinas-dinas atau di daerah Provinsi atau Kabupaten Kota.

Kemudian yang kelima, yang terakhir untuk bidang pemasaran ini beda nih Pak. Perlu dibentuknya Badan Promosi Nasional, sering K/L kita ini ego sektoral, Kemendag pameran sendiri, kemudian Kemenperin pameran sendiri, Rekras pameran sendiri. Apa sih sulitnya misalnya kita ke luar negeri ini menjadi 1 *brand* House of Indonesia atau Paviliun Indonesia ini dibiayai bersama jangan sendiri-sendiri kayaknya kita ini kecil banget di luar negeri kadang-kadang kita melihatnya itu juga malu artinya kadang-kadang *stand* hanya dipojok ini anggarannya besar. Maksud saya ya mungkin ada tim adhoc lah untuk tujuan bersama demi munculnya Indonesia ini yang lebih besar artinya ya kita sudah layak seperti itu, kalau kita lihat China satu hall masa kita hanya *stand* kan ini malu-maluin kita ini kan negaranya negara besar kira-kira begitu.

Nah kemudian Regulasi ya ini terkait dengan Permendag nomor 35 tahun 2011 sesuai 2011 dan Permendag nomor 44 tahun 2012. Industri pengolahan bahan baku rotan banyak yang ditutup usahanya sehingga industri mebel dan kerajinan sulit mendapatkan bahan baku rotan setengah jadi. Usulan dan solusi konkret kami revisi Permendag nomor 35 dan 44 membentuk Badan Logistik Rotan untuk menampung produksi petani dan industri hulu serta menyalurkan ke industri mebel dan kerajinan. Kita sudah tahu semua akibat dari Permendag ini ini petani-petani di Palu di Sulawesi, di Kalimantan ini semua sekarang ini kehilangan pekerjaannya termasuk kita sulit mendapatkan bahan baku rotan.

Yang terakhir Pengembangan Daya Saing. Pendirian Material Center ini untuk meningkatkan daya saing kita sudah apa namanya mewacanakan ini memprogramkan ini tentang Material Center ini rencananya kami di Jepara akan kita bangun untuk membantu supaya di situ itu memang tidak ada kendala soal bahan baku.

Kemudian yang kedua, Pengolahan Bahan Baku. Mata rantai pasokan bahan baku terlalu panjang. Nah kita juga sudah menginisiasi program ini *factory sharing* atau rumah produksi bersama ini diinisiasi oleh Kemenkop tapi ini kendalanya ada Pak. Kendalanya adalah soal lahan, nah ini Dapilnya Pak Ario Bimo ini di Klaten, Bupatiya agak susah ini dimintai, Pak ini ada teman-teman disitu ini kan ada 3 sentra dan ini harus mendapatkan *support* ini, mungkin Pak Ario Bimo bisa membantu nanti mengusahakan lahannya ini untuk masalah *factory sharing* ini.

Yang ketiga, daya saing *furniture* rumah. desain *furniture* berdasarkan permintaan *buyer*. Nah ini selama ini yang terjadi di **(suara terputus-putus)** nah ini juga sudah diinisiasi sudah ada MoU dengan Gubernur DIY dan Dirjen dan Menteri Perindustrian yang akan mendirikan Pusat Desain Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Itu mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selanjutnya Persatuan Pabrik Monosodium Glumate dan Glutamic Acid Indonesia.

PERSATUAN PABRIK MONOSODIUM GLUMATE DAN GLUTAMIC ACID INDONESIA (P2MI):

Selamat siang Bapak Pimpinan Sidang Pak Aria,
Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya Dodi dari PT Sasa Inti dari P2MI dan saya di dampingi oleh dua rekan saya Pak Sugito dan Pak Eko, jadi pada kesempatan yang baik ini terima kasih kami diberikan kesempatan untuk Dengar Pendapat. Jadi perkenankan kami dari Persatuan Pabrik Monosodium Glutamat dan Glutamic Acid Indonesia atau disingkat P2MI menyampaikan perkembangan industri monosodium glutamat atau MSG berkenaan dengan situasi pandemi Covid-19, saat ini ada 5 produsen MSG di Indonesia PT Ajinomoto, PT Ajinex, PT Miwon, PT Cheil Jedang, dan PT Sasa Inti. Situasi kami pada tahun 2019 kapasitas produksi kami kurang lebih sekitar 300000 ton per tahun, kemudian total produksi di tahun 2019 itu sekitar 280000 ton, konsumsi dalam negeri sekitar 150000 Ton, dan ekspor 128000 ton. Nah sejak bulan Januari 2020 pemasukan di dalam negeri mengalami kelesuan yang antara lain disebabkan oleh ditutupnya berbagai usaha rumah makan dan restoran yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haryadi, kami pun mengalami kesulitan Pak jadi utilitas kita itu turun sampai kurang lebih 30% Pak. Nah disamping *market* yang turun Pak ini diperberat lagi dengan produk MSG impor terutama dari China Pak itu naiknya cukup signifikan Pak mungkin nanti rekan saya Pak Sugito dan Pak Eko juga akan menyampaikan. Di samping produk impor ini kita juga semakin diperberat lagi dengan harga bahan baku tetes yang merupakan bahan baku utama produksi kami itu naik sangat tinggi Pak. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu cuma sekitar 2000 kami ini bisa naik sampai 3000, 3400 Pak. Nah itu mungkin sistem apa tendernya segala macam Pak, itu yang mungkin perlu dievaluasi lagi. Iya nanti ya mungkin secara detail Pak kita hanya **(suara tidak jelas)** sebenarnya Pak, mungkin nanti rekan kami akan menyampaikan Pak.

Nah meskipun demikian Pak dengan kondisi sulit ini kami dari produsen MSG sampai saat ini tidak melakukan PHK Pak, kami berusaha bertahan untuk tetap tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja. Nah harapan kami tentunya dengan kesempatan ini melalui Komisi VI ini kami mengharapkan ada kebijakan dari Pemerintah agar impor MSG ini bisa dikendalikan MSG dari China Pak, impor dari MSG kalau kita lihat tahun 2019 itu sampai mencapai 48000 ton Pak, nah kalau kebutuhan domestik sebetulnya cuma 153.000 Pak ya. Kemudian kami juga

mengharapkan ada kebijakan untuk mengendalikan juga dan menstabilkan harga Tetes sebagai bahan utama kami. Iya naik Pak. Nah mungkin juga hubungan dengan Tetes ini kalau dimungkinkan juga ada kebijakan untuk membatasi ekspor Pak. Kita beli dari pabrik gula dan rafinasi Pak. Iya Pak. Ya mungkin nanti bisa. Baik Pak, jadi secara umum itu Pak secara detail nanti mungkin saya akan minta rekan saya Pak Sugito silakan Pak. Iya karena bahan baku Tetesnya mahal itu kenapa. Izin impor bahan baku ini kalau untuk *raw sugar* dan itu dari Perindustrian dan Perdagangan Pak. Iya karena sama Pak, sama Pak. Bukan, karena kita bukan untuk sebagai bahan baku gula Pak, kita sebagai bahan baku untuk memproduksi, kebutuhan? kebutuhan pabrik kalau secara global mungkin sekitar 8, mungkin nanti datanya akan kita siapkan Pak kita susulkan Pak Aria. Iya, saya kira itu Pak.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan ke Asosiasi Produsen Alat Kesehatan, sedang keluar ya tidak ada disini. AGRI dulu saja, silakan AGRI.

ASOSIASI GULA RAFINASI INDONESIA (AGRI):

Baik terima kasih Pimpinan Rapat Bapak Aria Bima.

Yang kami hormati Anggota Komisi VI DPR RI,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada kami Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia. Pertama-tama memang izin kami akan sampaikan kondisi aktual terkait industri gula rafinasi di Indonesia. Sebagai informasi bahwa anggota kami terdiri dari 11 anggota Pak, mungkin bisa ke *slide* lanjut. Yang berada inilah beberapa lokasi yang ada di Indonesia yaitu di Medan, Lampung, 6 ada di Banten, 1 di Bekasi, 1 di Cilacap, dan 1 lagi di Makassar.

Lanjut.

Anggota kami total 11 ini memiliki kapasitas produksi untuk mengolah *raw sugar* sejumlah 5.016.200 ton *raw sugar* per tahun, jadi kalau boleh dikatakan kapasitas kami sebenarnya over dari kebutuhan industri yang ada di Indonesia yaitu sekitar 3.000.000 ton gula atau setara dengan 3,2 juta ton *raw sugar*. Sebagai informasi memang industri pengguna kami yang paling besar adalah industri makanan dan minuman Pak, sedangkan industri yang lain mungkin tadi seperti Horeka, ada tembakau atau industri yang lain ini relatif lebih kecil.

Lanjut.

Ini sebagai informasi Pak, jadi mungkin beberapa ada yang belum mengetahui informasi ini. Kenapa memang Pabrik Gula rafinasi ini berada ataupun terbit di Indonesia? jadi memang awalnya sebelum tahun 1996 ini industri makanan minuman ini membutuhkan gula yang memiliki kualitas yang baik yaitu tingkat higienitas dan berbagai sertifikat yang dibutuhkan dalam memproduksi produk makanan dan minuman. Jadi sebelum 96 ini mereka melakukan importasi langsung berupa gula kristal rafinasi dimana dalam melakukan importasi tentu harganya ini memang tidak dapat mengikat dengan baik, kemudian pemesanannya juga tidak bisa *just intime* Pak karena memang membutuhkan waktu dalam melakukan importasi dan sistem pembayarannya juga *cash* sebelum dikirim.

Melihat kondisi seperti ini Pemerintah saat itu membuka peluang bagi investasi dalam negeri sehingga dipikirlah bagaimana untuk menghemat ataupun memotong juga mekanisme yang ada itu dengan memberikan izin pabrikan-pabrikan dalam negeri untuk memproses gula dari *raw sugar* di mana *raw sugar* ini juga berasal dari tebu. Banyak memang situasi produksi gula dalam negeri tidak mencukupi (defisit) dan produksi yang dihasilkan dalam negeri ini belum bisa memenuhi kualitas yang dibutuhkan oleh industri makanan dan minuman. Sehingga saat ini dilakukanlah impor gula kristal mentah atau *raw sugar* di mana dalam hal ini akan beberapa poin yang bisa menjadi *benefit* adalah tentunya dengan industri hadir dalam negeri menyerap tenaga kerja, dapat menghemat devisa, dan kemudian industri makanan minuman ataupun industri gula yang membutuhkan gula kristal rafinasi tentunya lebih dapat kepastian dalam hal harga dan pembelian yang *just intime* jadi tidak perlu melakukan stok banyak-banyak, jadi sesuai dengan kebutuhan per bulan mereka bisa order.

Jadi ini sedikit gambaran kenapa memang saat itu pabrik gula rafinasi muncul sehingga sampai tahun 2010 dari berawal dari 4 pabrik kemudian bertambah jadi 8 dan akhir kita sekarang ada 11. Di tahun 2010 terbitlah Perpres Nomor 36 Tahun 2010 ini berkaitan dengan pembatasan daftar usaha yang tertutup sehingga waktu itu untuk pabrik gula diputuskan tidak bisa di dirikan atau diterbitkan lagi apabila tidak integrasi dengan perkebunan.

Lanjut.

Ini gambaran saja prinsip prosesnya. Jadi memang gula kristal mentah ini berasal juga dari tebu di mana dari negara-negara yang *surplus* terhadap tebu, kemudian kita proses di Indonesia dan kita jadikan gula kristal rafinasi.

Lanjut, lanjut.

Ini adalah gambaran penyerapan industri pengguna yaitu yang terbesar seperti yang disampaikan tadi adalah industri makanan dan minuman sebesar 90%, kemudian industri Farmasi sekitar 2%, industri Horeka sekitar 3%, industri tembakau 3%, dan industri yang lain-lainnya adalah sekitar 2%.

Lanjut.

Perihal dampak Covid yang terjadi dan seperti kita ketahui memang dampak Covid ini buat industri gula ada pengaruhnya tapi memang tidak terlalu signifikan, tapi secara kebutuhan gula ini sangat diperlukan oleh industri pengguna dan memang pada tahun 2020 ini masih terjadi peningkatan Pak 8% dari 2019. Sebagai catatan penyerapan gula rafinasi oleh industri pada semester 1 tahun 2020 ini mencapai 90% Pak karena memang hari raya Idulfitri ini terjadi di semester 1. Namun bukannya menjadi satu hal yang selalu positif Pak memang dampak Covid ini tentunya memang sangat mempengaruhi dari biaya yang yang terjadi perubahan biaya *cost* terkait hal-hal yang perlu dilakukan oleh industri yaitu seperti mengatasi protokol Covid yaitu dengan membeli peralatan-peralatan kesehatan, alat proteksi, kemudian melakukan ekstrak disinfektan, dan juga untuk memenuhi persyaratan protokol kesehatan dengan *distancing* adalah kita juga mencarikan area-area tambahan untuk pelaksanaan dari pekerja masing-masing industri. Anggota kami tidak ada yang melakukan PHK Pak karena memang kebutuhan dari gula ini apalagi di semester satu ini sudah kita ketahui sangat-sangat dibutuhkan dan kami juga tidak ada yang melakukan stok operasi.

Lanjut.

Ini adalah data produksi yang dilakukan dari tahun 2007 sampai 2019 di mana terakhir di tahun 2019 produksi kami mencapai 3,1 juta ton per tahunnya dan tahun 2020 ini tadi di semester 1 sendiri sudah mencapai 1,5 juta ton. Kami akan masih

melakukan evaluasi di semester 2 walaupun memang di kuartel ketiga ini ada sedikit penurunan Pak tapi kami juga berharap konsistensinya akan terjadi di akhir tahun.

Lanjut.

Sebagai informasi juga ini adalah data importasi yang dilakukan dari tahun 2007 sampai 2019 ini terlihat memang kalau di 2018-2019 ini ada terjadi sedikit penurunan tapi kembali bahwa ini sebenarnya adalah *carry over* dari tahun 2017. Untuk industri gula rafinasi sendiri sangat tergantung produksinya ini terhadap kebutuhan dari industri pengguna Pak, jadi bukan serta-merta selalu menjadi apa growth terus-menerus tapi yang tergantung dengan industri penggunanya khususnya memang industri makanan minuman. Oleh sebab itu memang boleh dikatakan industri rafinasi cukup berbeda dengan industri yang lain Pak pada umumnya karena memang ibarat kata sudah ada kotaknya, apabila memang kebutuhan dari industri pengguna mengalami kenaikan kita akan ikut naik Pak begitupun sebaliknya apabila terjadi penurunan akan terjadi turun.

Kemudian hal-hal yang bisa kita sampaikan sebagai masukan Pak usulan dan ini kami juga mau mohon bantuan dari Bapak-bapak Ibu di Komisi VI itu perihal keberlangsungan industri gula rafinasi sendiri karena terkait dengan neraca gula Indonesia Pak yang hari ini masih carut-marut dimana industri rafinasi ini selalu menjadi sisi dianggap sisi gelap lah karena memang melakukan importasi, namun buat kami adalah industri kami ini sangat membantu sangat *men-support* dari industri pengguna Pak. Jadi growth yang terjadi dalam industri makanan minuman setahun bisa 8% sampai 10% ya kami melakukan kontribusi disana sehingga memang kami butuh satu kepastian satu jaminan Pak keberlangsungan usaha karena memang belakangan kali ini adalah industri kami ini sering dipermasalahkan tentang diwajibkan untuk membangun perkebunan. Kalau boleh dikatakan bahwa prinsip kerja ini berbeda dengan gula pabrik gula pada umumnya seperti pabrik gula PG yang ada di BUMN. Kami ini memang tidak memproses dari penggilingan tebu melainkan kami melakukan pemurnian dari gula kristal mentah atau *raw sugar* di mana waktu pendirian pabriknya juga sudah di secara lokasi kami tempatkan semuanya di pinggir laut yaitu kami membutuhkan Dermaga untuk melakukan pembongkaran bahan bakunya. Jadi terus terang ketika ada konsep untuk melakukan kewajiban pembangunan perkebunan tebu tidak bukan tidak lain ya harus membangun pabrik baru tidak mungkin melakukan di pabrik yang sama, namun kami anggota kami pada prinsipnya kami juga akan mengikuti apabila memang diminta kewajiban seperti ini hal demikian seperti Undang-Undang Perkebunan yang ada, kendala yang kita hadapi adalah sebenarnya lahan perkebunannya.

Kita dari tahun 2014 beberapa anggota kami sudah mencoba beberapa juga sudah ada yang berhasil, namun sampai sekarang kondisinya juga belum ada peningkatan Pak jadi ada 1, 2 yang berhasil tapi sampai sekarang belum ada peningkatan.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak. Nanti soal *roadmap* tingkat kemandirian swasembada pangan berbasis tebu itu penting dibahas tersendiri tapi kita *nggak* bisa 260 juta ini terus tergantung pada *raw sugar* apa *nggak* ngerti pernah *raw sugar* tuh *nggak* ada Pak. Pernah asosiasi gula AGRI ini kita kasih kuota *nggak* bisa cari Pak, pada saat harga *crude oil* waktu itu menembus diatas 100 semua hal yang menyangkut *crude* berubah energi Pak, kita kelabakan Pak sampai gula-gula konsumsi itu sampai gula industri yang yang waktu itu akhirnya juga *nggak* bisa mengadakan. Jadi harus

ada keberimbangan, kalau 100% gula konsumsi tergantung pada impor itu juga sangat mengkhawatirkan, tidak selalu situasi itu bisa impor *raw sugar* tuh berlangsung secara normal. Waktu *crude oil* tembus di atas 120 semua produk *food* menjadi energi nggak ada yang bisa kita beli waktu itu *raw sugar* Bapak masih ingat itu tahun berapa itu, akhirnya gula konsumsi harganya naik liar tak kendali karena diambil gula industri. Jadi konsep material *roadmap* itu tetap walaupun perpindahan tadi kita pahami menggeser dari basis *raw sugar* ke basis tebu itu perlu adanya suatu perencanaan tersendiri. Terakhir kita minta ke Asosiasi...

PERSATUAN PABRIK MONOSODIUM GLUMATE DAN GLUTAMIC ACID INDONESIA (P2MI):

Izin Pimpinan, izin Pimpinan. Pimpinan izin sebentar.

Kaitannya dengan yang *raw sugar* tadi kami dari P2MI mungkin tadi Pak Dodi baru bicara sedikit mengenai MSG-nya Pak. Tadi sempat disinggung sebetulnya kaitanya dengan optimalkan tetesnya Pak mohon di *slide* yang selanjutnya kami mohon diteruskan hanya cuma 5, 4 *slide* kami mohon untuk coba menyampaikan.

KETUA RAPAT:

Informasinya gimana?

PERSATUAN PABRIK MONOSODIUM GLUMATE DAN GLUTAMIC ACID INDONESIA (P2MI):

Mengenai tetes Pak, mengenai. Sebetulnya keinginan kami.

KETUA RAPAT:

Ini dari mana ini?

PERSATUAN PABRIK MONOSODIUM GLUMATE DAN GLUTAMIC ACID INDONESIA (P2MI):

Dari P2MI Pak. Ingin mengoptimalkan mengenai penggunaan molases dalam negerinya sebelum kita opsi berganti apa dengan (***suara tidak jelas***).

KETUA RAPAT:

Gimana sih kalau tetesnya dijual kemana sih Pak Asosiasi Pak?

ASOSIASI GULA RAFINASI INDONESIA (AGRI):

Sebentar mungkin sebelum dilanjutkan, tadi ada pertanyaan tentang molases Pak. Sebenarnya memang berbeda berbeda dengan pabrik gula yang proses dari tebu jadi karena memang tingkat efisiensi di pabrik gula rafinasi cukup tinggi memang hasil Tetes molases kita sedikit Pak *nggak* terlalu banyak tapi memang...

KETUA RAPAT:

Ini sedikit dijual kemana?

ASOSIASI GULA RAFINASI INDONESIA (AGRI):

Sebagian besar termasuk kepada teman-teman di perusahaan MSG Pak seperti kita Miwon ada *supply*, Cheil Jedang kita ada *supply* gitu Pak, tapi memang tidak sebanyak dengan pabrik gula ya yang itu Pak.

KETUA RAPAT:

Tebu. Ya silakan Pak.

PERSATUAN PABRIK MONOSODIUM GLUMATE DAN GLUTAMIC ACID INDONESIA (P2MI):

Mungkin bisa ditampilkan *slide* yang dari P2MI Pak. Jadi di data *slide* yang kedua di situ ada disampaikan mengenai harga harga impor dari MSG yang lebih jauh lebih rendah dari dalam negeri itu pukulan kedua yang ke buat kita. Terus pukulan yang selanjutnya buat kami MSG adalah dari sisi ketersediaan bahan baku, dari waktu ke waktu untuk bahan baku molases ini di sampai di tahun 2019 kemarin itu sudah 643.000 ton diekspor ke luar pada *slide* yang ke-4 kami di laporan itu ada. Jadi hampir 50% itu sudah diekspor ke luar negeri Pak, cukup miris dengan...

KETUA RAPAT:

Hanya untuk diekspor?

PERSATUAN PABRIK MONOSODIUM GLUMATE DAN GLUTAMIC ACID INDONESIA (P2MI):

Iya Pak.

KETUA RAPAT:

Untuk apa?

PERSATUAN PABRIK MONOSODIUM GLUMATE DAN GLUTAMIC ACID INDONESIA (P2MI):

Iya di ekspor untuk, kalau banyak ekspornya di area Asia itu ke Filipina dan Vietnam.

KETUA RAPAT:

Ya itu apa?

PERSATUAN PABRIK MONOSODIUM GLUMATE DAN GLUTAMIC ACID INDONESIA (P2MI):

Alkohol untuk produsen alkohol minuman banyaknya ke alkohol Pak minuman dan *feedmill*.

KETUA RAPAT:

Ini termasuk barang bebas atau barang yang diatur ya ekspornya ya?

PERSATUAN PABRIK MONOSODIUM GLUMATE DAN GLUTAMIC ACID INDONESIA (P2MI):

Termasuk barang bebas Pak.

KETUA RAPAT:

Oh barang bebas?

PERSATUAN PABRIK MONOSODIUM GLUMATE DAN GLUTAMIC ACID INDONESIA (P2MI):

Ya. Jadi dengan kondisi yang hanya sekitar 50% tadi mungkin dari AGRI sudah disampaikan. Memang *output* dari produk molases dari pabrik gula itu hanya sekitar 3 sampai 5% dari kapasitas sehingga kalau kami di Indonesia PG pabrik gula (***suara terputus-putus***) *output* molasesnya ya hanya 3 sampai 5%-nya otomatis dan itu dipakai secara bersama penggunaannya kami ada MSG, kemudian alkohol menggunakan itu. Alkohol turunannya karena aplikasinya ke kosmetik, kemudian ada aplikasi ke Farma, juga ke bio-ethanol, juga ada ke *feedmill* sehingga dengan sisa yang ada posisinya adalah kita berebutan Pak berebutan ya tidak sesuai dengan yang kebutuhan. Nah akibat dengan kondisi yang ini ya kemudian harganya di tahun 2000 pukulan kami selanjutnya adalah ini bahan baku utama kami harganya itu naik agar (***suara tidak jelas***).

KETUA RAPAT:

Harganya lebih rendah jual?

PERSATUAN PABRIK MONOSODIUM GLUMATE DAN GLUTAMIC ACID INDONESIA (P2MI):

Harganya untuk ekspor tentu saja karena kondisi US Dollar sekarang yang cukup baik, maka peluang ekspor akan lebih baik, pihak luar akan berani menyerap produk dari kita secara otomatis harga di lokal pun akan terkerek menjadi naik dan pukulan di 2020 adalah mengenai kebijakan dari tender PTPN memang mungkin ini secara tidak langsung, tapi PTPN adalah salah satu produsen terbesar dari PG.

KETUA RAPAT:

Oke, catat dulu itu Pak PTPN stop dulu.

PERSATUAN PABRIK MONOSODIUM GLUMATE DAN GLUTAMIC ACID INDONESIA (P2MI):

Produsen terbesar dari PG, harga yang terbentuk pada proses tender akan menjadi acuan dari harga yang molases yang ada di *market*. Jadi sebagai gambarannya untuk tender yang berjalan di tahun 2020 ini pada *slide* yang nomor 4 mungkin boleh dilihat selanjutnya slide ke-5 atau ke-6 ya disitu tren harganya di tahun ini itu naiknya hampir boleh dikata sampai 50 sampai 100% lebih itu pukulan berat buat kami. Di satu sisi harus berkompetisi dengan *market*, di sisi lain marketnya turun tapi persediaan bahan terbatas dan harganya tinggi. Nah kebijakan tendernya.

KETUA RAPAT:

Impornya dari apa sekarang, impornya impor untuk kebutuhan teman-teman di perusahaan Glutamic ini.

PERSATUAN PABRIK MONOSODIUM GLUMATE DAN GLUTAMIC ACID INDONESIA (P2MI):

Untuk impor relatif untuk molases sih sangat sulit Pak impor Pak karena sebetulnya dari sisi dari sumber dari luar juga tidak terlalu banyak sehingga agak sulit. Nah mungkin opsi yang tadi di sampaikan Pak Dodi adalah opsi alternatif untuk penggunaan *raw sugar* penggunaan *raw sugar* ya.

KETUA RAPAT:

Oh *raw sugar* bisa.

PERSATUAN PABRIK MONOSODIUM GLUMATE DAN GLUTAMIC ACID INDONESIA (P2MI):

Bisa menggantikan, tapi mungkin dengan keterbatasan juga dengan izinnnya yang harus kita coba ajukan.

KETUA RAPAT:

Oke, nanti kita undang bareng rapat sama Perindustrian, nanti beberapa persoalan yang kita kumpulkan dan kita hadirkan pada saat Rapat dengan Kementerian Perindustrian. Dari persoalan ini nanti beberapa Ketua-ketua atau Kepala-kepala Asosiasi kita undang.

PERSATUAN PABRIK MONOSODIUM GLUMATE DAN GLUTAMIC ACID INDONESIA (P2MI):

Iya poinnya intinya kebijakan tendernya Pak mohon untuk dapat di *review* karena itu yang memberikan potensi harga di apa molases di market menjadi lebih

tinggi karena kami pemegang tender itu harus ditambah harga premium. Kami mendapat produsen kami diberi ada proses tendernya itu ada dua tahap Pak, jadi yang pertama adalah tender untuk premium-nya untuk menentukan alokasi menentukan alokasi maka jika pemenang tender harganya itu nanti di ditambahkan dengan nilai premium-nya. Yang kedua adalah dengan mekanisme penentuan harga tender, harga tender harganya yang ditenderkan meliputi pesertanya adalah *user* dan *trader*.

KETUA RAPAT:

Yang di PTPN ya?

PERSATUAN PABRIK MONOSODIUM GLUMATE DAN GLUTAMIC ACID INDONESIA (P2MI):

Iya yang di PTPN *user* dan *trader*. Volume yang ditenderkan sebetulnya hanya sedikit 500-1000 ton tetapi hasil tender ini akan menjadi acuan untuk kontrak-kontrak dalam volume besar.

KETUA RAPAT:

Tapi cukup transparan nggak itu?

PERSATUAN PABRIK MONOSODIUM GLUMATE DAN GLUTAMIC ACID INDONESIA (P2MI):

Menurut saya sih tidak ya Pak karena dalam proses tendernya itu melakukan dua sampai tiga tahap, tahapnya itu memang secara *online* tetapi pada saat *bidding* harga pertama Pak pada saat tender itu pihak PTPN sudah menentukan target *price* yang akan dia buat. Jika di bawah maka akan di *challenge* untuk mengikuti harga itu, jika tidak tercapai maka tendernya batal. Diulang kembali berapa hari kemudian diulang kembali berapa hari kemudian sampai target yang diharapkan tercapai sehingga hanya trader-trader yang berani membeli dengan harga mahal yang akan menang dalam posisi tender volume kecil itu yang mereka mungkin punya bisnis mereka simpel saja yang penting ada margin bisa jual ke ekspor maka dia jual.

KETUA RAPAT:

Oh ke ekspor . Oke itu ke eksport, itu ke eksport.

PERSATUAN PABRIK MONOSODIUM GLUMATE DAN GLUTAMIC ACID INDONESIA (P2MI):

Iya di ekspor. Sedangkan kami yang pemegang volume harus mengikuti harga itu dan ditambah premium, premium-nya itu angkanya 8-10%.

KETUA RAPAT:

Oke Sekretariat. Cukup mas dicatat saja masalahnya, nanti kita undang secara khusus masalah ini dengan PTPN terkait dengan tender tetes.

PERSATUAN PABRIK MONOSODIUM GLUMATE DAN GLUTAMIC ACID INDONESIA (P2MI):

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Saudara sekalian kami ucapkan terima kasih.

F-PKS (RAFLI):

Ketua, sedikit Ketua. Rafli Ketua di sebelah kanan Ketua.

KETUA RAPAT:

Oh belum Pak, ini masih kami persilakan kawan-kawan untuk menyampaikan pedalaman. Saya ucapkan terima kasih kepada Asosiasi atau Perhimpunan dari industri-industri yang kita undang hari ini yang telah memaparkan berbagai informasi masalah yang ada. Selanjutnya kita akan masuk ke pedalaman, beberapa pertanyaan-pertanyaan informatif perlu kami sampaikan pada kawan-kawan supaya RDPU hari ini mendapatkan banyak informasi, banyak mendapatkan persoalan-persoalan yang ada untuk kita bawa ke Rapat Kerja dengan Kementerian. Yang sudah mendaftarkan, satu Pak I Nyoman, Pak Nyat Kadir, Ibu Nevi, Pak Hendrik, Pak Putu Supadma, dan tadi Pak Rafli ya, Pak Ramli ya Pak Ramli.

F-P.GERINDRA (KHILMI):

Daftar Ketua, Pak Khilmi.

KETUA RAPAT:

Pak Khilmi. Ya karena tadi agak monoton kita kasih dulu pak Rafli dulu yang agak ngaco ini kelihatannya, tapi menyenangkan.

ANGGOTA :

Pak, Pak ada yang kurang Pak Alkes belum Pak, ASPAKI Pak.

KETUA RAPAT:

Mohon maaf, mohon maaf ntar dulu. Ada lagi satu Alkes Asosiasi Produsen Alat Kesehatan (ASPAKI) kami persilakan Pak Tarya. *Mute*-nya Pak *mute*-nya, kami persilakan Pak.

ASOSIASI PRODUSEN ALAT KESEHATAN INDONESIA (ASPAKI):

Terima kasih Pak Pimpinan sidang Komisi VI. Ini mohon maaf kami nggak bisa hadir, tapi saya kira karena ini mendadak dan kami ada di luar kota jadi kami ikut secara *virtual*, jadi mohon maaf. Kami udah mengirim materi kemarin Pak Ketua, Apakah mau dishare yang disana atau kami *share* dari sini? bisa dilihat Pak Ketua?

Halo, halo suara saya kedengaran Pak? oke, kedengaran ya. Oke kami ada hanya 15 *slide* dan mungkin kami akan mempresentasikan secara cepat.

Jadi pertama terima kasih atas kesempatannya Asosiasi Alat Kesehatan diundang dalam acara ini mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semua. Jadi pertama kali diperkenalkan bahwa ASPAKI itu Asosiasi yang telah berdiri 21 tahun yang lalu ya, anggotanya hanya 123 dari seluruh industri yang terdaftar di Kementerian Kesehatan kira-kira 325, ini saya cepat aja. Visi-Misi *nggak* usah saya bacakan.

Oke, ini kira-kira figur industri alat kesehatan dalam negeri Pak Ketua. Jadi yang paling banyak anggota kami adalah *Hospital furniture* dari 300 industri mungkin kira-kira sekitar 40 adalah *Hospital furniture*. Jadi *Hospital furniture* kita membuat produk dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih seperti di meja operasi ya, jadi ini kapasitasnya sangat besar dan sudah mencukupi kebutuhan dalam negeri dan beberapa anggota kami sudah export juga ya.

Kemudian produk kami berikutnya masalah sphygmomanometer atau tensimeter dan stetoskop ini juga kapasitasnya sudah tinggi sekali ada 6 pabrik di Indonesia yang memproduksi alat seperti ini dan kapasitasnya sudah memenuhi kebutuhan dalam negeri, ini kondisi sebelum dan sesudah Covid sama Pak Ketua.

Kemudian seperti kita ketahui negara kita penghasil karet jadi industri *Gloves* itu juga ada sekitar 14 anggota, ini kebanyakan mereka juga ekspor. Nah ini 3 produk utama ini *Hospital furniture*, sphygmomanometer, dan sarung tangan itu semua sudah ekspor ya selain memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Kemudian produk lainnya yang Produk *electromedic* ini tidak begitu banyak karena seperti kita ketahui Indonesia tidak dikenal sebagai negara berteknologi tinggi, jadi industri kita fokus kepada industri teknologi rendah dan teknologi menengah.

Disposable ini barang habis pakai seperti jarum suntik, seperti urine bag, infuse set, masker, dan lain-lain. Nah ini yang karena Covid tadi *gloves* sama *disposable* ini luar biasa permintaannya berlipat-lipat sampai 700% sampai 1000% tapi tentunya tidak dinikmati oleh produk-produk lain yang tidak terkait dengan Covid.

Medical Apparels itu seperti APD kita semua tahu sering mendengar di media ini banyak berkembang karena Covid ini sekarang sudah tercatat di Kementerian Perindustrian sampai hampir 400 industri yang tadinya hanya sekitar 40 ya naik 1000%. Ini banyak UKM nih Pak Ketua ini terutama kalau kita lihat misalnya di daerah Pekalongan dimana di sana banyak industri-industri yang tadinya memang industri-industri batik sekarang banyak yang membuat APD sehingga ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah.

Kemudian barang-barang lain reagensia, anti septic seperti *rapid test*, nah ini kira-kira figur dari pada produk dalam negeri dan produk dalam negeri ini hanya memenuhi 10% kebutuhan belanja alat kesehatan di Indonesia sehingga 90% kebutuhan alat kesehatan masih kita impor Pak Ketua. Nah untuk itu kami berharap industri dalam negeri ini di *support* semaksimal mungkin dan kami dengan Kementerian Kesehatan sudah membuat *roadmap* sampai dengan tahun 2035 dan kita berharap tahun 2035 kira-kira 40% produk dalam negeri bisa dipenuhi oleh industri dalam negeri.

Jadi produksi dalam negeri itu sudah memenuhi standar-standar internasional Pak Ketua, jadi ada ISO ya dan lain-lain ini nanti bisa dilihat, ada 6131 izin edar alat kesehatan di dalam negeri. Jadi karena alat kesehatan itu sesederhana apapun itu perlu izin edar ya dan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, jadi sampai sekarang sudah tercatat ada 6131. Harga kita juga cukup bersaing kecuali kalau

bersaing sama produk China tapi selebihnya harga kita cukup bersaing dan kapasitas *nggak* usah diragukan lagi kualitasnya *nggak* diragukan lagi di atas sudah banyak yang bersertifikat internasional ya.

Nah ini kira-kira seperti ini produk kami Pak Ketua jadi Hospital furniture, *wheelchair* ini semua kita sudah kita ekspor, kapasitas industri kita kira-kira ada 174.000 per tahun sedangkan kebutuhan dalam negeri hanya 125.000 jadi ini sudah *overcapacity* sehingga sewajarnya untuk produk-produk impor untuk *Hospital furniture* itu dikasih dikasih hambatan atau dipersulit sedikit lah walaupun tidak ditutup Pak Ketua. Nah ini untuk tadi saya bilang tensimeter, stetoskop ini semua sudah diproduksi di dalam negeri dan kapasitasnya sudah melebihi kebutuhan di dalam negeri.

Kemudian jarum suntik, jarum suntik itu kebutuhan dalam negeri hanya 520 juta sedangkan kapasitas sudah 700 mendekati 800 juta, jadi ini juga mohon impornya dihambat. Begitu juga untuk sarung tangan dan masker sekarang gara-gara Covid industri masker sudah meningkat dan sekarang suka *overcapacity* dan ini kita sekarang harus bersaing untuk pasar ekspor dimana walaupun sudah *overcapacity* barang impor juga masih masuk ke dalam negeri dengan mudah Pak Ketua.

Ini untuk IVD dimana kita ada 73 perusahaan yang sudah memproduksi *rapid test* tapi *rapid test*-nya waktu itu belum memproduksi Covid tetapi sekarang mereka sudah memproduksi, jadi *alhamdulillah* ini bisa berpartisipasi. Kemudian implant untuk ortopedi patah tulang dan lain-lain ini juga industrinya sudah banyak.

Nah jadi kalau ngelihat dengan Covid-19 industri masker itu sebelum Covid itu ada 26 setelah Covid ada 170 industri, kemudian medical apparels dulu cuma ada 7 sekarang ada 269, sarung tangan dari 14 menjadi 32, ventilator dari 2 menjadi 7, *rapid test* dari 3 menjadi 9, dan *hand sanitizer* dari 45 jadi 400. Jadi ini Kementerian Kesehatan sudah memberikan relaksasi terhadap perizinan dengan *one day service* mereka memberikan perizinan dalam untuk kurun waktu 1 tahun dan nanti setelah tahun 1 tahun silakan diperpanjang dan dipenuhi persyaratan-persyaratan yang belum terpenuhi sekarang. Jadi nah sekarang situasinya seperti ini Pak Ketua, jadi mengenai *Medical Grade Surgical Gown* itu kebutuhan hanya 3 juta ya sedangkan kapasitas 112 juta, *Surgical Mask* kebutuhan 129 juta sedangkan kapasitas produksi hampir 3 miliar ya, *Medical Coverall* yang kebutuhannya 8,5 sedangkan kapasitas sudah 319. Nah disini kita perlu mewaspadaai Pak Ketua di mana begitu Covid selesai ini akan banyak barang yang *idle* kapasitas produksi yang *idle* dan di lain pihak produksi dalam negeri produksi impor juga masih masuk.

Jadi ada beberapa harapan saya sampaikan, nomor satu ya tentunya kita sama ingin menjadi pemain di dalam Negeri.

Kedua, nah ini produk dalam negeri ini seringkali kita tidak mendapatkan *privilege* untuk bisa tayang di *e-katalog*. Jadi kita udah capek-capek investasi miliaran tapi kita tidak masuk *e-katalog* sedangkan belanja alat kesehatan melalui *e-katalog* itu minimal 60% pasar itu dari pasar pemerintah, jadi saya kira *e-katalog* tolong diprioritaskan untuk produk dalam negeri alat kesehatan.

Kemudian tentunya kita sekarang harus meningkatkan ekspor dengan produk-produk yang terkait Covid menjadi *over supply*. Dan yang terakhir Pak Ketua ini sangat penting saya kiraantisipasi proteksi produk dalam negeri terhadap produk-produk impor *pasca* Covid-19 ya. Kita memang belum tahu kapan Covid-19 selesai, tapi saya membayangkan tadi tiga produk yang terkait Covid begitu Covid selesai kita akan ada arus balik produk dari China yang harganya akan sangat murah sekali, nah ini bagaimana mengantisipasi situasi yang diprediksi bisa terjadi seperti ini.

Jadi mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan Pak Ketua, selebihnya nanti kami siap untuk mengikuti acara sesi tanya jawab. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dan saya kira kalimat terakhir antisipasi proteksi produk dalam negeri terhadap produk impor masa Covid ini menjadi perhatian semua dan ini salah satu hal yang mengapa kita adakan rapat hari ini dengan berbagai *stakeholder* karena *pasca* Covid nanti akan ada ledakan *oversupply* di negara-negara produsen yang sangat mengancam produk-produk nasional kita kalau itu tidak ada apa ya semacam kebijakan-kebijakan *barrier* yang tentunya di beberapa negara yang sudah kita *footage* memang ada persoalan untuk menahan secara langsung. Tapi pengaturan bentuk pengaturan-pengaturan yang bisa memperlambat proses masuknya barang-barang *pasca* Covid ini yang penting. Bagaimana kita melihat berbagai hal pangsa-pangsa daya saing dengan *cost production* yang terus kita kita hitung antara hal yang kita hitung terutama soal bahan bakar, soal gas, soal listrik, soal bahan baku dan beberapa kebijakan-kebijakan fiskal lainnya.

Ini yang Komisi VI komit jangan sampai *pasca* Covid nanti kita menjadi bangsa yang hanya menjadi konsumen dan mematikan cara berpikir bagaimana produk-produk yang memang kita mampu ini harus bersiap leading di negeri sendiri. Karena setelah waktu Covid kan juga akhirnya nasional *interest* lebih pada dikedepankan, ventilator kan juga nggak bebas waktu kita mencari ventilator, waktu kita cari vitamin C kan juga tidak mudah bahan bakunya, waktu cari masker kan waktu itu kita juga tidak langsung dapat. Nah sistem pasar juga tidak menjamin dalam situasi-situasi pandemi kemarin dan itu membangkitkan spirit kita untuk berdaulat dalam segala bidang. Kami persilakan tetap Pak Rafli, kok hilang. Ke Pak Nyoman.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Pimpinan beserta seluruh peserta RDP, saya singkat saja.

Pertama untuk PHRI Pak saya bertanya ini untuk PHRI. Seandainya semua yang Bapak sampaikan tadi kebutuhannya tentang relaksasi, tentang diskon, tentang stimulus, tentang semua hal yang dibutuhkan fasilitas oleh para pengusaha hotel dan restoran itu diberikan oleh Pemerintah. Namun ketika negara-negara masih belum membolehkan warga negaranya untuk berpergian, berwisata ke Indonesia, apakah fasilitas yang tadi akan diberikan atau diberikan oleh Pemerintah itu menjamin usaha akan bisa tumbuh dan bangkit Pak karena faktor orang yang akan mensubsidi dari hasil mereka datang itu tidak datang ke Indonesia. Contoh misalnya wisatawan Australia yang dianggap wisata yang paling independen kadang-kadang tidak memperhatikan anjuran negaranya bahkan berpergian pun mereka tidak pernah hiraukan yang itu yang pengalaman kami yang ada di Bali, tapi hari ini mereka tunduk Pak. Jadi ketika diancam kalau kamu datang ke Indonesia datang berpergian ke luar negeri berwisata akhirnya kamu sakit asuransinya tidak kami bayarkan,

akhirnya tidak jadi mereka datang ke berwisata karena faktor asuransinya tidak dibayarkan oleh negaranya. Yang kedua China itu berkaitan dengan konsolidasi ekonomi di negaranya, dia melarang juga warga negaranya datang ke berpergian ke luar negeri. Nah jika Pemerintah memberikan pun fasilitas yang Bapak sampaikan tadi, termasuk juga urusan listrik nyala itu kalau tidak ada wisatawan yang datang apa bisa Pak di kembangkan atau bangkit usahanya yang Bapak miliki, itu satu.

Yang kedua Pak, ini ada memang betul-betul urusan lapangannya sangat-sangat dilematis ya. Di satu sisi ada PHK, selanjutnya karyawan tidak lagi mendapatkan BPJS baik kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah pusat memberikan BLT salah satu syaratnya harus BPJS-nya itu aktif khusus Ketenagakerjaannya harus aktif akhirnya mereka tidak dapat Pak tidak dapat ya itu satu. Terus yang kedua ada yang masih berstatus pegawai karya pekerja tapi di rumahkan BPJS Ketenagakerjaannya tidak dilanjutkan pembayarannya oleh Hotel atau restorannya, mereka juga tidak dapat Pak padahal statusnya masih masih pekerja statusnya karena baru di rumahkan, belum di PHK.

Nah ini Pimpinan barangkali perlu dicarikan solusinya ini terutama sekali yang yang belum ter-PHK atau kalau memang memungkinkan yang ter-PHK karena pernah mereka aktif punya BPJS karena situasi pandemi akhirnya mereka tidak mendapatkan apa namanya tidak mendapatkan BLT, syaratnya tidak terpenuhi. Oleh karena itu seharusnya Pimpinan saya ingin menyampaikan agar mereka tetap dapat BLT walaupun mereka sudah ter-PHK bahwa mereka pernah bekerja di sebuah perusahaan yang akhirnya karena pandemi di PHK. Kira-kira itu Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Ibu Nevi.

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Ibu Anggota Dewan Komisi VI yang kami hormati, dan Mitra kami dan rekan-rekan kita,

Sebetulnya kalau kita lihat Pak sekarang Bapak-bapak dari ASMINDO, P2MI dan sebagainya karena ini sedang rugi tapi Bapak-bapak juga ingat bahwa pernah untung ya. Jadi apa yang Bapak-bapak sampaikan itu jangan nanti keuntungan itu sama dengan ketika normal, keuntungan itu ya tetap juga harus bagaimana keuntungan di masa Covid gitu. Misalnya keuntungan di normal itu Bapak berapa persen nanti di Covid 10% cukup yang penting *break even point* segala macam. Ya itu sebagai satu pandangan yang harus kita pahami bahwa di masa pandemi ini istilahnya kita untungnya jangan sama gitu dengan di masa normal ya sehingga memang harus ada kebijakan-kebijakan dari perusahaan-perusahaan yang harus *extra ordinary* juga ya karena kita sedang di masa *extra ordinary*, jadi kalau kita perusahaan nih ada untung atau rugi lah Pak ya begitu kira-kira ya.

Jadi Pak ini ada berapa hal sebetulnya ini saya juga menyikapi dari apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak Ibu semua karena Bapak, Ibu sudah Bapak-bapak sudah menjadi tamu kita pada hari ini yaitu yang pertama PHRI Pak. Ya PHRI tadi

disampaikan bila ada bantuan dari Pemerintah sejauh mana Bapak-bapak mitra telah berkomunikasi dengan mitra-mitra PHRI untuk mendapatkan relaksasi kebijakan dan bagaimana tanggapan dari mitra tersebut. Jadi kan tadi ada mau ke PLN, BPJS, Bank Penyelenggara PEN itu kita minta laporannya Pak ya jadi bagaimana tanggapan dari mitra-mitra tersebut dan kita minta rincinya Pak.

Lalu terus bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan Pak di Hotel dan Restoran karena kalau kita lihat masih longgar sehingga memang tadi kan disebutkan oleh pihak PHRI interaksi kunci masalah PHRI bisa bisa berkembang ya bisa tumbuh lagi, tapi kalau ternyata protokol kesehatannya kurang bisa dijalankan tentu masyarakat juga takut dan tentu sanksinya juga harus tegas Pak dan bagaimana pembinaan PHRI terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Lalu Pak yang ketiga untuk PHRI kita juga harus punya program yang untuk bertahan di masa pandemi ini Pak ya mungkin kan ada paket isolasi mandiri 10, 14 hari dengan harga menarik bagi warga OTG Positif Covid. Apalagi saat ini Pemerintah juga minta apa isolasi tidak isolasi dirumah dan rumah juga rumah sakit sudah kewalahan ya ini sebagai pemikiran *out of the box* Pak untuk hotel.

Lalu yang keempat untuk PHRI dengan tadi disampaikan oleh Pak Nyoman juga sekarang ini kita kasusnya sudah 3000-an Pak kita nggak tahu ya di masa akan datang berapa lagi sehingga kita pastikan Bapak banyak sekali nanti akan *lockdown* lagi dari berbagai negara di sekitar kita tentu bagaimana keberlangsungan usaha hotel dan restoran dan berapa lama bisa bertahan ya. Jadi kita berpikirkannya setahun 2 tahun ke depan tadi Bapak sampaikan saya pikir masih terlalu ini ya terlalu masih belum belum dipikirkan setahun, 2 tahun, 3 tahun depan ini akan pulih lama ya untuk PHRI. Itu Pak untuk PHRI.

Untuk ASMINDO Pak, ini kita sangat mendukung sekali untuk produk dalam negeri apalagi cinta produk dalam negeri dan tentu kita juga ingin ekspor dan kami mendukung juga bahwa untuk *furniture* ini kita mengambil apa namanya proyek-proyek dari pemerintah begitu ya karena memang saat ini Pemerintah yang yang jalan ya kita harapkan Pemerintah tidak menggunakan produk-produk impor lagi. Untuk itu dari pihak ASMINDO juga harus ber apa namanya bersuara kencang Pak untuk masalah ini tentu nanti kami dari DPR juga memberikan jalan bagi ASMINDO mendapatkan proyek-proyek dari Pemerintah.

Dan tadi disampaikan dan 12 pelaku usaha yang belum dapat bantuan. Ini juga ada di pelajaran Pak ya 12% ini kan ada yang tidak dapat bantuan bisa jadi memang dia tidak punya akses, tapi bisa jadi memang dia *success story* Pak gitu ya ini juga Bapak harus sampaikan bisa jadi contoh yang lain. Tapi juga Pak penggunaan teknologi digital Pak untuk pemasaran produk, rasanya memang kita untuk di zaman pandemi ini kita tidak bisa lagi untuk berpikir apa namanya *event-event offline* ya Pak ya kita harus memikirkan bagaimana pemasaran kita harus *online* juga ya dan sekarang sudah ada beberapa ya *event organizer* yang memberikan peluang kita untuk untuk pemasaran *online* baik luar negeri maupun dalam negeri.

Lalu ASPAKI tadi 10% kebutuhan kita terpenuhi di dalam negeri Pak ya dari produk dalam negeri 90% produk luar dari luar negeri. Jadi ini kita melihat realita di lapangan sebetulnya nih petugas kesehatan kita itu tenaga kesehatan kita itu bukannya sepertinya mencintai produk-produk luar negeri ya tidak mau menggunakan alat kesehatan hasil produk produksi anak bangsa ya mungkin bisa jadi dari segi kualitas atau yang lainnya. Ini produk luar negeri lebih lebih apa namanya ya lebih mumpuni gitu ya lebih aman dipakai di dunia kesehatan mungkin bisa jadi analisa kita bagaimana kenapa seperti itu kejadiannya, itu Pak yang kedua.

Lalu untuk tadi *roadmap* ya kita sangat menunggu bagaimana ke depan kita agar tidak tergantung impor peralatan kesehatan.

Untuk AGRI Pak, untuk AGRI. Kita tahu bahwa AGRI ini adalah importir ya Pak ya importir gula dan ini kita ingin kita tidak bisa menjadi negara yang tergantung ya apa gula pada luar negeri. Apakah ada peluang Indonesia untuk Swasembada pada komoditas gula ini ya ini kita berikan analisa minta kita minta analisisnya. Lalu untuk pengolahan dan pemasaran produk Perikanan Indonesia Pak. Kita lihat bahwa Indonesia tadi sudah disampaikan sebetulnya banyak kita masih tertinggal jauh untuk untuk ekspor Pak ya kita baru sekitar USD 5 milyar dan kita tahu bahwa *seafood* ini adalah makanan yang paling mahal dari luar negeri, mungkin kita makan *seafood* di dalam negeri seperti orang Singapura pergi ke Batam itu dia itu hanya untuk makan *seafood* ya begitu dia hanya naik Ferry 20 menit makan *seafood*-nya jauh lebih murah ya, coba kita makan *seafood* di Singapura mahalnya minta ampun. Untuk itu jadi pelajaran Pak ya buat kita semua padahal kita *dua pertiga* lautan adalah lautan tentu kaya akan ikan tadi disampaikan ya memang dukungan ini kita harus bersuara kencang Pak dari DPR, Pemerintah apa yang harus kita lakukan. Dan terus juga untuk UMKM Pak kita juga harus ada pemihakan pada UMKM untuk budidaya. Jadi intinya adalah bagaimana program-program kita untuk perikanan budidaya ini harus dikembangkan di kemudian hari.

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan Pak Nyat Kadir.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Daftar Pimpinan daftar.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Yang terhormat Pimpinan dan Bapak-bapak Ibu Anggota DPR Komisi VI,
Bapak-bapak Ketua Asosiasi dari berbagai kalangan,

Saya kira kami sangat terkesan dengan pemaparan Bapak-bapak ya banyak pengetahuan yang kami dapat karena ini memang pelaku ya kalau kita nih teori banyak, Bapak-bapak ini sudah menghadapi pahit manisnya pahit manisnya, kalau masa Covid ini ya ada pahit lah banyak pahitnya itu.

Kalau Asosiasi Pengalengan tadi makanan kaleng ya Pak ini sudah akrab sekali dengan saya kalau saya tiap hampir hari tiap pagi ini ada ikan sarden, kemudian ubi ya di rumah di Batam saya dari Kepulauan Riau Pak NasDem maupun di rumah di sini nasi goreng dengan ikan sarden itu udah, tapi bagi orang kampung ini ikan kaleng ini masih barang langka mahal ya nah ini. Tapi ada keluhan-keluhan Bapak tadi kita mendukung sekali ya tarif masuk ya impor bahan baku ya Bansos ini

yang menarik nih ya belum ada kepastian dari Pemerintah tentang kebutuhan ini Pak Ketua Pimpinan dulu banyak juga yang waktu hebohnya Bansos itu kalau sekarang nih sudah mulai berkurang ya, ada yang mau masukan komponen ikan itu bagaimana di samping beras ada ikan nah ikan pilihannya memang ikan kaleng.

Nah kau sekarang kalau Bapak masuk Bansos ini ya di KPM Pak PKH mungkin lebih bagus itu PKH (Keluarga Penerima Manfaat) itu yang 27 juta itu ya 24 juta kalau tak salah disitu kan hanya beli beras itu uang yang di itu mungkin ditambah komponen itu, wah ini bisa membludak ini apa ini industri pengalengan ikan ini. Kalau sekarang nih Bansos ini udah udah pada lewat hampir dah mulai sedikit lah ini bantuan-bantuan Bansos ini udah banyak tersalurkan ke depan maksudnya Keluarga Penerima Manfaat itu ada PKH ini panjang ceritanya lama ini menurunkan kemiskinan itu bukan gampang ya, paling 1% setiap tahun lama itu, nah ini bisa Bapak manfaatkan. Tapi memang kepastian harga tadi ya harga ada yang nawar Rp4000 ya Pak padahal ikan kaleng itu satu 1 kaleng itu berapa sarden?

KETUA ASOSIASI PENGALENGAN IKAN INDONESIA (APIKI):

Beratnya paling rendah 155 gram termasuk saos.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Harganya?

KETUA ASOSIASI PENGALENGAN IKAN INDONESIA (APIKI):

Harga jual kalau supermarket itu sekarang yang premium itu di atas Rp7.500.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Berapa?

KETUA ASOSIASI PENGALENGAN IKAN INDONESIA (APIKI):

Di atas Rp7.500.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Rp7.500 kalau nawar Rp4.000 nggak lepas modal.

KETUA ASOSIASI PENGALENGAN IKAN INDONESIA (APIKI):

Ikannya saja sudah Rp11.000 sekilo Pak.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Iya. Jadi ini yang paling menarik menurut saya permasalahan lokal itu sudah 70% ya dan ini kalau dibutuh dimasukkan ke program Bansos ini menarik sekali ini produksi Bapak bisa lebih tinggi dan menurut saya sulit untuk memenuhinya itu.

Hotel ya yang tidak semua dapat kami anu kan hotel ini ada beberapa catatan tadi ya Pak Patra tadi sudah Parta sudah Pak Parta sudah menyinggung. Ini menurut

saya masih sulit ya kalau untuk kebutuhan hotel nih ada hubungannya dengan pariwisata ya semuanya di dunia ini kan termasuk Thailand itu tinggal berapa persen ya sudah menurun 80% ya sekitar 70% dan Korsel kalau kita baca hari ini itu menurun drastis ya hidupnya dari pariwisata Thailand menumpuk. Ada beberapa penyebab turunnya permintaan pasar ini 1, 2, 3 regulasi, pembatasan, PSBB, dan segala macam, kekhawatiran masyarakat, yang ketiga nah ini berhubungan dengan transportasi ini Pak kalau masih sulit transportasi orang tak akan bepergian ya. Misalnya *rapid test* ini kalau *swab* sudah sudahlah sudah ditinggalkan tinggal *rapid test*, *rapid test* ini paling murah Rp150.000 *cost*-nya bertambah untuk penerbangan ya penerbangan ini dan ini ada yang mengusulkan *ndak* usah lah kita hilangkan aja *rapid test* ini bergerak semua ini penerbangan bertambah jumlahnya ya mungkin sudah diatas 50% akan diatur 50% tapi protokol kesehatan nih hanya penerapan produk kesehatan aja. Ini ada permintaan dari masyarakat ini apa bisa atau tidak tak tahu *rapid test* itu dibuang, *swab* dibuang tinggal lagi menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, ada beberapa negara yang sudah mencoba itu ya di beberapa negara sudah meninggalkan ada cuma apa itu suhu lah ya tapi kita *nggak* bisa kayaknya. Nah ini selama ini masih mengganjal masih ada syarat-syarat seperti ini saya yakin lama ini buat tumbuh Pak karena hotel dengan industri penerbangan yang sangat erat hubungannya.

Banyak lagi sebenarnya yang ingin saya sampaikan kawan-kawan nanti akan menyampaikan yang lain. Saya kira cukup Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ke kiri Pak Hendrik.

F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Ibu Anggota Komisi VI, dan
Para Pimpinan Asosiasi dan Perhimpunan peserta Rapat Dengar Pendapat yang
saya hormati,

Selamat siang,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan kalau hari ini pertanyaan saya agak banyak itu karena saya sudah rindu menggunakan mikrofon Komisi VI Pimpinan. Ya perkenalkan saya Hendrik Lewerissa dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Maluku Pak, penting saya menekankan Maluku karena pertanyaannya nih relevan dengan sektor perikanan.

Jadi saya setuju dengan *statement* Bapak tadi bahwa memang kita adalah negara maritim kalau industri perikanan itu lebih bertumbuh di negara lain dan bukan di Indonesia ini kan suatu fakta yang sangat paradoks, suatu kondisi yang sangat

ironis. Nah konstruksi berpikir yang sama sebenarnya saya mau bawa juga dalam konteks Maluku sebenarnya, karena apa? Karena kita tahu bahwa 30% lebih *supplier* kebutuhan ikan nasional itu berasal dari wilayah-wilayah penangkapan di perairan Maluku baik wilayah penangkapan Laut Banda, Seram, maupun Arafura benar kan Pak ya gitu. Tapi sekali lagi paradoksnya adalah tidak ada industri perikanan di sana, jangan *nggak* usah yang berat-berat pengalengan ikan saja tidak ada di sana. Saya mau minta jawaban jujur dari Bapak-bapak sebagai Asosiasi Industri Perikanan Indonesia ini kira-kira apa sih kendalanya sih, Apakah membangun industri perikanan di sana khususnya misalnya pabrik pengalengan ikan di sana di Maluku, Apakah dari sisi keekonomian dianggap tidak *visible* sehingga tidak dibangun di sana gitu. Apa kendalanya Pak tolong sampaikan kepada saya sebagai wakil rakyat Maluku supaya saya bisa sampaikan juga kepada Pemerintah daerah di sana untuk menemukan solusinya kalau ada kendala dan jika kendala itu sesuatu yang bisa di atasi masalahnya. Saya kira ini tanggung jawab politik saya untuk menyampaikan pertanyaan ini kepada Bapak-bapak dalam forum yang terhormat ini.

Lalu Pak yang kedua Pak soal dari AP5I saya juga agak kaget juga mendengar tadi masalah salah satu masalahnya adalah kekurangan *raw material* atau bahan baku. Pak saya mau kasih testimoni buat Bapak-bapak kalau musim tangkap ikan Cakalang, Ikan Tude, ikan Tuna itu di perairan Maluku dan karena keterbatasan atau kurangnya *cold storage* mengawetkannya itu ikan-ikan tuh dikubur dalam jumlah ton Pak dikubur dalam jumlah ton di pesisir pantai ton-ton ikan itu dikubur di sana gitu loh. Jadi kalau ada keluhan soal *shortest of raw material* itu sesuatu yang menurut saya ini juga ironis juga apa sih yang sedang terjadi di negeri ini gitu, tidak mungkin kita kekurangan *raw material* hanya untuk satu produk apa industri perikanan karena memang kita negara maritim garis pantai kita terpanjang di dunia, potensi perikanan kita luar biasa baik perikanan tangkap apalagi perikanan budidaya. Jadi saya kira itu harus menjadi apa ya saya minta klarifikasi soal soal pernyataan yang itu Pak.

Yang berikut terkait dengan usaha *furniture* dan *craft* Indonesia. Pimpinan saya menyampaikan bahwa memang dalam pandemi Covid-19 ini kan kita semua menjadi tersadar bangsa ini sadar bahwa selama ini kita memang sangat tergantung kepada impor ya. Termasuk misalnya bayangkan untuk produk-produk *furniture* ya ngobrol saja minta maaf nih Pak masih mendominasi produk-produk impor di kantor-kantor Kementerian dan Lembaga kita. Usul konkret saya Pimpinan kepada Pimpinan Komisi VI mungkin untuk mitra kerja Komisi VI baik itu Kementerian maupun Lembaga khusus untuk pengadaan *Furniture* atau *Craft* (***suara tidak jelas***) lah, bisa *nggak* ada satu kebijakan untuk lebih memprioritaskan pengadaan produk *Furniture* dan *Craft* nasional karena memang kita harus bertahan menghadapi menghadapi kompetisi dunia yang sangat apa yang sangat keras menghadapi pandemi dengan implikasinya yang sangat-sangat ekstrem. Kalau kita tidak menggunakan produk nasional kita menggunakan produk asing kan dimana keberpihakan kita itu? Karena hanya lewat satu satu instrumen kebijakan saja selesai itu kalau Mitra dan Lembaga Pemerintah mau menggunakan *Furniture* atau *Craft* dengan lebih memprioritaskan kepada sektor produksi nasional. Kan kita tahu betul ini produk-produk UMKM-UMKM ini menyelamatkan bangsa kita, 60% kontribusi PDB Indonesia itu berasal dari sektor UMKM, 97% serapan Tenaga Kerja Indonesia itu berasal dari UMKM masa untuk pengadaan barang pengadaan jasa

untuk *furniture* dan *craft* kita masih menggunakan IKEA dan produk-produk impor lainnya ini kan sesuatu yang sekali lagi sangat paradoks bagi kita.

Saya kira Pimpinan itu beberapa catatan saya.
Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Shalom.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Putu Supadma. Oh Pak Rafli dulu, Pak Rafli.

F-PKS (RAFLI):

Baik.

Terima kasih Pimpinan yang terhormat,
Teman-teman Anggota semua,
Teman-teman asosiasi.

Terima kasih atas waktunya.

Saya hanya ingin menyampaikan juga seperti Pak Hendrik sampaikan tadi bagaimana potensi perikanan di Aceh itu sangat luar biasa ya. Ini yang harus menjadi konsentrasi kita, apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi rintangan Bapak kalau di daerah ya saya bisa bantu. Potensi perikanan kita luar biasa itu Pantai Barat-Selatan, Pantai Timur-Utara ya ayolah kita waktu masa persis kayak Pak Hendrik bilang waktu masa dapat rezeki banyak itu kadang-kadang dibuang ikannya dibuang Pak ke laut kayak ikan Tongkol atau Cakalang itu lah yang kecil-kecil atau segala macamnya itu ya sarden gitu ya itu pada dibuang oleh masyarakat kasihan banget. Jadi saya ingin menyampaikan apa yang kalau memang di sana itu ada prospek segala macam ya saya bisa bantu Bapak nanti ke sana saya ingin menyampaikan itu saja.

Kemudian terkait dengan ingin saya sampaikan juga kebutuhan gula untuk industri ya, idealnya menurut saya di Aceh tuh kita harus bangun 1 pabrik rafinasi. Contoh ada yang namanya sirup Cap Patung yang dulunya itu di Aceh, tapi sekarang pindah ke Medan karena pabrik rafinasi itu yang ada di Medan padahal kalau kita lihat strategis posisi letak kan dekat sekali kalau kita mau ambil dari mana ini *raw sugar*-nya atau segala macam. Nah ini kita bangun Pak di Aceh wabil khusus untuk Aceh, Bapak nggak usah takut dengan keamanan segala macam. Saya Rafli dari PKS Pak, saya Rafli dari PKS saya ingin menyampaikan ini penting sekali Pak jadi kalau ini kita bangun ada kemandirian daerah untuk menompang keberadaan negeri kita yang besar ini nah itu. Jadi bolu dan makanan-makanan lain itu tuh cuma di Medan Pak jadi padahal di Aceh kan dekat sekali jadi kasihan banget, kalau dulu kita ada pabrik gula Cadbury waktu zaman Orde Baru ya Pak ya tapi sekarang kan sudah tidak ada lagi. Kebutuhan gula di Aceh itu gawat, tadi sejuta warung kopi istilahnya itu Pak betul kan, semua orang Aceh itu ngopi dan ngobrol itu aja kebiasaannya di sana. Jadi itu pertimbangan Pak, coba nanti kita komunikasi Pak ya.

Pengalengan ikan dan segala macam itu wilayah Pantai Barat-Selatan itu luar biasa Pak kalau ada regulasi dan segala macam yang ininya kita tinggal komunikasi nanti dengan Ketua dengan Pemerintah di sini. Itu saja Ketua yang ingin saya sampaikan, kita saya minta nanti kita bisa berkomunikasi lanjut Pak. Saya harap di Aceh kita bisa buka hal-hal yang prospek tentang wilayah kerja Bapak.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan Pak Putu.

F-PD (PUTU SUPADMA RUDANA, MBA):

Terima kasih Pak Aria Bima.

Pimpinan Komisi VI dan Anggota Komisi VI yang saya hormati dan banggakan, serta Rekan-rekan dari Asosiasi yang berkesempatan hadir pada saat ini baik secara fisik dan virtual,

Sebetulnya ini hari ini kita mendapat banyak sekali ini karena ada 6 Asosiasi yang hadir, saya tadi mencatat dari pariwisata, dari perikanan baik pengalengan ikan atau yang beku tadi, juga kesehatan, permebelan, ada MSG, ada gula kristal rafinasi ini banyak sekali Pak Ketua Pimpinan. Tapi prinsipnya mungkin saya ingin memberikan gambaran kita sudah mendengar aspirasi mereka pada masa pandemi ini memang begitu berat industri kita hampir semua terpukul, tapi kalau saya lihat di sini ada dua mungkin yang bisa paling tidak bertahan atau mungkin bisa naik gitu Industri Kesehatan alat-alat kesehatan, juga tadi yang berhubungan dengan industri pangan atau gula rafinasi itu makanan dan minuman. Tapi yang paling terpukul memang kondisinya yang hotel dan restoran, juga di dalamnya **(suara tidak jelas)** ada juga lembaga pendidikan.

Saya ini Putu Supadma Rudana Dapilnya Bali sama dengan Pak Nyoman Parta. Dan memang kita tahu Pak pasti pariwisata ini berat sekali, tapi sebelum saya ke pariwisata mungkin saya masuk ke *furniture* atau mebel dulu dari Bapak Wakil Ketua keanggotaan ya Pak ya kayaknya paham sekali tadi ininya bahannya. Satu hal Pak, kami sependapat bahwa apa produk produksi dalam negeri ini harus diberi ruang menjadi tuan rumah di negeri sendiri baik masuk ke dalam apa K/L tadi Pak Kementerian Lembaga dan juga yang lainnya karena Kementerian Lembaga ini pembelian barangnya banyak sekali, renovasinya besar sekali di Kementerian dan Lembaga. Tentu apa yang Bapak ingin tadi itu juga sejalan dengan kami karena kami di sini juga berada dengan Bapak-bapak, kami adalah wakil dari pada masyarakat wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi dan akhirnya manfaatnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah *furniture* itu Pak kita kawal betul ke depan kita berharap ada satu komitmen dari Pemerintah bahkan Presiden menekankan kembali akan pentingnya bagaimana *furniture* dalam negeri produk dalam negeri itu untuk dikonsumsi dan digunakan untuk diri sendiri. Dalam masa pandemi ini yang penting adalah bagaimana kita mempertahankan ketahanan kita ketahanan tadi industri *furniture* kita, ketahanan dalam hubungan nanti

kepariwisataan juga ada disini, ketahanan kita untuk alat-alat kesehatan juga. Nah paling tidak tadi Pak jelas untuk *furniture* kita akan mendorong, jadi Pimpinan kita harus *mapping* semua permasalahan tadi dengan Mitra yang kita miliki di samping Mitra-mitra Bapak mungkin yang ada di Komisi lainnya. Misalnya PHRI saya lihat di Komisi X juga lebih banyak Pak karena di situ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif-nya, kalau Perikanan juga di Komisi IV mungkin, nah tapi intinya untuk *furniture* itu.

Untuk yang lainnya ya Pak mungkin masuk ke Perikanan yang tadi memang saya ingin masuk dari sisi memang kita ketahui Pak kita berlimpah tadi Pak Hendrik menyampaikan betul sekali bahwa kita berlimpah akan kekayaan laut kita salah satunya pasti dalam hal ini *seafood* kita yang berlimpah. Nah memang bagaimana ini ke depan kita juga berharap baik dari Bapak sendiri mengenai tadi berhubungan dengan benih atau apapun ada satu ke depan dipastikan kembali agar betul-betul industri ini ataupun Asosiasi ini juga mendapatkan solusi yang terbaik sehingga betul-betul kita di Komisi VI bisa memperjuangkan hal itu dan akhirnya menemukan *win-win solution* bagi berbagai pihak kalau ikan itu kira-kira di situ saya lihat Pak.

Nah berikutnya saya akan masuk kepada industri alat kesehatan ya tentu yang mengerikan ke depan Pak saya melihat adalah seperti industri semen, industri besi atau baja berlimpahnya produk impor yang masuk ke kita dan akhirnya menggugurkan banyak Industri atau perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan itu. Nah kita juga khawatir itu musiman industri alat kesehatan produksinya dibutuhkan kemarin banyak yang datang hadir yang membuat tapi nantinya setelah *oversupply* lagi kebingungan dan bahkan negara lain pun pasti akan banyak *oversupply*, nah sehingga kita berharap juga ke depan Pimpinan proteksi juga untuk perusahaan-perusahaan dalam negeri ini harus dimaksimalkan. Masa Covid ini pandemi ini yang terpenting memang bagaimana memberikan ketahanan daripada industri kita tapi juga mempertahankan mereka agar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bisa juga mendapatkan manfaat dari terjadinya peningkatan-peningkatan kebutuhan itu.

Nah sekarang saya ke PHRI. Tadi Pak Parta sudah menyampaikan. Saya tahu Pak dari PHRI saya berharap tadi Pak Haryadi ada di situ juga, tapi mungkin beliau ada kesibukan. Kami di Bali kita di Bali dan Indonesia kita tahu Pak sebelumnya pariwisata kita untuk Wisman kita kira-kira 16.000.000 setahun dan tahun ini pasti akan habis sekali mungkin untuk menembus 2 ,3 juta saja akan sangat berat. Nah itu kita ketahui berat sekali belum lagi pergerakan wisatawan domestik yang begitu lemah sekarang ini karena kondisi pandemic ini. Nah memang saya ingin bertanya dulu Pak, seberapa yakin Bapak akan ketahanan industri Hotel dan Restoran ini untuk menghadapi pandemi yang tidak pasti ini Pak. Tadi Pak Parta sudah menyampaikan jika semua ini dipenuhi beberapa lama Bapak bisa bertahan untuk mencapai normal lama Pak *old normal* itu kita masih belum bisa melihat kapan, *new normal* ini membawa dampak yang sangat signifikan dan berat kepada industri Hotel dan juga Restoran, nah kira-kira bagaimana Bapak menanggapi ini.

Terus yang selanjutnya kamar kita, jumlah kamar kita kan sudah cukup banyak, itu bagaimana Bapak melihat mungkin Bintang 5-nya berapa, Bintang 4-nya berapa, Bintang 3-nya berapa, Hotel Melatinya berapa, sekarang di *price war* terjadi bagaimana kebijakan dari PHRI untuk bisa mengatur anggotanya agar disiplin sehingga harga-harga ini tidak sampai jatuh dan akhirnya ujung-ujungnya juga menghancurkan industri pariwisata itu sendiri. Nah kondisi ini memang Pak kita ketahui mitra Bapak di Kementerian Pariwisata tentu harus juga diajak duduk bersama karena mereka yang punya apa namanya kebijakan dan keputusan tentang

itu, tapi jika di Komisi VI tentu kami akan memperjuangkan secara maksimal apalagi kami juga dari Dapil atau Daerah Pemilihan yang memang hampir mungkin 90% atau lebih mungkin tergantung kepada pariwisata. Nah sehingga kedepan kami berharap Bapak-bapak ini semua mungkin merinci lagi Pak tadi kan secara lisan disampaikan paparannya banyak merinci lagi menyampaikan ke Pimpinan, Pimpinan bisa *mapping* ke mitra kita kementerian mana atau ke komisi mana sehingga betul betul apa yang menjadi aspirasi mereka beliau-beliau ini bisa kita wujudkan. Karena kalau tidak Pak Ketua, ini saya sendiri mengalami di Bali *owner-owner* Hotel dan Restoran (***suara tidak jelas***) sebanyak-banyaknya ke perusahaannya tapi tidak juga bisa akan memberikan *reborn* yang signifikan, karena apa? memang kondisinya *cashflow*-nya yang berat *income*-nya yang sudah *drop*, berapa pun diberikan injeksi ke perusahaan pasti akan tidak mampu.

Tapi tentu ini ada satu konsep Pimpinan mungkin ada satu kebijakan besar tentang Penerbangan, Transportasi, dan juga Pariwisata atau Hotel sehingga betul-betul bisa menyelamatkan secara menyeluruh industri ini karena industri ini sangat sangat berat dan berdampak kepada banyak pihak baik pekerjanya, baik pelakunya, maupun UMKM yang berhubungan dengan sektor-sektor itu. Nah tentu kita berharap ini menjadi satu hari momentum yang baik untuk bisa pertama menyelamatkan industri ini, rekan-rekan kita, masyarakat kita yang bergerak di berbagai sektor ini. Yang kedua menjadi momentum *new normal* untuk bagaimana kebijakan Pemerintah kedepan bisa betul-betul memberikan solusi yang komprehensif dan maksimal. Dan yang terakhir bagaimana momentum ini juga kita siap membangun ketahanan kita untuk mengkonsumsi produk dalam negeri dan pada akhirnya wisatawan domestik kita harus juga digugah untuk tetap berwisata dan pada ujungnya memberikan kontribusi kembali kepada kepariwisataan kita. Dan saya juga tadi sependapat tadi dengan PHRI mungkin Pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk isian kamar dalam bentuk bagaimana kunjungan-kunjungan kepada Hotel-hotel ini sehingga mampu memberikan *occupancy* ya minimal kira-kira 20%, kalau saya tahu Pak 40% minimal untuk *break event*-nya Pak tapi kalau Hotel untuk Melati dia bisa dibawah itu, tapi hotel-hotel ini sangat berat Pimpinan.

Nah mudah-mudahan nanti seluruh mitra kita kita ajak duduk dan akhirnya bisa memberi solusi yang maksimal.

Kira-kira demikian Pimpinan.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Masih ada 2 kami persilakan Pak Khilmi. Selanjutnya Bu Evita.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak-bapak Narasumber yang saya hormati,

Terima kasih tadi atas paparannya yang diberikan cukup komprehensif, namun demikian ada beberapa pendalaman yang ingin saya lakukan. Kita tahu bahwa sejauh ini untuk membantu dunia usaha Pemerintah itu telah mengeluarkan

berbagai jenis bantuan, ada bantuan UMKM, ada bantuan subsidi gaji, ada insentif usaha, ada pembiayaan korporasi dan lain-lain. Saya tuh hanya ingin tahu, tidak usah dijawab di sini kalau memang waktunya tidak cukup bisa dijawab secara tertulis Pak. Sebenarnya bagaimana sih hal-hal yang bantuan terkait tadi bagaimana realisasinya di setiap Anggota-anggota Asosiasi yang ada. Kemudian saya juga pengen tahu masukan Bapak, harapan Bapak dan catatan kritis dari Asosiasi terhadap bantuan-bantuan ini seperti apa.

Kemudian saya masuk kepada PHRI. Pariwisata ini yang memang yang paling terdampak ya terdampak dalam yang namanya Covid-19 iya kan termasuk transportasi, perhotelan, restoran, maupun industri-industri lain yang terkait. Pariwisata ini memang kita ini ya pariwisata itu yang paling pertama diserang, nah masalahnya juga kita yang paling terakhir yang bisa dibuka usahanya kembali. Contohnya Bali kemarin ini sudah dibuka, kemudian ditunda lagi iya kan, tapi Bapak Ketua Asosiasi nih saya hanya berharap iya kan saya rasa ini sudah saatnya seluruh Asosiasi Pariwisata untuk bertemu dan menyatukan sikap kita nih Pak. Sebenarnya bagaimana sih sebaiknya menangani dunia usaha pariwisata ini *pasca pandemic* ini karena kalau saya lihat nih maaf saja Kementerian Pariwisata itu tidak punya konsep yang konkret untuk hal-hal tersebut Pak.

Kemudian untuk PHRI juga saya ingin bertanya mengenai rencana dari Kementerian BUMN untuk apa menggabungkan ya holdingisasi jadi Pariwisata ini nanti akan di *holding* dengan Aviassi, pandangan Bapak ini seperti apa. Saya juga sudah berkomen di Media saya *background* saya juga di pariwisata ya Pak ya saya sangat menentang apa namanya rencana ini, kenapa? Kita tahu bahwa pariwisata ini adalah apa namanya cadangan devisa kedua kita ini setelah minyak itu pariwisata ini loh. Jadi harusnya pariwisata ini harusnya di depan tidak menjadi *holding* dari pada Aviassi dan pariwisata ini itu aksesnya *accessibility*-nya tidak hanya udara ketika kita bicara pariwisata, ada akses laut iya kan ada akses darat. Jadi kita jangan diperkecil jadinya ruang lingkup pariwisata ini hanya untuk seakan-akan hanya untuk udara saja, ingat pariwisata ini tidak hanya *ticketing* itu yang kita harus bicarakan. Saya mendengar teman-teman ASITA bicara mendukung iya kan ya karena mereka hanya melihat dari aspek *ticketing*-nya saja coba lihat lebih lebih apa namanya lebih luas lagi iya kan. Nah ini banyak banyak hal-hal yang saya rasa perlu di diskusikan jangan sampai nanti holdingisasi ini sudah terjadi sudah susah untuk diubah Pak Ketua Asosiasi jadi sebelum ini terjadi sebaiknya industri pariwisata ini duduk pandangan kita itu seperti apa sih sebenarnya gitu.

Kemudian yang kedua ini khusus untuk bantuan subsidi upah iya kan bahwa bantuan subsidi upah ini ini masih relaksasi ya kaitannya ya saya baca di media baru-baru ini dan cukup ramai bahwa bantuan subsidi upah ini bagi pekerja yang bergaji dibawah Rp5 juta itu sepertinya masih banyak kendala, ada katanya yang rekeningnya *double*, ada rekeningnya sudah tutup. Saya justru ingin tahu nih dari asosiasi sebaiknya bagaimana sih cara efektif untuk menyalurkan subsidi bantuan subsidi upah yang Rp600.000,- ini Pak.

Kemudian asosiasi Permebelan dan Kerajinan. Kalau kita lihat sebenarnya kita ini harus bangga iya kan bahwa dan kita harus percaya bahwa industri mebel dan kerajinan Indonesia ini sangat kuat posisinya saat ini tidak hanya di regional harapan kita kedepan kita ini juga menjadi *leader* di yang namanya global Pak secara global, karena apa? Kita ini masih banyak ketika tadi alkes punya masalah di bahan baku, kalau kita bicara dengan Asosiasi Permebelan dan Kerajinan bahan baku kita itu masih melimpah iya kan, terus SDM kita ini juga cukup masih cukup gitu Pak. Jadi ini mungkin saat pandemi ini memang kita berdampak tapi kita harus apa

namanya harus percaya bahwa ini hanya untuk sementara dan kedepan ini akan *reborn* kembali. Oleh karena itu saya mendukung gitu kan upaya untuk tetap menghentikan ekspor bahan baku dan tentunya kita mendukung Pemerintah sudah punya itu namanya program hilirisasi iya kan. Nah oleh karena itu dan juga kalau saya *nggak* salah Pemerintah juga sekarang sudah mempermudah sistem verifikasi dan legalitas kayu sehingga harga bahan baku kita akan lebih kompetitif, jadi saya masih percaya karena bahan baku yang menjadi masalah di industri lain, di industri kerajinan dan mebel ini bahan baku kita masih melimpah didalam negeri.

Untuk Asosiasi alat kesehatan saya prihatin mendengar apa yang dipaparkan oleh Ketua Asosiasi tadi bahwa Perusahaan dalam negeri itu kita ini hanya mampu memenuhi 10% dari pada kebutuhan. Nah tapi ini kontradiktif dengan apa namanya komplain yang Bapak berikan, permintaan yang Bapak berikan bahwa kita harus menahan impor. Bagaimana kita menahan impor ketika produksi kita didalam negeri hanya mampu memenuhi 10% dari kebutuhan? Bahaya sekali ketika alat kesehatan tidak boleh impor tapi kita didalam negeri belum mampu untuk apa namanya memenuhi kebutuhan kita sendiri. Terus terang Pak ada *image* bahwa alkes produksi dalam negeri itu *nggak* bagus kualitasnya iya kan jelek lah kualitasnya gitu, nah memang tugas besar nih bagi Asosiasi untuk apa namanya merubah citra ini Pak dan harus disosialisasikan bahwa produk alkes dalam negeri ini mempunyai standar yang baik iya kan. Kemudian saya juga ingin tahu sebenarnya apa sih usulan dari Asosiasi untuk memenuhi apa me apa namanya untuk memecahkan masalah kita ini dengan masalah keberadaan bahan baku ini Pak, apa sih usulan dari Asosiasi sebenarnya. Coba bayangkan Kimia Farma saja deh iya kan, alkes dan pengobatan saja kita menguasai produk ASEAN Pak tetapi produk obat-obatan kita 90% bahan bakunya itu masih impor. Ketika saya bicara dengan Menteri Perindustrian, saya sudah katakan bagaimana kalau misalnya kita ini ada industri bahan baku jadi memang kita menciptakan bahan baku. *Alhamdulillah* dari presentasi Pak Menteri untuk 2021 kedepannya industri kita beliau sudah banyak menginginkan apa namanya melakukan transformasi-transformasi dari pada industri kita.

Terus kemudian kalau untuk Asosiasi Pengolahan Pemasaran Produk Perikanan. Sebenarnya saya ingin tahu kalau kita lihat dari pasar kita Pak udah banyak pasar untuk Amerika kita cukup besar, pasar Jepang kita cukup besar. Nah sekarang nih apa sih sebenarnya kiat-kiat apa yang harus kita lakukan agar kita ini menguasai pasar global Pak?

Saya rasa demikian Bapak Ketua.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Evita yang mengakhiri pendalaman dari kawan-kawan.

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Daftar Ketua, satu saja.

KETUA RAPAT:

Siapa ini?

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Bu Melani.

KETUA RAPAT:

Oh Bu Melani, silakan.

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi VI dan para Asosiasi yang tadi sudah memaparkan.

Saya 2 saja yang saya akan menanyakan karena yang lain sudah ditanya oleh teman-teman Komisi VI, saya menanyakan bukan menanyakan sih sebenarnya tadi pernyataan dari ASMINDO Permebelan dan Kerajinan, dikatakan, ada gangguan ya? dikatakan bahwa ITPC kurang berperan. Kemarin waktu Raker dengan Kementerian Perdagangan justru di masa pandemi ini ITPC sangat berperan bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan untuk mengangkat produk-produk dari dalam negeri. Jadi ini cuma mau ini aja mau klarifikasi karena katanya justru di masa pandemi ini ITPC banyak mempromosikan barang-barang dari produk Indonesia sehingga banyak dari Australia, Amerika dan dari Jepang dan Korea yang permintaannya sekarang sedang lebih banyak dari sebelumnya, itu untuk ASMINDO.

Satu lagi untuk APIKI. Kebetulan saya Dapilnya DKI Jakarta tadi menerangkan tentang pengalengan ikan, Ikan Sarden. Kalau di DKI Jakarta kan banyak ikan lele bagaimana apakah sudah ada pemikiran juga atau sudah dikembangkan pengalengan untuk ikan lele.

Mungkin itu saja dulu Ketua.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Pak Khilmi masih bisa nggak kontak, Halo.matinya sudah dari tadi. Pak Khilmi, Pak Khilmi, Pak Khilmi, sudah masuk? Itu sudah masuk itu, nah ini. Signalnya kali Pak, halo, dia nggak nyambung ya. Diperbaiki dulu komunikasinya.

Bapak/Ibu dan Saudara-saudara sekalian,

Mengenai Rapat hari ini dari masukan-masukan dari RDPU virtual hari ini dari Komisi VI dan yang virtual ini, virtual dan fisik dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI), kemudian dengan APIKI, kemudian dengan AP5I, kemudian dengan AGRI, dan P2MI, ASMINDO, dan ASPAKI, kita sudah mentabulasikan

berbagai usulan-usulan yang ada di paparan Bapak, Ibu sekalian yang ini akan kita bawa ke Rapat Kerja dengan Kementerian-kementerian terkait mohon ditampilkan Pak, mohon ditampilkan Pak. Nah ini ya dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia kita sudah tabulasikan, kalau masih ada yang ingin (***suara terputus***) silakan, lanjut, seperti yang ada di paparan semua sudah kita tulis. Pak Khilmi kalau sudah oke nanti kita berikan ya, kita nunggu nunggu sinyalnya Pak Khilmi supaya bagus. Dari AGRI sudah dimasukkan ya Asosiasi Permebelan kita masukkan, lanjut, semua kita masukkan ini datanya akan kita pakai rapat. Dan terakhir bahwa Komisi VI telah mendengar masukan dan pandangan dari para narasumber Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia, Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan (AP5I), kemudian AGRI, kemudian P2MI, kemudian ASMINDO, ASPAKI, mengenai kondisi aktual terkait dampak Covid-19. Selanjutnya masukkan dan pandangan tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Komisi VI dalam rapat kerja dengan Mitra kerja Komisi VI DPR RI.

Selanjutnya sebelum kami tutup kami persilakan untuk *closing statement* masing-masing tamu yang hadir.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Pak Ketua, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu, sebentar dulu Bu saya ngomong dulu Bu. Merespon dari beberapa pertanyaan dari para Anggota tadi, kemudian juga tambahan kalau ada yang direkomendasikan ya. *closing statement* merespon dari kawan-kawan yang bertanya atau minta respon sekaligus kalau ada tambahan *closing statement* tambahan untuk beberapa poin yang memang perlu menjadi rekomendasi yang belum tertuang didalam paparannya, saya kira itu. Karena banyak yang memberikan pendalaman dan meminta respon dari rapat hari ini dari undangan atau dari Bapak Ibu sekalian.

Kami persilakan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk memberikan respon lebih dahulu. Sebentar dulu Pak, ada dari Pak Khilmi masih bisa kontak? Kami persilakan. Nanti kalau nyambung kita beri kesempatan.

PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA (PHRI):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Ibu Anggota Dewan yang kami hormati baik yang *offline* ataupun *online*,

Pertama saya akan menjawab dulu tadi pertanyaan dari Bapak tadi bahwa bagaimana kalau jika diberikan stimulus apa yang direalisasikan apa yang namanya akan menjamin atau tidak untuk bangkit dan seterusnya. Pertama bisa kami jawab adalah untuk bangkit itu memang kita butuh *demand* pasar, nah untuk itu saat ini yang kita permasalahan itu kondisinya agak berbeda sekali menjawab pertanyaan Bu Nevi tadi bahwa kan pernah untung ya sekarang kondisinya rugi bagaimana? Jadi perusahaan itu semua tergantung dengan (***suara tidak jelas***) itu

yang paling utama, nah kondisinya saat ini bahwa pandemi ini berbeda dengan kondisi-kondisi tahun 98 dan seterusnya karena semuanya stuck di tutup semuanya secara nasional ataupun internasional tutup. Nah untuk itulah kami tentu memohonnya kepada Pemerintah kembali untuk merealisasikan ini apapun yang kami inginkan adalah beban dari pengusaha itu bagaimana bisa diringankan karena ini bukan kondisi yang kita baru bicara 3 bulan yang lalu gitu loh *stop*-nya ini sudah kondisi yang sudah lebih dari 6 bulan dan akan membayangkan lebih dari kapannya kita nggak tahu ini kondisinya. Jadi yang akan korban itu nanti pertama adalah tenaga kerja ini harus kita pikirkan nantinya gitu loh. Jadi stimulus itu sebenarnya adalah untuk bagaimana kita bertahan dulu. Kita sekarang *nggak* ada yang berpikir untung loh kalau di sektor pariwisata bertahan saja sudah bisa menutup *cost* saja sudah syukur gitu loh Pak, bukan memberikan untung nggak ada yang untung kan tadi saya sampaikan bahwa kita jalan itu untuk mengurangi subsidi biasanya begitu.

Kemudian yang kedua masalah BLT. BLT ini sebenarnya yang jadi kan ada yang **(suara tidak jelas)** Pak ada yang **(suara tidak jelas)** ada yang awalnya kita mungkin tidak bicara PHK sekarang PHK itu mungkin kita bicaranya kita program pembayaran PHK-nya mungkin yang 5 tahun dan seterusnya karena kita juga nggak mampu bayar orang PHK kan ada kewajiban perusahaan tapi itu yang terjadi karena gambaran untuk kembali itu kan belum ada sampai detik ini. Nah kita berharap untuk BLT ini sebenarnya kan sekalian juga menjawab bahwa Pemerintah itu sudah ada memberikan beberapa kebijakan ya cukup beberapa ya saya perhatikan di sini ada PLN apa masalah Bank segala dan seterusnya ya. Namun masalah BLT ini yang jadi masalah itu kan syarat bahwa syarat itu harus masih on BPJS-nya itu terakhir Juni sementara industri kami itu sebenarnya sudah *stuck* dari bulan Maret, nah ini yang nggak akan terjadi kita nggak akan terima Tenaga Kerjanya nggak akan terima Pak. Kalau inilah datanya itu bisa dipakai data dari bulan Maret atau Februari saja mungkin masih bisa gitu loh jadi jangan syaratnya ke sana, belum lagi rekening Bank tadi kan yang bikin masalah.

Kemudian yang berikut saya sudah jawab tadi yang masalah tentang untung dan rugi ya karena ini sudah berbeda kondisinya kondisinya *nggak* sama dengan ini. Kemudian sejauh mana PHRI sudah berkomunikasi dan apa tanggapannya. Kita sudah selalu berkomunikasi dari bulan Maret itu hampir ke semua K/L termasuk Menko, jadi kita selalu intens termasuk Komisi X dan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Kita sudah sebenarnya sudah dibahas masalahnya baik dengan DPR dengan Komisi X kemudian juga dengan Pemerintah, namun yang hasilnya ya yang tadi yang kami sampaikan beberapa BLT yang sudah kami sampaikan dalam presentasi. Namun tetap implementasinya kendala itu dari syarat Pak Pimpinan.

Kemudian berikutnya penerapan protokol kesehatan. Disinilah perannya DPR RI bahwa kami tiga kali membuat protokol kesehatan Bu, jadi kita sudah buat menyesuaikan KMK. Namun dalam fungsi pengawasan kan kamu mungkin dari organisasi saja Bu harus peran Pemerintah, rasanya sudah ada Inpres, sudah ada apa namanya Permenkes, sudah juga ada Pergub atau Perwali, jadi memang harus sama-sama masif ya pengawasannya di sini karena kalau organisasi nggak mungkin secara masif seperti Pemerintah yang memiliki sanksi di dalam sana.

Kemudian juga apa nama paket isolasi. Nah ini pertanyaan menarik ya Ibu Nevi ya karena di sini ada namanya SE Kemenkes itu yang 313 Bu masalah isolasi. Kami sudah selalu mengusulkan bahwa isolasi itu dibentuk 2, ada yang dibiayai oleh Pemerintah, ada juga yang swasta yang bisa jadi pilihan bagi orang, jadi ini bayar karena kan nggak semua ada orang yang mau begini tempat fasilitas yang mumpuni dia punya uang gitu loh. Namun masalahnya di SE ini tidak ada turunannya jadi kami

kesulitan untuk masuk berperan untuk menjadi isolasi sebenarnya, banyak yang menawarkan kami akan merubah konsep apapun untuk bisa bertahan. Ini sudah dari bulan April kami lakukan tapi semenjak SE ini keluar sampai detik ini belum bahkan di SK gugus yang terakhir itu katanya ada sertifikasinya di Kemenkes itu pun *nggak clear*, kita sudah surati berkali-kali *nggak clear*. Jadi ini yang terjadi gitu loh, jadi masih banyak kebijakan yang masih mungkin masih belum *clear* disananya.

Kemudian apa namanya ya memang pariwisata kita belum tahu sampai kapan akan kembali untuk itu sekali lagi saya sampaikan peran kami berharap ada peran Pemerintah, seperti bicara baru ya. Bolak balik ini tadi saya sudah paparkan *occupancy* itu kontribusi wisman itu cukup besar 50% *supply* kamarnya cukup besar dengan kondisi seperti ini kan tutup semua nih, bagaimana yang dengan kewajiban dengan Bank saya rasa sudah hilang semua itu karena mereka kondisinya seperti itu. Ekosistemnya akan mati di sana, karena apa? Karena pariwisata ini bukan hanya hotel dan restorannya saja tapi yang hidup ekosistemnya tadi industri makanan minuman semua pasti akan terkena di sana, nah ini yang mesti dibayangkan Bapak Ibu supaya kelihatan gitu loh.

Kemudian dengan jumlah kamar yang banyak ini memang itu tantangannya Pak makanya kami berharap satu-satunya cara itu sebenarnya bukan melalui Bank karena kalau Bank kita *nggak* akan *visible*, membeli *occupancy* ini akan lebih baik menjadi subsidi. Ini yang lebih penting sebenarnya karena Pemerintah sebagai informasi Pak, kami sering diinformasikan ada yang istilahnya menjual paket jadi banyak juga pemerintah daerah atau pusat mereka ingin membuat paket *hot deal* atau paket yang baik gitu. Sekarang *nggak* usah dibuat paket *hot deal* saja harga itu *pricing* itu sudah terjun bebas, ini bukan masalah *pricing* lagi sudah masalah *demand*. Kalau masalah *demand* kembalinya *nggak* bisa lagi ke arah paket bukan *bundling* kerjanya disini, tapi adalah ya subsidi tadi. Pemerintah harus ada di situ, kenapa? kalau *nggak* yang korban nanti pasti tenaga kerjanya karena kalau industri *nggak* bangkit nanti serapan tenaga kerja *nggak* akan baik.

Kemudian apa namanya bagaimana atau ya ini mungkin sudah dijawab ya sudah mengeluarkan banyak bantuan realisasinya yaitu tadi implementasi atau eksekusinya yang ribet yang kami tidak bisa dapatkan. Nah kemudian apa namanya holdingisasi, holdingisasi ini Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati begini. Kami ingin menanggapi masalah holdingisasi BUMN sebenarnya kami cuma menyarankan bagusya yang namanya Pemerintah itu hadir di tempat-tempat yang swasta *nggak* bisa masuk ya mohon maaf mungkin kayak hotel, hotel kan semua sudah bermain di sana tapi kalau *airport* atau yang besar-besar yang yang yang membutuhkan risiko yang tinggi mungkin mereka bisa masuk di sana harusnya begitu sehingga membuka kesempatan untuk orang ber-*entrepreneur* dan wiraswastanya lebih besar itu kami harapkan. Jadi kalau menyatu itu akan jadi saingan juga dengan swastanya nanti. Kemudian yang kedua masalah Aviasi sebenarnya niatnya bagus tapi mesti di ingat menjadikan Bandara itu menjadi *superhub* dan *hub* ini juga ada kendala, kenapa? Setiap destinasi itu ujungnya adalah akses. Bayangkan satu daerah yang sudah punya internasional bandara dan dia punya satu satu saja *direct flight* internasional, kemudian gara-gara di dikelompokkan jadi *superhub* akhirnya internasionalnya *nggak* boleh masuk lagi ke sana, nah ini yang jadi masalah *supply* kamarnya akan terganggu nanti. Saya contohkan saja satu yang paling mudah itu Sumatera Barat Bu Nevi, dia punya Air Asia satu, orang yang datang masuk ke sana karena 50 menit itu bukan karena hanya sekedar mereka berwisata tapi pulang kampung, nah kebayang *nggak* kalau

nanti dia harus muter dulu ke Sumatera Utara (***suara tidak jelas***) jadi jam memang waktu tempuh ini akan jadi masalah.

KETUA RAPAT:

Persingkat Pak teknisnya nanti didalam.

PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA (PHRI):

Saya rasa itu Pak yang untuk masalah aviasi. Kemudian sebagai masukan tadi Pak yang tambahan tadi Pak yang PLN Pak sama gas belum masuk tadi di resume. PLN itu kami berharap di situ ada ditambahkan untuk yang ingin menaikkan kembali daya yang tadi turun sementara itu digratiskan Pak, itu satu. Kemudian PLN juga untuk gas itu untuk biaya penggunaan gas minimumnya juga dihapuskan Pak.

Terakhir tadi masalah BLT Pak. BLT itu kalau bisa syaratnya itu adalah data di kantor BPJS tenaga kerja saja jadi jangan ada syarat Juni-nya masih *on* itu itu berat buat kita, itu Pak.

KETUA RAPAT:

Pak sampaikan ke kami Sekretariat menambahkan.

PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA (PHRI):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya ke Asosiasi Pengalengan Pak, masih ada yang perlu didiskusikan?

KETUA ASOSIASI PENGALENGAN IKAN INDONESIA (APIKI):

Terima kasih.

Karena ada beberapa pertanyaan saya jawab dulu Pak, oke. Pertama ke Pak Nyat Kadir sekian tahun kita nggak ketemu dulu ketemunya kami demo di Batam untuk pasir laut, saya Sekjen HMSI waktu itu gitu ya jadi luar biasa dan Bapak tiap hari ada ikan kaleng mudah-mudahan semua Anggota DPR juga siap ikan kaleng di rumahnya masing-masing, kalau belum ada boleh telepon saya gitu.

Baik kemudian saya lompat saja ke Ibu Melani, Lele bisakah dikalengkan? Ya, prinsip bisa dan Malaysia sudah mengalengkan ini dengan nama Keli.

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Ikan Lelenya Pak?

KETUA ASOSIASI PENGALENGAN IKAN INDONESIA (APIKI):

Ya?

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Lele itu maksudnya.

KETUA ASOSIASI PENGALENGAN IKAN INDONESIA (APIKI):

Ikan Lele kalau bahasa Sumatera Keli ya Keli, ikan ikan hitam Lele itu sudah dikalengkan, tapi memang konsumen sana senang dengan Ikan Lele dikalengkan. Di Indonesia kita pernah nyoba Bandeng, pernah nyoba Lele, pernah nyoba Patin untuk dikalengkan, konsumen kita kurang lebih senang pada posisi *fresh* pecel lele misalnya, patin ya dalam bentuk pindang dan lainnya seperti itu, jadi kami *follow the consumer* seleranya kan harus kita ikuti sana. Jadi sementara ini memang masih Sarden, Tuna, Makarel, Udang, Cumi, Kepiting ya kelasnya itu saja, ke depan kita belum tahu. Kalau harga lele diturunkan kan *nggak* mungkin Pak karena ada faktor juga harga (***suara tidak jelas***) Lele saja sekarang 14-16.000, kami Rp11.000 Ikan sarden sudah teriak kita kecuali Lele bisa lele jualnya mahal *nggak* mau orang mending ke pecel lele Rp11.000 pakai nasi dapat satu kira-kira begitu, jadi perilaku konsumen menjadi perhatian kami.

Kemudian yang menarik sekali adalah kenapa *nggak* ada pengalengan ikan di Maluku Pak Hendrik, juga tadi Pak Ramli di Aceh. Saya alhamdulillah sudah keliling termasuk waktu pencaanangan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional dulu saya hadir di sana saya ketemu dengan Gubernur (***suara tidak jelas***) kita keliling berapa daerah, tetapi begitu bicara industri membangun industri dengan kita menjalankan Indonesia industrialisasi itu berbeda Pak. Bangun industri 3 bulan, 4 bulan macet, tapi kalau industrialisasi aspek-aspek hulu hilirnya harus kita bahas dalam. Termasuk ini 1 poin yang yang saya sampaikan adalah kegesitan dari Pemerintah Daerah untuk mengundang investor. Saya punya pengalaman dengan Sulawesi Utara saya 5 tahun hidup disana kemudian dengan kampungnya Ibu Nevi, Gubernur 2 Gubernur sebelumnya itu untuk mengisi Pelabuhan humus masuk investor untuk aktif hadir Jakarta berkomunikasi dengan kami. Pak zaman Pak Zainul Bahar saya fasilitator di Jakarta untuk mengumpulkan calon investor, zaman Pak Gamawan juga demikian. Jadi kalau daerah aktif kemudian menjelaskan apa yang mau ditawarkan kepada investor terjadi komunikasi ada publikasi, termasuk Sulawesi Tengah untuk rumput laut. Jadi mereka datang satu tim tapi dengan persiapan rapat dengan kita kemudian saya undang calon-calon investor siapa yang kira-kira berminat dikumpulkan *deal*, *deal* dan itu biasanya *action*-nya langsung dan humus selesai, ada wujud gitu ya. Di Sulawesi Tengah wujud, Sulawesi Utara wujud, bahkan sampai internasional ada investor asing. Nah bukan berarti Maluku kurang aktif, tapi saya sebagai pelaku industri belum melihat ada komunikasi kita intensif waktu kita datang kesana bahkan dengan Pak Jusuf Kalla kami keliling naik Kapal Perang itu kan juga melihat posisi di Maluku dan malamnya kami *discuss* sama Pak Jusuf Kalla di Kapal. Kenapa? Ditanyakan juga industri berat bahasanya begitu kan industri pengalengan *nggak* kesana. Kami menjelaskan bahwa faktor-faktor infrastruktur dan kalau Pemerintah bisa menyelesaikan titik ekspor kemudian apa namanya logistik yang bisa karena begini Pak masuk kita investasi tempat disitu *resource* iya tetap di seluruh Indonesia maksimum dan 4 bulan musim jadi 8 bulan lagi kita harus pasok dengan *link* logistik.

Nah tetapi Komisi VI ini bisa mengejar pertumbuhan industri berikutnya tetapi kalau mengharapkan *existing industry* untuk memperluas kami belum karena kami

masih 50 kami jadikan dulu dia menjadi 80 keatas. Nah kalau untuk investor baru kan penawaran-penawaran fasilitas yang ditawarkan Pemerintah itu yang dijual Pak, kemudian peta musim, peta logistik, infrastruktur yang terjadi, dan kami akan bantu kalau Pemerintah memang serius termasuk Maluku iya saya penasaran karena dari tahun berapa saya masuk tahun 90-an awal saya sudah masuk ke **(suara tidak jelas)** kemana-mana Pak saya keliling, pertama mencari *roadmap* begitu putusnya adalah *link* logistik itu ada. 2 hari lalu dari Kendari tanya kok Kendari *nggak* bisa? di sana pendek-pendek juga musim, tetapi juga logistiknya belum, belum bisa dengan baik. Jadi kalau orang mau investasi dia nongkrong di situ misalnya berhari-hari tapi dibawa oleh Pemerintah Daerah apa yang bisa ditawarkan aktif lah intinya aktif Pemerintah Daerah yang serius. Aceh saya bilang, saya komunikasi waktu saya kunjungan saya pernah jadi Anggota Pokja di Kei periode kemarin kami datang ke sana komunikasi kemudian sambil komunikasi sama teman-teman Malaysia pernah mengundang calon investor dari Malaysia untuk masuk ke Aceh, tetapi kelanjutannya belum juga gitu Pak itu tuh perlu diperhitungkan. Jadi aktifnya Pemerintah daerah berkomunikasi dengan kalangan industri itu menjadi salah satu poin dan faktanya yang kami alami sendiri di 3 Provinsi saya bilang Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah itu konkret terjadi.

KETUA RAPAT:

Bisa tolong lebih dipersingkat lagi.

KETUA ASOSIASI PENGALENGAN IKAN INDONESIA (APIKI):

Iya *closing* saya dalam kaitannya dengan Covid-19 ini industri pengalengan Indonesia komitmen untuk memperhatikan kebutuhan dalam negeri dan kami akan *support* pemerintah terus untuk kepentingan sosial dan terkait itu termasuk juga *combat to stunting* ya kemudian untuk meningkatkan imunitas masyarakat Indonesia dengan.

KETUA RAPAT:

Penekanan impor bahan baku Pak ya itu hanya kalau situasi memang dibutuhkan.

KETUA ASOSIASI PENGALENGAN IKAN INDONESIA (APIKI):

Iya, kami setuju dengan Ibu siapa sebelum Ibu Melani tadi.

KETUA RAPAT:

Bu Evita.

KETUA ASOSIASI PENGALENGAN IKAN INDONESIA (APIKI):

Kalau bisa hentikan ekspor *rawmat* kami setuju mendukung itu.

KETUA RAPAT:

Tertinggi penangkapan ikan itu.

KETUA ASOSIASI PENGALENGAN IKAN INDONESIA (APIKI):

Iya, kemudian ada pembenahan logistik apa itu saya lupa pembenahan logistik itu dengan mengoptimalkan peran kapal pengangkut ikan Indonesia. Zaman kemarin Ibu Susi itu dibatasi, tapi sekarang sudah mulai dibuka dan kalau kapal-kapal bergerak menyusur Pulau-pulau kecil yang nggak ada *cold storage*, yang nggak ada pabrik es itu bisa ditampung tidak akan terjadi kekurangan bahan baku. Itu bisa diatasi kita menghemat devisa luar biasa dan kami siap untuk berdiskusi lebih lanjut menjadikan Indonesia kuat di bidang industri pengalengan ikan dan pengolahan ikan lainnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak ASMINDO masih ada, nggak ada ya? Sebentar, sebentar Pak Khilmi dulu, Pak Khilmi.

F-P.GERINDRA (KHILMI):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi saya ini pernah audiensi dengan industri pabrik bumbu masak Sasa dan Miwon dan kesulitan-kesulitan ini kan sebetulnya barangnya ada di Indonesia dan kita membentuk BUMN kan supaya agen pembangunan untuk industri-industri yang ada di Indonesia bukan industri yang ada di negara asing. Jadi saya berharap untuk kebutuhan bahan-bahan baku industri-industri yang ada di Indonesia ini dipenuhi dulu jangan ekspor dulu, semua saya akan mendukung seperti pengalengan ikan itu kebutuhan dalam negeri dibutuhin dulu baru kalau ada kelebihan dikit-dikit kita ekspor ini kan mematikan industri yang di dalam negeri tetapi menghidupkan industri yang di luar negeri. Padahal pangsa pasar kita ini kan 50% ada di dalam negeri 50% untuk ekspor, tetapi dalam hal ini kebutuhan bahan-bahan pokok ini dikasih harga mahal di dalam negerinya. Dan contoh seperti tender yang dilakukan oleh PTPN 3 kalau dia itu tidak memenuhi harga yang di inginkan dia dibatalin kalau sistem tender ini kan nggak boleh kayak begitu ini kan sekarang di RDP ini kan ada KPPU juga jadi KPPU lah yang menilai apakah itu ada pelanggaran sistem tender atau nggak yang dilakukan oleh PTPN itu. Dan saya berharap ini Ketua dalam catatan ini nanti kita akan bawa ke RDP dengan PTPN supaya Komisi VI ini menyuarakan bahwa kebutuhan dalam negeri yang diutamakan untuk kebutuhan yang di luar negeri itu dinomorduakan karena hitung-hitungannya itu dengan harga yang ada di bumbu masak itu petani tetes pun udah untung gitu loh. Jadi jangan kaya mencari keuntungan dalam **(suara terputus-putus)** gitu.

itu saja dari saya Ketua, tambahan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih selamat dalam perjalanan.

F-P.GERINDRA (KHILMI):

Ya.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan ASMINDO.

ASOSIASI INDUSTRI PERMEBELAN DAN KERAJINAN INDONESIA (ASMINDO):

Jadi mungkin saya akan menjawab tentang pendalaman tadi yang disampaikan Ibu tadi. Yang pertama adalah ASMINDO harus ambil peran untuk LKPP, kemudian cinta produk dalam negeri, dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa jawaban yang saya gabung dengan beberapa pertanyaan dan ada yang sama seperti masalah cinta produk dalam negeri. Prinsipnya begini, jadi Pemerintah ini kan sudah sering ya membuat jargon Saya Cinta Produk Indonesia kemudian itu dulu, sekarang yang terbaru di 75 tahun Indonesia merdeka Bangga Buatan Indonesia tapi tidak pernah konsisten. Maksudnya begini hanya jargon tapi maksud saya ya kalau memang sudah menetapkan begitu itu ya jangan ngomong doang tapi juga aturannya dibuat, implementasinya bagaimana, maksud saya begitu jadi sesuai antara omongan dan tindakan, itu yang pertama.

Kemudian pameran di digital ya memang sih Bu di era begini pameran digital perlu, cuma pameran yang kita maksud ini memang pameran yang sudah ter-agenda setiap tahun ini *nggak* bisa digital karena memang *buyer* ini sudah ordernya rutin dia harus melihat produknya, melihat, meraba, nah persoalannya di situ. Boleh sih dengan digital tapi saya yakin hasilnya tidak akan maksimal, itu. Kemudian 12% yang belum terakses dengan bantuan-bantuan yang sudah diberikan Pemerintah. Yang saya maksud 12 ini dari hasil survei kita, angka ini satu kemungkinan memang pengusaha itu tidak butuh dengan bantuan yang ditawarkan, bisa jadi ya, kemudian ada juga yang mungkin belum tersosialisasikan. Nah ini yang ini tugas kita sebagai Asosiasi mensosialisasikan adanya bantuan-bantuan yang sudah digulirkan Pemerintah, ini tugas kita dan kita akan terus *push* itu.

Kemudian yang kedua pertanyaan dari Bapak Hendrik, Maluku tadi penggunaan (***suara tidak jelas***) nasional harus diwajibkan, ya sama tadi jargon apa berarti Bangga Buatan Indonesia. Intinya kalau memang betul-betul mau tindakan konkret ya Perpres di LKPP itu harus menyatakan begitu pake furniture, mebel produk lokal, kita ekspor, konkret. Nah ini saya lihat di gedung ini saja setiap beberapa tahun itu kan ada pengadaan, kasih contoh dong kursi saja ini kayaknya impor ini, ini contoh mungkin, ini lokal kalau ini iya *nggak* tahu perlu di cek jadi seperti ini.

Yang ketiga Bapak Rafli sudah tadi tinggal ya. Bapak Putu dari Bali ada satu komitmen dari Presiden ya sama. Artinya tadi kalau ingin konkret Perpres nyatakan, kita memang harus pakai produk lokal intinya itu. Ini dari dulu nih ngomong nanya wacana-wacana terus, kita lelah juga dengarnya.

Kemudian dari Bu Evita tentang menghentikan bahan baku, menghentikan industrialisasi bahan baku, menguasai pasar global, semestinya DPR dukung program Asosiasi. Menguasai pasar global iya memang dalam rangka ke sana, tapi maksud kita kita juga harus di *support* termasuk anggarannya kalau kita mau menguasai pasar global berarti juga dukungannya itu juga harus diperkuat. Contoh promosi saja, kita minim bagaimana kita mau menguasai pasar global, dana promosinya saja minim, itu kan begitu logikanya ya tambah anggarannya untuk promosi kira-kira begitu.

Ibu Melani DKI, ITPC kurang berperan. Justru saya melihat sudah, seperti dari Australia, Amerika iya dariacamata itu mungkin di bidang tertentu. Yang saya maksud belum berperan maksimal tugas ITPC ini kan sebagai pusat promosinya kita, mewakili kita promosi, jadi maksud saya di maksimalkan potensi andalan ekspor Indonesia ini apa, di mana di petakan. Oh yang cocok di Amerika komoditasnya itu misalnya contoh *furniture* dan misalnya alat-alat kesehatan contoh, yang di Eropa apa, petakan di situ *door to door* bila perlu kita di *reward* sebagai *expert* untuk *door to door* mencari *buyer* di sana. Saya yakin hasilnya lebih maksimal, biayanya tidak semahal yang dikeluarkan oleh ITPC.

Sekian, terima kasih. Kalimat penutup saya, kalau 98 ini UKM menjadi pahlawan negara, saat ini harusnya Pemerintah juga membantu UKM yang sedang sakit. Terima kasih.

PERSATUAN PABRIK MONOSODIUM GLUMATE DAN GLUTAMIC ACID INDONESIA (P2MI):

Satu tambahan saja Pak Ketua untuk yang dari P2MI. Sepertinya itu pembatasan ekspor bahan baku Tetes belum masuk tadi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oh pembatasan ekspor.

PERSATUAN PABRIK MONOSODIUM GLUMATE DAN GLUTAMIC ACID INDONESIA (P2MI):

Bahan baku Tetes.

KETUA RAPAT:

Pembatasan ekspor bahan baku Tetes, kita usulkan untuk kebutuhan bahan dalam negeri ya.

PERSATUAN PABRIK MONOSODIUM GLUMATE DAN GLUTAMIC ACID INDONESIA (P2MI):

Iya.

KETUA RAPAT:

Rafinasi.

ASOSIASI GULA RAFINASI INDONESIA (AGRI):

Izin sedikit saja Pak tadi menanggapi juga pendalaman yang disampaikan Bu Nevi tentang peluang swasembada. Saya pikir ini bicara swasembada panjang Bu ya jadi dari hulunya juga karena memang kaitan dengan bahan baku. Tentunya tadi sudah Pak Pimpinan Rapat juga sampaikan bahwa ini harus dibahas dalam *roadmap*.

Kemudian dari Pak Rafli tadi menyampaikan tentang pembangunan pabrik rafinasi di Aceh. Saya pikir ini juga sudah disampaikan tadi pada prinsipnya kapasitas yang ada sekarang masih *over* sehingga sebenarnya memang perlu dipikirkan lagi kalau memang ada kebutuhan di wilayah Aceh sebenarnya bisa disampaikan dan bisa diakomodir oleh pabrik yang ada Pak memang perkaranya tinggal pendistribusian saja dan ini juga memang balik lagi kebutuhan-kebutuhan yang ada ini memang mesti dipikirkan dan dibicarakan dalam *roadmap* tersendiri Pak. Jadi izin kalau boleh tadi yang disampaikan untuk dari AGRI kalau memang tadi saya sempat sempat menyampaikan bahwa kita ada menginginkan satu kepastian perihal memang ada kewajiban kebun sebenarnya lebih ke arah seluruhnya adalah sebenarnya kita membutuhkan satu *roadmap* yang komprehensif yang dibuat Pemerintah di mana memang industri rafinasi ini mendapat jaminan kepastian terhadap investasi dan berusaha di Indonesia, itu saja Pak memang yang salah satunya itu. Tapi secara umum harusnya kita membicarakan tentang *roadmap* yang komprehensif.

Sekian, terima kasih.

KETUA UMUM AP5I (BUDHI WIBOWO):

Izin tadi AP5I Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Suwun. Oh ya dari Asosiasi Alat Kesehatan kami persilakan.

ASOSIASI PRODUSEN ALAT KESEHATAN INDONESIA (ASPAKI):

Terima kasih Pak Ketua.

Kalau saya melihat dari resume yang tadi dibikin, itu ada 4 poin saya kira itu udah mewakili kami. Tapi mungkin sedikit kami mau sedikit apa mau meluruskan komentar dari teman-teman di Anggota Komisi VI yang yang kami hormati. Misalnya tadi dari Ibu Nevi bahwa memang produksi alat kesehatan itu *item*-nya banyak sekali Pak mungkin sampai 20000 macam *item* mulai dari yang paling sederhana misalnya korek kuping sampai dengan yang paling canggih MRI, jadi akhirnya kita ini negara seperti Indonesia yang tidak begitu dikenal sebagai negara yang produsen teknologi tinggi kita akhirnya terbatas hanya memproduksi produk-produk yang seperti teknologi menengah ke bawah seperti *hospital furniture*, dan tensimeter, barang barang habis pakai, dan lain-lain. Tapi itupun ya belanja barang habis pakai, *hospital furniture* itupun kalau misalnya betul-betul produksi Indonesia itu di-*protect* itu bisa 40% kita itu memproduksi untuk kebutuhan dalam negeri, jadi dari 10 ke 40 masih

banyak *gap* yang kita bisa raih sehingga keseriusan untuk mem-*protect* produk dalam negeri di setiap kesempatan kami harapkan.

Kemudian dari Bu Evita tadi bahwa kita itu memang masih 10% produk dalam negeri, nah tapi yang saya sampaikan tadi produk-produk yang sudah kita *overproduction* ya ditambah produk-produk yang nanti *pasca* Covid-19 tadi ada ada masker, ada APD, ada itu kan sekarang udah *overproduction* kalau nggak ini nggak di-*protect* itu akan habis nanti *pasca* Covid ya. Kemudian tadi yang produk-produk unggulan kita seperti *Hospital furniture*, tensimeter, sarung tangan, itu sudah *over capacity* jadi itu juga mungkin bisa dibatasi impornya.

Mungkin itu aja Pak Ketua dari kami.
Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA UMUM AP5I (BUDHI WIBOWO):

Dari AP5I Pak Ketua, mohon izin untuk menanggapi.

KETUA RAPAT:

Siapa ini?

KETUA UMUM AP5I (BUDHI WIBOWO):

Dari AP5I. Dari Asosiasi Pengusaha Pengolahan Produk Perikanan Pak, AP5I.

KETUA RAPAT:

Oh, dari Pak anu ya Asosiasi Pengusaha Pengolahan, ya Pak silakan.

KETUA UMUM AP5I (BUDHI WIBOWO):

Budhi Wibowo Pak, oke. Jadi untuk menanggapi tadi singkat saja saya hanya menanggapi tentang masalah industri perikanan di Indonesia Timur. Sebenarnya sudah cukup banyak pabrik-pabrik ikan kecil di Indonesia Timur baik itu di Ambon, di Dubu, di Sorong ya, tapi permasalahannya adalah logistik seperti tadi yang disampaikan Pak Adi Surya jadi biaya pengiriman itu karena semua ekspor kan melalui Surabaya atau Jakarta atau Makassar biaya pengirimannya itu yang sangat mahal dari Timur ke Indonesia. Sebagai contoh misalkan dari Ambon ke Jakarta itu mungkin biayanya hampir sama atau lebih mahal malahan dari kita ngirim dari Jakarta dari pada Jakarta ke Amerika.

KETUA RAPAT:

Ya Pak (***suara tidak jelas***) *trafficking* kita ini Indonesia sentris itu *green gold*, *blue gold*, *black gold*. *Green gold* itu Pertanian, Perkebunan, *blue gold* itu adalah sektor perikanan dan kelautan. Kita tidak ingin Jawa sentris Pak, infrastruktur kita tebar (***suara terputus-putus***) turun, nah kalau itu memang *cost production*-nya

tinggi kasih ke *feeding* kita mana yang pasar ekspor mana yang pasar impor tetap harus konsepnya Indonesia sentris Pak seperti wilayah penangkapan ikan. Nah bagaimana untuk *low cost*? Untuk *cost production*-nya itu ada langkah lompatan Pak, jadi ini ada lebih bagaimana bukan hanya sekedar *cost and profit* tapi *cost and benefit* buat bagaimana membangun industri di setiap wilayah itu ada *green, blue, gold* Pak walaupun pasar tetap yang 150 juta di Jawa. Tolong yang semacam ini tidak tidak bisa tidak harus ada penjungkirbalikan pola berpikir Pak, mungkin itu ekspornya atau mungkin untuk apanya. Nah Bapak *feeding* ke kita karena kita mikirnya harus Indonesia Pak selain bahwa untuk kopi juga pengen punya daya saing memperkecil mempersandingkan *cost production* di masing-masing korporasi Pak.

Saya kira itu Pak.

KETUA UMUM AP5I (BUDHI WIBOWO):

Ya saya tambahkan saja ya Pak Ketua maaf.

Jadi kalau kami kan orientasi untuk yang orientasi ekspor Pak, alangkah baiknya kalau rencana dulu Pemerintah kan pernah punya rencana dihitung untuk bisa langsung untuk di ekspor ke luar negeri misalkan. Kalau seperti itu akan lebih bagus bagi kami Pak sehingga produk-produk kami yang ada di Indonesia Timur bisa masuk ke Bitung langsung diekspor dari pada di dari Bitung atau dari Dobo harus dibawa ke Jawa dulu Pak untuk diekspor. Jadi itu untuk mengurangi *cost transportation* untuk ekspor.

Saya kira itu saja dari kami Pak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh Ketua kepada Ketua Perhimpunan Hotel Indonesia (PHRI), kemudian kepada Ketua Asosiasi APIKI, Kemudian pada Ketua AP5I, Ketua AGRI, Ketua P2MI, Ketua ASMINDO, Ketua ASPAKI dan Bapak Ibu saudara sekalian yang hadir di sini.

Intinya kita terima kasih sekali dari paparan dan pendalaman kita butuh belanja informasi ya kita disini menginginkan mendapatkan data yang terus-menerus meningkat bahwa industrialisasi 4.0 yang ingin menempatkan *based on natural resource* kita ini dari *asset* menjadi *resources* dengan strategi pasar baik itu di sektor kemaritiman dan perikanan, di sektor *green gold* perkebunan dan pertanian, di sektor *black gold* hilirisasi dan di sektor pariwisata ini harus didukung dari semua pihak. Komisi VI akan mengintegrasikan mensinergikan dengan data-data yang ada dan informasi-informasi yang ada terutama *recovery pasca* Covid ini harus menjadi suatu ya cambuk lah untuk kita semua bahwa konsepsi kedaulatan itu bukan mimpi lagi. Dulu kalau bisa impor kenapa harus nanam, kalau bisa impor kenapa harus kita bikin sendiri, toh *cost production*-nya lebih murah kita lebih mendapatkan dengan harga yang murah dengan perlindungan konsumen kita, ternyata tidak demikian.

Kita berharap industri-industri nasional kita terus tumbuh, kami dari DPR ingin memaksimalkan kinerja kita baik di persoalan apakah di regulator, apakah di implementasi regulasi ini atau di kebijakannya, apa di programnya atau di kegiatannya ini yang terus kita dalami di dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan berbagai *stakeholder*. Bahan-bahan ini akan kita pakai didalam Rapat Kerja

dengan Kementerian karena kita berharap dengan pengatasan dampak Covid-19 ini konsepsi kedaulatan kita di sektor pencukupan berbagai hal yang menyangkut kebutuhan nasional kita itu akan lebih mengedepankan hal-hal yang terkait dengan produk-produk yang memang bisa kita buat sendiri baik di sektor makanan, di sektor kesehatan, di sektor furniture, apalagi di sektor perikanan, apalagi di hotel dan restoran, di gula. Ini semua adalah sesuatu yang membuat kita terbelalak-belalak ternyata masker saja ini dalamnya belum bisa kita bikin, ternyata vitamin C bahan bakunya masih tergantung di luar, ternyata ventilator begitu kita terpepet semua berpikir dan kita bisa. Nah keterpepetan ini yang saya kira termasuk di DPR baru Pak baru ada keinginan untuk kita bangkit bareng-bareng. Saya kira itu sesuatu yang positif buat kita dari dampak pandemi Covid-19 ini untuk membangun semangat kedaulatan kita dari berbagai hal.

Dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dan juga Pimpinan Komisi VI serta Anggota yang telah dengan sabar dan mungkin juga sudah dengan lapar dan perhatian mengikuti acara sampai rapat siang hari ini dari jam 10 lebih tadi kita mulai dan rapat segera kita akhiri dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih.

Dengan demikian rapat saya tutup.

Wassalam'ualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.24 WIB)

Jakarta, 8 September 2020

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD.

DEWI RESMINI, S.E., M.SI.
NIP. 197104071992032001